

**PERAN GERAKAN PEMUDA (GP) ANSOR DALAM PENUMPASAN PKI
DI PEKALONGAN TAHUN 1965-1966**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta Untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sastra



Oleh:
Nevi Sartika Ria
(06407141001)

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor Dalam Penumpasan PKI Di Pekalongan Tahun 1965-1966” ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 21 November 2011

Pembimbing

Dina Dwikurniarini, M.Hum.
NIP.19571209 198702 2001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor Dalam Penumpasan PKI Di Pekalongan Tahun 1965-1966" ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 6 Desember 2011 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Drs. Djumarwan	Ketua Penguji		3 Januari 2012
Miftahuddin, H.Hum	Sekretaris		3 Januari 2012
Ririn Darini, M.Hum	Penguji Utama		3 Januari 2012
Dina Dwi.K, M.Hum	Penguji Pendamping		3 Januari 2012

Yogyakarta, 3 Januari 2012

Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Negeri Yogyakarta,

Dekan



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.

NIP. 19620321 1989031 1 001

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nevi Sartika Ria

NIM : 06407141001

Prodi : Ilmu Sejarah

Jurusan : Pendidikan Sejarah

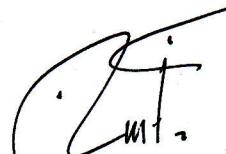
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Judul : Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor Dalam Penumpasan PKI di
Pekalongan Tahun 1965-1966

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah pekerjaan sendiri dan sepengetahuan saya tidak berisi materi yang pernah dipublikasikan dan ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai sumber atau data referensi. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 21 November 2011

Yang Menyatakan



Nevi Sartika Ria

NIM. 06407141001

MOTO

Hidup ini tidak selamanya indah tetapi bila kita mensyukuri dan dapat menikmati,
hidup ini terasa lebih indah (Penulis)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan
yang lain, dan kepada Tuhan Mu hendaknya kamu berharap
(Q.S Al Insyarah 5-8)

PERSEMBAHAN

Kupanjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT

**Kupersembahkan dengan penuh kasih pada kedua orangtua yang telah
membuat saya merasa istimewa**

Abstrak

PERAN GERAKAN PEMUDA (GP) ANSOR DALAM PENUMPASAN PKI DI PEKALONGAN TAHUN 1965-1966

Oleh: Nevi Sartika Ria

Tahun 1965 di Kota Pekalongan terdapat tiga basis kekuatan politik besar yaitu PNI (nasionalis), NU (agama), dan PKI (komunis) dan di wilayah tersebut penuh ketegangan karena PKI merebah. Konflik yang melibatkan orang PKI, NU, dan militer yang mengarah pada penumpasan PKI di Kota Pekalongan masalah aksi sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran wilayah Pekalongan sebelum tahun 1965, sejarah berdirinya Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Pekalongan, Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam penumpasan PKI, dan dampak bagi Nu, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Masyarakat, dan Partai lain setelah penumpasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang terdiri dari empat tahap yaitu (1) Heuristik dilakukan dengan pencarian dan pengumpulan sumber primer maupun sekunder yang relevan dengan penelitian. (2) Kritik sumber (Verifikasi) dilakukan dengan penilaian dan pengujian terhadap sumber sejarah sehingga dapat ditentukan otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah secara akumulatif untuk memperoleh fakta sejarah. (3) Interpretasi dilakukan dengan menafsirkan, menganalisis, dan menghubungkan fakta-fakta sejarah. (4) Historiografi menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk karya tulis.

Hasil penelitian menunjukkan sebelum tahun 1965, di Kota Pekalongan sudah berkembang partai besar seperti PNI, NU, PKI yang memiliki kekuatan cukup kuat. Sejak peristiwa G-30-S, kaum komunis di Pekalongan mulai mendapat tekanan yang hebat. Pembubaran PKI di Kota Pekalongan dimulai pada awal bulan Oktober 1965. Sikap kaum agama khususnya Nahdlatul Ulama (NU) melalui organisasi pemudanya GP Ansor berusaha menumpas PKI yang sudah lama melakukan aksi-aksi merugikan di masyarakat. Hingga tahun 1966 di bawah komando ABRI dan dukungan dari kyai setempat GP Ansor melakukan pembersihan kaum komunis Pekalongan. Dampak dari penumpasan PKI bagi NU, masyarakat, partai lain, dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Kota Pekalongan adalah mengadakan perbaikan dalam bidang spiritual masyarakat, melakukan kerjasama dengan Hanra, Koramil, Kepolisian Distrik, dan Kodim di Kota Pekalongan untuk menindak tegas penduduk yang dianggap terlibat gerakan G-30-S atau eks anggota PKI dan berkoordinasi untuk menetralsisir situasi pasca penumpasan PKI dengan melakukan kewaspadaan agar aksi-aksi PKI tidak kembali terjadi.

Kata Kunci: Pekalongan, PKI, GP Ansor

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, rahmat serta karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Penumpasan PKI di Pekalongan Tahun 1965-1966”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Program Studi Ilmu Sejarah Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab M.A., M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
3. Ibu Terry Irenewaty, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ijin dalam proses penyusunan proposal skripsi.
4. Bapak Danar W, M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin dalam proses penyusunan skripsi.

5. Bapak Drs, Djumarwan dan Ibu Dina Dwikurniarini, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dorongan dan masukan selama kuliah di Ilmu Sejarah FIS UNY.
6. Ibu Dina Dwikurniarini, M.Hum., selaku Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini bisa berjalan dengan baik.
7. Ibu Ririn Darini, M.Hum., selaku Narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini dan memberikan arahan sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Djumarwan selaku Ketua Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
9. Bapak Miftahuddin, M.Hum., selaku Sekretaris Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
10. Seluruh Staf Dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama belajar di Program Studi Ilmu Sejarah FIS UNY.
11. Staf Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY, Perpustakaan Kolose Santo Ignatius Yogyakarta, Perpustakaan FIB UGM, Perpustakaan Lembaga Kajian Pedesaan UGM, Perpustakaan Pusat UNS yang telah memberikan pelayanan peminjaman buku-buku yang berguna untuk keperluan kuliah maupun penulisan skripsi ini.

12. Seluruh instansi pemerintah Kota Praja Pekalongan yang membantu dalam pengumpulan sumber.
13. Seluruh narasumber yang telah bersedia memberikan informasi dalam penelitian ini.
14. Terima kasih untuk “Ibuku Ririn, Bapakku Bambang, dan Adikku Rio” yang memberikan dukungan, doa sampai terselesaikannya kuliah dan dengan sabar mendidikku.
15. Untuk Bude Bekti, Bude Nursih, Bude Toto, Pade Toto, Semua sepupu-sepupu, keponakan-keponakan, dan teman-teman kecil yang membuat hari-hari penulis terasa menyenangkan.
16. Mas Gilang Haikal terimakasih untuk semangat yang terus diberikan kepada penulis.
17. Terima kasih Mas Kuncoro dan Indi atas pinjaman bukunya, dan tak bosan selalu memberi motivasi.
18. Untuk Keluarga Besar Ilmu Sejarah 2006 Risti, Emi, Tri, Yani, Arum, Nina, Atar, Jati, Ovan, Habib, Wawan, Rido, Arga, Dimas, Tarigan, Sigit, Neo, Khusni, A`an, Adi, Adnan yang selalu memberi semangat dan keceriaannya (sampai ketemu di kehidupan yang baru saya pasti selalu merindukan kalian, *love you all*. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita meraih cita dan cinta).
19. Untuk Keluarga Besar Ilmu Sejarah angkatan 2000-2011, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih atas semangat dan kebersamaannya.

20. Untuk Yani, Tri, Emi, Ovan, Asep, Tarigan, Attar, Fuzan terima kasih untuk persahabatan dan kebersamaannya selama ini.
21. Untuk teman-teman Delima (mbak titin, mbak ira, mbak ita, mbak dian, nita, tika, vita, ije, irma) terima kasih persahabatan dan kebersamaannya.
22. Sahabat-sahabat KKN 25 Gatep (Hendi, Pomo, Budi, Firdan, Tiara, Ike, Ari, Titon, Mbak Suar, Bapak Ibu Dukuh, Dek Putri, Mbak Yeti, Mbak Nina, Mbak Niken, Mas Dedi) terima kasih banyak atas kebersamaan dan semangat yang kalian berikan sehingga memberikan motivasi bagi penulis.
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perkembangan di masa depan. Akhir kata dari penulis, semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Desember 2011

Penulis

Nevi Sartika Ria

NIM. 06407141001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan Umum	7
2. Tujuan Khusus	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Bagi Pembaca	8
2. Bagi Penulis.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Historiografi yang Relevan	14
G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	27

BAB II. KONDISI UMUM WILAYAH PEKALONGAN	
SEBELUM TAHUN 1965	29
A. Keadaan Geografis dan Demografi.....	29
B. Keadaan Sosial Ekonomi	37
C. Keadaan Politik.....	44
BAB III. GERAKAN PEMUDA (GP) ANSOR DI PEKALONGAN	
TAHUN 1965	49
A. Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pekalongan	49
B. Mekanisme Kerja Gerakan Pemuda (GP) Ansor	58
C. Pertentangan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Dengan PKI.....	62
BAB IV. GERAKAN PEMUDA (GP) ANSOR DALAM	
PENUMPASAN PKI DI PEKALONGAN TAHUN 1965	69
A. Koordinasi ABRI.....	69
B. Penggalangan Persatuan Umat Beragama	76
C. Bekerjasama dengan Masyarakat.....	79
D. Dampak Penumpasan PKI Bagi NU, GP Ansor, Masyarakat, dan Partai lain	87
BAB V. KESIMPULAN	93
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	103

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
ANO	: Ansor Nahdlatul Oelama
BANSER	: Barisan Ansor Serbaguna
BANU	: Barisan Ansor Nahdlatul Ulama
BPS	: Badan Pusat Statistik
BP-KNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
BTI	: Barisan Tani Indonesia
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DPD	: Dewan Pertimbangan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
FPT	: Front Persatuan Tani
G30S	: Gerakan Tiga Puluh September
Gerayak	: Gerakan Rakyat Kelaparan
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
Gerwis	: Gerakan Wanita Indonesia Sedar
GP ANSOR	: Gerakan Pemuda Ansor
GPM	: Gerakan Pemuda Marhaen
GSNI	: Gerakan Siswa Nasional Indonesia
GTI	: Gerakan Tani Indonesia

Hanra	: Pertahanan Rakyat
HMI	: Himpunan Mahasiswa Indonesia
ISDU	: Indische Sosial Demokratische Vereeniging
IPPI	: Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia
Jateng	: Jawa Tengah
Kap-Gestapu	: Kesatuan Aksi Penggayangan Gerakan Kontra-revolusi 30 September
KAPPI	: Kesatuan Aksi Palajar dan Pemuda Indonesia
Kabir	: Kapitalis Birokrat
Kamda	: Komando Operasi Daerah
Ki RPKAD	: Kompi Resimen Para Komando Angkatan Darat
KNIL	: Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger
Kodam	: Komando Daerah Militer
Kodim	: Komando Distrik Militer
Konstrad	: Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat
Koops	: Komando Operasi
KOTI	: Komando Operasi Tinggi
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
Lekra	: Lembaga Kebudayaan Rakyat
Lesbumi	: Lembaga Seni dan Budaya Muslimin
Manikebu	: Manifesto Kebudayaan
Masyumi	: Majelis Syuro Muslim Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Nasakom	: Nasionalisme, Agama, Komunisme
Nekolim	: Neo-Kolonialisme-Imperislisme
NU	: Nahdhatul Ulama
Ops Gab	: Operasi Gabungan
Ops Mil	: Operasi Militer
OT	: Organisasi Terlarang
Pangdam	: Panglima Daerah Militer
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pepelrada	: Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah
Perhimi	: Perhimpunan Mahasiswa Indonesia
PEPEKUPER	: Pembantu Pelaksana Kuasa Perang
PETA	: Pembela Tanah Air
Petani	: Persatuan Tani Nasional Indonesia
Petanu	: Persatuan Tani Nahdatul Ulama
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
PII	: Pelajar Islam Indonesia
PIR	: Persatuan Indonesia Raya
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia
PPDI	: Partai Penegak Demokrasi Indonesia
PR	: Pemuda Rakyat
PSI	: Partai Sosialisme Indonesia

PTD	: Pamong Tani Desa
PW	: Pemandu Wanita
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
RPKAD	: Resimen Para Komando Angkatan Darat
Sarbumusi	: Sarikat Buruh Muslimin Indonesia
SGB	: Sekolah Guru Bawah
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SOKSI	: Sentral Organisasi Sosialis Indonesia
SPG	: Sekolah Pendidikan Guru
SR	: Sekolah Rakyat
STII	: Sarekat Tani Islam Indonesia
TNI AD	: Tentara Negara Indonesia-Angkatan Darat
TNI	: Tentara Negara Indonesia
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UUPBH	: Undang-Undang Pertanahan dan Bagi Hasil

DAFTAR ISTILAH

- Tanah *absentee* : Tanah luas yang dimiliki tidak dikelola atau digunakan karena jarak atau letak geografis yang jauh dengan si pemilik sehingga menjadi terlantar.
- Cita/Mori : Bahan baku batik yang terbuat dari kain.
- Malam : Bahan perintang warna dalam proses pembatikan.
- Tujuh setan desa : Lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat, tengkulak jahat, bandit desa, pengusaha jahat, dan tuan tanah yang dianggap penghisap.
- Islam *kejawen* : Suatu keyakinan dan konsep Hindu-Budha yang cenderung ke arah mistis, yang tercampur menjadi satu dan diakui sebagai agama Islam.
- Rukun islam : Menjalankan syariat Islam yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji.
- KODIM : (Komando Distrik Militer) Komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat di bawah Korem. Kodim membawahi beberapa Komando Rayon Militer (*Koramil*).
- Kodjarsena : (Korp Pelajar Serbaguna) nama lain dari Pramuka (Praja Muda Karana).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Peta Jawa Tengah dan Peta Kabupaten Pekalongan dengan 16 Kecamatan...	103
2. Peta Kabupaten Pekalongan dengan 19 Kecamatan	104
3. Peta Kota Pekalongan dengan 2 Kecamatan	105
4. Peta Kota Pekalongan dengan 4 Kecamatan	106
5. Arsip, Surat Instruksi PW GP Ansor Jawa Tengah Tanggal 18 Oktober 1964 Kepada PC GP Ansor se-Jawa Tengah	107
6. Arsip, Surat Laporan Tanggal 29 Oktober 1965 Dari GP Ansor Kotapraja Pekalongan Kepada PP GP Ansor	108
7. Arsip, Surat Dari Komando Resor Militer 071 Widjajakusuma Komando Distrik Militer 0710 Tanggal 30 Desember 1965	112
8. Arsip, Surat Keputusan PD/PRT GP Ansor Tahun 1968	119
9. Arsip, Daftar laporan Wilayah GP Ansor Jawa Tengah 1969	133
10. Partai2 di Djateng Serukan Peninggi Kewaspadaan	134
11. Umat Islam Djateng Dukung Penuh Kebijakan Presiden	137
12. Lambang Nahdlatul Ulama dan Lambang Gerakan pemuda (GP) Ansor ...	139
13. Lambang BANSER (Barisan Ansor Serbaguna)	140

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaan dengan melakukan perjuangan-perjuangan mengusir penjajah, seperti pada saat menumpas gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30-S PKI) pada tahun 1965. Setelah merdeka pemerintah Indonesia lebih memperhatikan bidang politik, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sudah disahkan dan perangkat negara sudah dibentuk tetapi masih ada perangkat lain yang belum dibentuk. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNIP) yang berfungsi sebagai parlemen sementara sebelum diadakan pemilihan umum mengusulkan agar dibentuk partai politik.

Hasil pemilu 1955, menghasilkan empat partai besar dan membawa PKI menembus jajaran empat besar. PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) masing-masing mendapat 57 kursi, NU (Nahdlatul Ulama) 45 kursi dan PKI (Partai Komunis Indonesia) 35 kursi dari 257 kursi yang disediakan¹. Perkembangan partai politik pada waktu itu lebih mengarah pada dasar idiologinya, seperti NU dan Masyumi yang berdasarkan agama, PNI yang berdasarkan nasional, dan PKI yang berdasarkan komunis. Adanya kecenderungan mengarah kepada idiologinya masing-masing

¹Muhamad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi Politik Kaum Muda*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 57.

mengakibatkan setiap partai memperjuangkan untuk kepentingannya sendiri, sehingga menimbulkan ketegangan sosial yang mengarah pada konflik.

Periode tahun 1960-an di Indonesia adalah puncak pertikaian politik yang sangat kuat. Peristiwa Oktober 1965 atau sering disebut gerakan 30 September 1965 yang dilakukan PKI adalah pemberontakan yang kedua setelah kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan PKI yang pertama di Madiun pada tahun 1948 yang dikenal sebagai pemberontakan PKI Muso. Setelah pemberontakan di Madiun dapat ditumpas oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ternyata masih banyak tokoh PKI yang selamat dari hukuman pengadilan. Hal ini disebabkan keadaan negara pada waktu itu yang tidak memungkinkan. Selain sibuk dengan peristiwa Agresi Militer Belanda Kedua, pemerintah juga menghadapi pemberontakan lain, seperti pemberontakan Kartosuwiryo².

Pengaruh PKI semakin luas di tingkat desa sejak tahun 1952, PKI telah memulai taktik kecil tetapi berhasil sebagai landasan kerja mereka di kalangan petani. PKI muncul dengan slogan “tanah buat petani dan petani memiliki tanah sendiri” yang mulai dilansir tahun 1953. Diundangkannya *Landreform* tahun 1959 seolah-olah membuka jalan bagi PKI untuk memperlancar aksi-aksinya. Tuntutan pelaksanaan undang-undang agraria secara radikal dimanfaatkan sebagai isu politik dan terus dipropagandakan sejak tahun 1960. Kampanye tentang *Landreform* dan janji-janji pembagian tanah mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk Kota Pekalongan yang miskin dan merasa tidak puas dengan kondisi

²Tim, *Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 6*, (Jakarta: Cipta Adi Pusaka, 1989), hlm. 127.

pemerintahan yang ada sehingga jumlah anggota PKI mengalami kenaikan yang luar biasa³.

Kekerasan yang muncul di Kota Pekalongan pada paruh kedua tahun 1960-an tidak bisa dilepaskan dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi sebelum tahun 1965. Di beberapa pedesaan suhu ketegangan antara orang-orang PKI dengan golongan nonkomunis terutama PNI (Partai Nasional Indonesia) semakin meningkat. Hal ini dipicu oleh perubahan pola PKI yang menjadi lebih agresif sejak tahun 1963. Perubahan ini telah menghasilkan suasana revolusioner dan mengalami tentangan serta memunculkan kebencian dari golongan nonkomunis. Ketegangan terjadi antara tahun 1963 hingga tahun 1964 dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang PKI/BTI (Barisan Tani Indonesia) terhadap petani kaya dalam bentuk aksi sepihak yang melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah.

Tindakan kekerasan dalam bentuk aksi sepihak semakin agresif karena didukung oleh semakin massifnya kegiatan-kegiatan kesenian yang dilakukan oleh Lekra di beberapa kelurahan dengan menampilkan tarian Genjer-Genjer serta tari Bagi Hasil yang ditujukan untuk kaum petani. Ditambah lagi adanya kampanye yang dilancarkan PKI terhadap apa yang disebut dengan Tujuh Setan Desa⁴. Kegiatan tersebut semakin meningkatkan kebencian golongan nonkomunis

³Wawancara dengan Bapak Subadi, Mantan anggota PNI, tanggal 13 Desember 2011.

⁴ Sugiyanto Padmo, *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*, (Yogyakarta: Media Pressindo dan KPA, 2000), hlm. 115.

terutama NU, PNI terhadap PKI karena beberapa anggota NU adalah petani-petani kaya yang terkena aksi sepihak PKI/BTI.

Tahun 1963 PKI meluncurkan kampanye guna memberlakukan undang-undang *Landreform* dari tahun 1959-1960 yang pelaksanaannya hampir terwujud. Mereka senantiasa berpropaganda untuk menghancurkan semua kekuatan konservatif yang digambarkannya sebagai Tujuh Setan Desa⁵. Dengan demikian, para petani memiliki kesan bahwa bukan pemerintah yang memperjuangkan nasib petani, melainkan PKI sendiri. Pada Kongres ke V Maret 1954, diputuskan bahwa hanya PKI-lah satu-satunya partai yang patut dijadikan sandaran yang dipercaya kaum tani untuk mencapai kebebasannya⁶. Cabang-cabang PKI dan semua organisasi massa yang bergabung padanya, seperti: Pemuda rakyat, Gerwani, Lekra, juga memobilisasi dan membentuk kesatuan yang siap untuk melakukan konflik fisik. Hal ini membuat para tuan tanah yang terkena *landreform* PKI bergabung ke NU⁷.

Peristiwa G-30-S 1965 yang menuduh PKI sebagai pelaku tunggal, membawa dampak luar biasa bagi langkah-langkah NU dan juga massanya. Tanpa dikomando, terjadilah mobilisasi penangkapan dan pembunuhan besar-besaran

⁵Tujuh Setan Desa adalah Lintah darat, Tukang ijon, Kapitalis birokrat, Tengkulak jahat, Bandit desa, Pengusaha jahat, dan Tuan tanah yang dianggap penghisap. Lihat Amirudin Kardi, *Kaum Merah Menjarah Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 102.

⁶Arbi Sanit, *Badai Revolusi, Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 139-140.

⁷Aceng Abdul Aziz, dkk. *Islam Ahlussunnah Waljama'ah di Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Dinamika Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Ma'arif NU, 2007), hlm. 235-236.

terhadap PKI terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah oleh kelompok-kelompok yang dipimpin tokoh NU khususnya di Kota Pekalongan. Pada tanggal 5 Oktober 1965 PBNU bersama-sama ormasnya menuntut secara mutlak pembubaran PKI dan menyeru kepada umat Islam untuk membantu ABRI dalam menumpas Gerakan 30 September (G-30-S)⁸.

Sebelum peristiwa G-30-S/PKI meletus, di Kota Pekalongan terdapat beberapa organisasi di antaranya PKI, Gerwani, Lekra, BTI, dan Pemuda Rakyat. Pada September 1965, kegiatan warga Kota Pekalongan berjalan normal. Sejak RPKAD memasuki Kota Pekalongan suasana politik sangat kacau. Adanya isu yang berhembus di kalangan penduduk tentang perburuan anggota PKI, BTI, dan Gerwani, warga Pekalongan yang mengikuti organisasi-organisasi komunis mulai merasa terancam. Mereka menerima surat dari udara yang menyatakan adanya operasi RPKAD untuk mencari anggota-anggota PKI, BTI, dan Gerwani. Wilayah Pekalongan juga menjadi tempat pelarian anggota PKI dari daerah-daerah lain. Penangkapan serta kekerasan terhadap para anggota PKI dilakukan oleh golongan militer, pemuda Islam, antikomunis, serta warga setempat yang tidak aktif dalam organisasi PKI. Setelah meletusnya peristiwa G-30-S, keadaan politik di Pekalongan sangat menegangkan, kehidupan sosial ekonomi rakyat begitu

⁸M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hlm 137-140.

memprihatinkan, sehingga Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pekalongan mengadakan gerakan untuk melawan PKI beserta ormas-ormasnya. Saat itu juga diberlakukan jam malam dalam upaya pembersihan PKI⁹. Dalam upaya pembersihan ini, Gerakan Pemuda (GP) Ansor berada pada barisan terdepan. Usaha yang dilakukan bersama-sama dengan pemuda lainnya ialah bergabung dalam “Kesatuan Aksi Pengganyang Gerakan Kontra-Revolusi 30 September” (KAP-Gestapu)¹⁰. Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam operasi pembersihan PKI di Pekalongan membuat penulis tertarik untuk mengkajinya dimana wilayah tersebut memiliki kekuatan politik seperti nasional, agama, komunis sangatlah besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan judul yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana kondisi Pekalongan sebelum pemberontakan PKI 1965?
- b. Bagaimana peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Penumpasan PKI di Pekalongan ?

⁹*Arsip*, Surat laporan tanggal 29 Oktober 1965 dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Praja Pekalongan Kepada PP Gerakan Pemuda (GP) Ansor tentang peristiwa pengganyangan G30S/PKI. Lihat lampiran 6, hlm. 108.

¹⁰Andree Feillard, *Islam et Armee Dans L'indonesie Contemporaine Les Pionniers de la Tradition*. a.b. Lesmana. *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKiS. 1999), hlm. 72.

- c. Bagaimana dampak penumpasan PKI bagi NU, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Masyarakat, dan Partai lain?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Untuk melatih daya pikir yang kritis, analisis, sistematis dan objektif terhadap peristiwa-peristiwa sejarah, sehingga dapat memahami segala isi dan nilai yang terkandung dalam setiap fenomena kesejarahan.
- b. Melatih dan mengaplikasikan metodologi penelitian sejarah dan historiografi yang diperoleh dari perkuliahan dan menuangkannya dalam bentuk karya sejarah.
- c. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia melalui bentuk karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kondisi umum wilayah Pekalongan sebelum tahun 1965.
- b. Untuk memperoleh informasi tentang sejarah berdirinya Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Pekalongan.
- c. Mengetahui peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Penumpasan PKI di Pekalongan.

- d. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penumpasan anggota PKI di Kota Pekalongan tahun 1965-1966.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca

- a. Dengan membaca karya ini diharapkan pembaca akan lebih memahami dan mendapatkan penjelasan yang objektif tentang sejarah berdirinya, serta peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Penumpasan PKI di Pekalongan dalam kurun waktu 1965-1966.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian sejarah dimasa yang akan datang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang berkaitan dengan sejarah bangsa, khususnya sejarah lokal.

2. Bagi Penulis

- a. Memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana sastra.
- b. Karya ini akan menjadi tolak ukur kemampuan dalam rangka meneliti, menganalisis, dan merekonstruksi peristiwa sejarah.
- c. Mengkaji secara mendalam tentang sejarah lokal terutama tentang sejarah perkembangan Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Penumpasan PKI di Pekalongan tahun 1965-1966.

E. Kajian Pustaka

Tahun 1964, sebelum Gerakan 30 September 1965 terjadi, aksi-aksi radikal PKI makin meningkat. Sikap PKI beserta massanya semakin agresif dengan meningkatkan aksi ofensif revolusionernya. Segala macam usaha dilancarkan, seperti demonstrasi, rapat umum, pidato umum, kampanye pers dan radio, serta kampanye poster dan papan-papan propaganda raksasa. Di tepi-tepi jalan mereka menghasut rakyat untuk memusuhi golongan-golongan yang dianggap sebagai lawan politiknya. Di bidang media massa, PKI mempengaruhi pemerintah untuk membrendel surat kabar yang anti-komunis.

Dalam bidang agama dan pendidikan, PKI berusaha merongrong kepercayaan seseorang dan melakukan aksi propaganda anti agama. Di kalangan cendekiawan, kampanye yang menghasut juga dilancarkan oleh PKI, seperti kampanye anti-BPS (Badan Pendukung Sukarno) dan kampanye anti-Manikebu (Manifesto Kebudayaan)¹¹. Di tingkat pusat, PKI senantiasa berusaha menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Terhadap partai-partai politik dan ormas-ormas besar yang mempunyai landasan politik berbeda, PKI melakukan infiltrasi fisik maupun ideologis akibatnya, kaum Nasionalis dan Agama mulai bangkit. Di berbagai daerah, mereka tidak lagi bersikap pasif menghadapi serangan yang tidak henti-hentinya dari PKI. Golongan-golongan agama mulai menggiatkan organisasi Kaum Santri dan Pemuda Islam. Golongan Agama dan Nasionalis terlibat konflik dengan PKI dan hubungan mereka memburuk. Akibatnya bentrokan mulai tidak

¹¹Tim, *op.cit.*, hlm.132.

dapat dihindarkan di wilayah-wilayah dimana kaum Komunis dan kaum penentangannya, golongan Agama dan Nasionalis memiliki massa fanatiknya.

Aksi-aksi sepihak yang terjadi di beberapa daerah telah mempertegas pertentangan antara kaum Komunis dengan Islam, termasuk juga di wilayah Pekalongan. Munculnya kekuatan komunis serta kaum Islam bisa ditarik dari kondisi sosio-geografis wilayah ini. Pekalongan merupakan wilayah yang dekat dengan Semarang, dengan demikian wajar jika wilayah Pekalongan juga menjadi basis Komunis meskipun bukanlah golongan yang dominan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Herbert Feith bahwa karesidenan Semarang merupakan basis kaum abangan yang secara langsung juga telah menunjukkan kekuatan Komunis¹². Pendapat Feith ini telah dibantah oleh Arbi Sanit bahwa Semarang tidak hanya menjadi basis kaum abangan atau komunis tetapi juga merupakan basis kaum santri. Hal ini dijelaskan oleh Sanit karena ada dua hal. Pertama, Semarang merupakan tempat awal berdirinya *Indische Sosial Demokratische Vereeniging* (ISDV) yang merupakan pendahulu PKI. Kedua, jauh sebelum Sneevliet datang, Semarang telah menjadi pusat penyebaran agama Islam yang kuat di masa kerajaan Demak. Untuk itu karesidenan Semarang menjadi tempat dua kekuatan sosial politik, yaitu golongan agama dan golongan komunis¹³.

Fakta di Karesidenan Semarang itu bisa memberi gambaran tentang kondisi Pekalongan karena wilayah ini cukup berdekatan. Pekalongan menjadi basis komunis sekaligus basis paling dominan kaum agama. Seperti yang

¹²Arbi Sanit, *op.cit.*, hlm. 185.

¹³*Ibid.*

diungkapkan oleh Anton E Lucas bahwa setidaknya ada dua golongan di Pekalongan, yaitu orang-orang kiri yang beragama Islam bekas buangan dari Digul akibat pemberontakan tahun 1926 serta guru-guru agama (kyai) beserta murid-muridnya (santri) yang umumnya merupakan anggota NU¹⁴. Gerakan kaum komunis di Pekalongan telah berakar kuat dan bisa dilihat dari peristiwa revolusi sosial tiga daerah pada tahun 1945, dimana kaum kiri aktif melakukan gerakan revolusi menentang status quo di Pekalongan. Kekuatan Komunis di Pekalongan juga bisa dilihat dari hasil pemilu DPR tahun 1955, PKI mendapat tempat ketiga dibawah NU¹⁵. Partai NU yang mendapat suara kedua di Pekalongan adalah partai yang besar setelah PNI. Secara kultural, memang wajar jika NU mendapat banyak suara karena Pekalongan memang basis kaum NU. Di samping itu, dibandingkan dengan karesidenan-karesidenan lain di Jawa Tengah, Pekalongan memiliki jumlah lembaga-lembaga keagamaan Islam paling banyak¹⁶.

Secara umum terjadi perselisihan yang tajam antara NU dengan PKI baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Perlawanan NU terhadap PKI dilakukan di semua kegiatan politik PKI. PKI menggerakkan Pemuda Rakyat (PR), NU mengorganisasi Pemuda Ansor menjadi Barisan Ansor Serbaguna

¹⁴Anton E Lucas, *One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah dalam Revolusi Indonesia*, (Yogyakarta: Resist Book, 2004), hlm. 12.

¹⁵Perolehan suara NU per Kabupaten Pekalongan 100.000-150.000 lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 205.

¹⁶Arbi Sanit, *op.cit.*, hlm. 249.

(Banser) yang lebih militan. PKI menggerakkan Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra), NU mengaktifkan Lembaga Seni Budaya Muslim (Lesbumi)¹⁷. PKI memperluas pengaruhnya melalui Barisan Tani Indonesia (BTI), NU menghimpun para petani dalam Persatuan Tani Nahdlatul Ulama (Pertanu) untuk membendunginya. PKI mengerakkan organisasi buruh di berbagai bidang profesi dengan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) sebagai wadah induknya, NU memiliki Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) untuk membendunginya. PKI menyanyikan lagu *genjer-genjer* yang penuh hasutan dan sindiran, NU mengobarkan sholawat badar¹⁸.

Pucuk pimpinan Ansor juga menginstruksikan untuk terus mengadakan kontak dengan pimpinan, atasan dan dengan alat negara. Sejak 3 Oktober 1965, Ansor secara resmi meminta anggotanya untuk membantu pihak ABRI memulihkan keamanan dan menjaga keutuhan bangsa serta menyelamatkan revolusi di bawah pimpinan Soekarno.

Pada bulan Oktober 1965, kelompok-kelompok pemuda anti-komunis di Pekalongan yang kebanyakan berasal dari organisasi-organisasi Islam mulai

¹⁷*Lesbumi* merupakan wahana pembinaan bagi seniman dan budayawan muslim yang tersebar di seantero tanah air. Dalam perkembangannya, Lesbumi menjadi lawan yang tangguh bagi Lekra yang mencoba memperalat kebudayaan untuk menyusupkan ideologi komunis. Lihat H. Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *ANTOLOGI NU: Sejarah-Istilah-Aamaliah-Uswah Buku I*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 75-76.

¹⁸Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Sala: Jatavu, 1985), hlm. 237.

melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang diduga menjadi simpatisan PKI sampai ke akar-akarnya dengan bersama pasukan gabungan ABRI terdiri dari anggota kodim pasukan Jon/para Mobrik/Printis, dan dibantu oleh hansip tetap mengadakan pembersihan dengan oprasi sapu lidi¹⁹. Dalam penangkapan orang-orang PKI, Rinto Tri Hasworo menetapkan empat bentuk tindakan yang menjadi pola umum. *Pertama*: Penangkapan yang langsung dilakukan oleh petugas, baik dari unsur militer maupun kepolisian, *Kedua*: Penangkapan dengan menggunakan massa partai atau ormas yang secara politik dan idiologi bertentangan dengan partai atau ormas PKI, *Ketiga*: Penangkapan dengan menggunakan massa dari berbagai unsur ditambah unsur polisi dan militer, serta unsur pertahanan sipil, dan *Keempat*: Penangkapan dengan mengundang atau memanggil orang untuk datang atau berkumpul ditempat tertentu²⁰.

Dalam proses penumpasan unsur-unsur komunis di Pekalongan, para pemimpin PKI ditangkap dan menjalani perlakuan diskriminatif salah satunya adalah wajib lapor yang dilaksanakan di koramil Pekalongan Timur dan di kodim 0710 Pekalongan. Dampaknya, secara politik kaum agama terutama NU semakin dominan sedangkan orang-orang PKI semakin terpuruk. NU dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor meningkatkan kewaspadaan dalam hal keamanan, mengadakan

¹⁹Arsip, Surat dari Komando Resor Militer 071 Widjajakusuma Komando Distrik Militer 0710 tanggal 30 Desember 1965, yang berisi tentang laporan situasi daerah Komando Distrik Militer 0710 Pekalongan. Lihat lampiran 7, hlm. 112.

²⁰Rinto Tri Hasworo, *Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa Tengah setelah G-30-S*, dalam John Roosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid, *Tahun yang Tak Pernah Berakhir. Memahami Pengalaman Korban 65. Esai-esai Sejarah Lisan*, (Jakarta: ELSAM, Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2004), hlm. 56-58.

perbaikan dalam bidang spiritual masyarakat Kota Pekalongan dengan mengadakan pengajian-pengajian di berbagai daerah di wilayah Kota Pekalongan agar meningkatkan keimanan dan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan.

F. Historiografi yang Relevan

Sejarah konvensional (*accepted history*) merupakan karya yang terdiri dari unsur intisari fakta-fakta dan ekspresi pandangan pribadi para ahli sejarah yang tidak bisa diabaikan. Penulisan sejarah kritis tidak terlepas dari kajian teori dan historiografi yang relevan. Penggunaan kajian pustaka dan historiografi yang relevan merupakan tahapan yang pokok dalam penulisan karya sejarah. Historiografi adalah sebuah rekonstruksi sejarah melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman peninggalan masa lampau²¹. Penyajian suatu rekonstruksi peristiwa masa lalu memerlukan sumber sebagai modal dasar terciptanya sebuah karya tulis. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan historiografi yang relevan yang dapat menunjang keakuratan data sebagai berikut.

Dari beberapa sumber yang ditemukan penulis, skripsi Dewi Puji Lestari Pendidikan Sejarah FISE UNY, berjudul ``Peranan Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam operasi Pembersihan PKI di Ceper, Klaten Tahun 1965``, merupakan historiografi yang paling dekat dengan topik skripsi ini. Skripsi “Peranan Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam operasi Pembersihan PKI di Ceper, Klaten Tahun 1965” membahas situasi dan kondisi secara umum Ceper tahun 1965 dijelaskan

²¹Louis Gottschalk, ``*Underestanding History*`, a.b Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 32.

pula aksi-aksi PKI di Ceper dan peranan GP Ansor Ceper dalam menumpas PKI. Skripsi ini mengambil lingkup yang lebih kecil, yaitu Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Penumpasan PKI di Pekalongan tahun 1965-1966. Skripsi ini membahas kondisi wilayah di Kota Pekalongan, sejarah lahirnya GP Ansor Pekalongan dan peran GP Ansor dalam penumpasan PKI sampai pada dampak penumpasan PKI di Pekalongan.

Skripsi Slamet Jubaidi Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab UIN SUNAN KALIJAGA, berjudul ``Peranan GP Ansor Dalam Penumpasan PKI Di Ngawi Jawa Timur (1965-1966)``. Skripsi ini membahas situasi dan kondisi secara umum Ngawi tahun 1965 dijelaskan aksi-aksi PKI di Ngawi dan peranan GP Ansor Ngawi dalam menumpas PKI. Skripsi ini mengambil lingkup yang lebih kecil, yaitu Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Penumpasan PKI di Pekalongan tahun 1965-1966. Skripsi ini membahas kondisi wilayah di Kota Pekalongan, sejarah lahirnya GP Ansor Pekalongan dan peran GP Ansor dalam penumpasan PKI sampai pada dampak penumpasan PKI di Pekalongan.

Skripsi Dwi Indistuti pendidikan sejarah FISE UNY, berjudul ``penumpasan PKI di Desa Lanjaran, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali tahun 1965--1979``. Skripsi ini membahas perkembangan PKI di Desa Lanjaran, aksi sepihak PKI di Kecamatan Musuk, penumpasan PKI sampai pada dampak penumpasan PKI di Desa Lanjaran. Skripsi ini mengambil lingkup lebih kecil yaitu Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Penumpasan PKI di Pekalongan tahun 1965-1966. Skripsi ini membahas kondisi wilayah di Kota Pekalongan,

sejarah lahirnya GP Ansor Pekalongan dan peran GP Ansor dalam penumpasan PKI sampai pada dampak penumpasan PKI di Pekalongan.

Skripsi Kuncoro Hadi ilmu sejarah FISE UNY, berjudul ``Penghancuran PKI (Studi Tentang Aksi Kekerasan di Jogonalan Klaten Tahun 1965-1971) ``. Skripsi ini membahas perkembangan PKI di Jogonalan, aksi sepihak PKI di Jogonalan, penumpasan PKI sampai pada dampak penumpasan PKI di Jogonalan. Skripsi ini mengambil lingkup lebih kecil yaitu Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Penumpasan PKI di Pekalongan tahun 1965-1966. Skripsi ini membahas kondisi wilayah di Kota Pekalongan, sejarah lahirnya GP Ansor Pekalongan dan peran GP Ansor dalam penumpasan PKI sampai pada dampak penumpasan PKI di Pekalongan.

G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Sejarah sebagai disiplin ilmu mempunyai metode tersendiri dalam mengungkapkan peristiwa sejarah masa lampau agar menghasilkan karya sejarah yang kritis, ilmiah, dan objektif²². Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman dan peninggalan masa lampau²³. Sejarah juga terikat pada penalaran yang bersandar pada fakta atau kebenaran

²²Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 33-34.

²³Louis Gottschalk, *loc.cit.*

sejarah terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan ia akan mengungkap sejarah secara objektif.

Berkaitan dengan penyelidikan, pemahaman dan penjelasan peristiwa sejarah masa lampau. Metode penulisan sejarah yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode sejarah kritis yang merupakan metode penulisan sejarah dengan menggunakan tahap-tahap dalam penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan yaitu mengungkap secara objektif. Mengerjakan sejarah lokal menuntut kemampuan teknis dan daya analisis yang tinggi²⁴.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian historis. Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegaskan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat²⁵. Metode historis merupakan suatu penyelidikan untuk mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dan prespektif historis suatu masalah²⁶.

Skripsi ini menggunakan tahapan-tahapan penulisan sejarah sesuai yang dikemukakan Nugroho Notosusanto sebagai berikut.

1. Heuristik (Pengumpulan sumber)

Heuristik berasal dari bahasa Yunani: *heuriskein* yang berarti memperoleh atau menemukan. Merupakan kegiatan mengumpulkan jejak masa lampau

²⁴Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979), hlm. 20.

²⁵Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 16.

²⁶Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 123.

yang dipakai sebagai data sejarah. Dengan kata lain, heuristik mempunyai pengertian pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah baik sumber tulisan maupun lisan ataupun pustaka. Sumber sejarah disebut juga sebagai data sejarah. Jadi, heuristik dapat diartikan juga sebagai upaya mencari, menentukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah haruslah sesuai dengan sejarah yang dikaji.

Pengumpulan sumber dilakukan melalui wawancara lisan dengan 4 saksi peristiwa, pengumpulan dokumen pribadi milik negara, penelusuran pustaka berupa buku-buku dari berbagai perpustakaan, yakni Perpustakaan Pusat UNY, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNY, Perpustakaan Jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNY, Perpustakaan Kolose Santo Ignatius Yogyakarta, Perpustakaan Provinsi DIY, Perpustakaan Pusat UNS, Perpustakaan FIB UGM. Sumber-sumber sejarah, yang merupakan dasar tercapainya sebuah historiografi, menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut.

a. Sumber Primer

Sumber primer dapat diperoleh dari kesaksian secara langsung oleh seseorang yang menyaksikan peristiwa sejarah itu. Selain itu sumber primer berarti sebagai kesaksian dari seseorang saksi mata kepala sendiri atau alat mekanis yang hadir pada peristiwa yang diceritakan, kemudian disebut sebagai saksi pandang mata atau benar-benar mengalami dan

menyaksikan suatu peristiwa sejarah²⁷. Sebuah sumber primer haruslah sejaman dengan terjadinya peristiwa, adapun narasumber yang diperoleh:

NO	NAMA	ALAMAT	UMUR	JABATAN
1	H. Mahmud maskur	Kauman Gang 10.32 Jl. Wahid Hasyim	71 Tahun	Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor 1965
2	H. Nurzen tho`at	Jl. Raya Kranji No.11 Kedungwuni	70 Tahun	Anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor 1965
3	Ngisam kholil	Podosugih, Pekalongan	68 Tahun	Anggota Rohis NU
4	Abdul halim	Slambaran, Pekalongan	73 Tahun	Anggota ABRI
5	H. Mostofa bakri	Jenggot, Pekalongan	77 Tahun	Ketua NU 1965
6	Shohid aldin	Buaran Pekalongan	67 Tahun	Anggota Rohis NU
7	Suharto	Kraton, Pekalongan	66 Tahun	Anggota IPPI
8	Subadi	Podosugih, Pekalongan	70 Tahun	Anggota PNI
9	Suhartono	Jl. Mulia, Pekalongan	90 Tahun	Anggota ABRI
10	Zailani	Jl. Pembangunan, Pekalongan	68 Tahun	Warga asli Pekalongan

²⁷Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 16.

Penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini menggunakan metode historis dengan menjadikan sumber lisan sebagai sumber utama dalam penggalan fakta-fakta sejarah. Adapun arsip yang digunakan penulis dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut.

Arsip dari Perpustakaan dan Kearsipan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Surat Instruksi PW GP Ansor Jawa Tengah tanggal 18 Oktober 1964 kepada PC GP Ansor se-Jawa Tengah untuk secara aktif memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga yang terganggu oleh organisasi buruh tani Indonesia tahun 1964.

Surat laporan tanggal 29 Oktober 1965 dari GP Ansor Kotapraja Pekalongan kepada PP GP Ansor tentang peristiwa pengganyangan G-30-S/PKI.

Arsip dari Museum Mandala Bakti Kodam IV/Diponegoro

Surat dari Komando Resor Militer 071 Widjajakusuma Komando Distrik Militer 0710 tanggal 30 Desember 1965, yang berisi tentang laporan situasi daerah Komando Distrik Militer 0710 Pekalongan.

Arsip dari Kantor Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah

Surat Keputusan PD/PRT Gerakan Pemuda (GP) Ansor tahun 1968.

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Djawa Tengah, daftar laporan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Djawa Tengah 1969.

b. Sumber Sekunder

Sumber yang diperoleh melalui kesaksian seseorang yang tidak hadir dalam peristiwa sejarah yang dikisahkan. Menurut Louis Gottschlak sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang bukan merupakan saksi pandang mata²⁸. Berdasarkan keterangan diatas, maka sumber

²⁸ Louis Gottschlak, *op.cit.*, hlm. 35.

sekunder berupa buku-buku yang digunakan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut.

Feillard Andree, *Islam et Armee Dans L'indonesie Contemporaine Les Pionniers de la Tradition*, a.b. Lesmana, *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Anton E Lucas, *One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah dalam Revolusi Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2004.

Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdatul Ulama*, Sala: Jatavu, 1985.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Merupakan kegiatan meneliti atau menganalisa sumber untuk menentukan validitas dan kredibilitas sumber-sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan. Sumber yang telah diperoleh tadi dikritik secara ekstern dan intern. Kritik ekstern adalah mengkaji sumber sejarah dari luar, mengenai keaslian dari kertas yang dipakai, ejaan, gaya tulisan, dan semua penampilan luarnya untuk mengetahui autentitasnya serta melihat kondisi kesehatan dan usia para pelaku peristiwa yang layak untuk diwawancarai²⁹. Kritik intern adalah penilaian terhadap sumber sejarah dari isi sumber dokumen tersebut, maka keaslian dokumen dianalisis berdasarkan isinya. Verifikasi sangat diperlukan dalam penulisan sejarah karena semakin kritis dalam menilai sesuatu sumber maka semakin autentik penilaian sejarah yang dilakukan. Kritik internal bertujuan

²⁹Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm. 101.

mendapat kesaksian yang dapat diandalkan, maka ada dua cara yang ditempuh, pertama, mengetahui apa arti sesungguhnya yang dikemukakan, ditulis, atau dikatakan pelaku atau saksi. Kedua, hal ini sering terjadi ketika pelaku atau saksi menggunakan kata-kata kiasan dalam penyampaian verbal atau lisan³⁰. Korelasi antara kedua sumber tersebut kemudian ditarik sebagai fakta sejarah yang digunakan sebagai langkah dalam penulisan sejarah. Tahap ini sangat menentukan langkah selanjutnya dalam tahapan interpretasi.

3. Interpretasi

Merupakan kegiatan penelitian untuk menghubungkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh setelah melalui kritik baik intern dan ekstern. Pada tahap ini berbagai fakta yang lepas satu sama lain dirangkum dan dihubung-hubungkan serta menjadi kesatuan yang harmonis serta masuk akal. Peristiwa yang satu dimasukkan ke dalam keseluruhan konteks peristiwa-peristiwa lain yang melingkupinya³¹. Walaupun demikian sesungguhnya tidak semua fakta yang relevan dapat dimasukkan, maka diperlukan penyesuaian terhadap fakta yang relevan dan yang tidak serta diusahakan tetap objektif. Hasil interpretasi dan sintesis ini akhirnya

³⁰Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 85-119.

³¹Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma dalam Pemikiran dan Penulisan Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1988), hal. 17.

disajikan menjadi suatu karya sejarah yang diharapkan dapat bersifat objektif.

4. Historiografi

Merupakan penyampaian atau laporan hasil penelitian sejarah setelah melalui tahapan-tahapan di atas dalam bentuk karya sejarah. Kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau dapat dilakukan dengan heuristik literatur, yang tidak berbeda hakikatnya dengan kegiatan bibliografis yang lain, sejauh menyangkut buku-buku tercetak³². Tahap ini merupakan tahap terakhir bagi penulis untuk menyajikan semua fakta dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul *Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Penumpasan PKI di Pekalongan tahun 1965-1966*.

2. Pendekatan Penelitian

Setiap peristiwa sejarah mengandung berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Penelaahan yang dilakukan terhadap suatu peristiwa atau penyajian pokok memerlukan berbagai segi peninjauan. Hal ini dimaksudkan agar gambaran yang dihasilkan menjadi lebih bulat dan menyeluruh sehingga dapat dihindari kesepihakan atau determinisme³³. Untuk

³²Luois Gottschalk, *loc.cit.*

³³Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 87.

memperjelas permasalahan yang terjadi, maka pembahasan dalam skripsi ini menitikberatkan pada pendekatan ekonomi, pendekatan politik, pendekatan sosiologi, pendekatan agama, dan pendekatan militer.

Pendekatan ekonomi adalah penjabaran dari konsep-konsep ekonomi pola distribusi, alokasi produksi, dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial dan stratifikasinya yang dapat mengungkapkan peristiwa atau fakta dalam kehidupan ekonomi, sehingga dapat dipastikan hukum dan kaidahnya³⁴. Pekalongan merupakan salah satu wilayah yang mata pencaharian utama penduduknya pengrajin batik terdapat di daerah Pekajangan, Pesindon, Kauman, dan Medono masuk Kelurahan Sampangan. Penduduk Pekalongan juga bermata pencaharian sebagai nelayan di Jl. WR Supratman di Kelurahan Krapyak Lor yang berada dekat dengan pelabuhan Pekalongan dan lahan pertanian berada Kelurahan Podosugih.

Tinjauan politik menurut Sartono Kartodirdjo adalah tinjauan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan sebagainya³⁵. Politik menurut Deliar Noer adalah segala usaha, tindakan, atau suatu kegiatan manusia dalam kaitannya dengan kekuasaan suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat³⁶.

³⁴Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1966), hlm. 33.

³⁵Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 4.

³⁶Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik Jilid I*, (Medan: Dwipa, 1965), hlm. 9.

Ilmu politik adalah ilmu yang menyelidiki penyusunan kekuasaan-kekuasaan serta penggunaan kekuasaan itu³⁷. Ilmu politik biasanya menyoroti tentang kontrol sosial, negara, kekuasaan, legitimasi otoritas kepentingan kelompok, sosialisasi politik, kebudayaan politik, sistem politik.

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa politik adalah tindakan atau kegiatan dalam suatu sistem politik yang meliputi proses perumusan tujuan dasar sistem dan tujuan pengambilan serta penyusunan dengan skala prioritas yang telah dipilih³⁸. Rumusan lebih singkat dikemukakan oleh Soelistyawati Ismail, politik adalah suatu usaha untuk mencapai cita-cita atau ideologi³⁹.

Tinjauan politik dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam kebijakan politik yang mempunyai kaitan dengan adanya kekuasaan ataupun kepemimpinan serta hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan politik. Pendekatan politik digunakan untuk dapat menjelaskan proses polarisasi kekuatan politik, tindakan-tindakan politik, rivalisasi kekuatan-kekuatan politik serta yang utama adalah untuk menganalisis struktur politik di Wilayah Pekalongan tahun 1965-1966 bahkan kurun waktu sebelumnya.

³⁷Roeslan Abdulgani, *Penggunaan Ilmu Sejarah*, (Bandung: Penerbit Prapantja, 1963), hlm. 18.

³⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 12.

³⁹Soelistyawati Ismail, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 12.

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang mementingkan peran dan faktor sosial dalam menjalankan peristiwa masa lalu. Pendekatan secara sosiologi bertujuan untuk meneropong segi sosial peristiwa yang dikaji⁴⁰. Pendekatan sosiologi sudah tentu akan meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, baik unsur golongan sosial, nilai-nilai sosial maupun interaksi yang berlangsung di dalamnya. Pendekatan sosiologi dalam skripsi ini digunakan untuk menganalisis keadaan sosial, struktur sosial masyarakat Kota Pekalongan sebelum dan sesudah penumpasan PKI tahun 1965-1966.

Pendekatan agama jelas sangat diperlukan mengingat objek penelitian yang diungkap berkaitan erat dengan masalah keagamaan terutama yang berhubungan dengan Pemuda Ansor dan peranannya sebagai Banser NU dalam upaya membantu membersihkan PKI di Pekalongan tahun 1965.

Nugroho Notosusanto menyatakan bahwa pendekatan militer digunakan untuk menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi karena adanya suatu kekerasan dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pihak penguasa terhadap rakyat yang dikuasai. Pendekatan militer dimaksudkan untuk memahami adanya sekelompok orang yang diorganisasikan dengan disiplin militer bertujuan untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan ideologi memelihara eksistensi negara⁴¹. Pendekatan militer diperlukan dalam skripsi ini

⁴⁰Sartono Kartodirdjo, *loc.cit.*

⁴¹Nugroho Notosusanto, *Sejarah dan Hankam*, (Jakarta: Dephankam, 1979), hlm. 30.

karena dapat membantu untuk menerangkan dan menggambarkan keterlibatan militer dari Kodim 0710 Pekalongan, Koramil, Kepolisian, golongan antikomunis serta RPKAD pada awalnya dalam mengadakan penumpasan PKI Di Kota Pekalongan.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode penelitian dan pendekatan penelitian, serta sistematika pembahasan yang berfungsi untuk memudahkan memahami alur pembahasan.

BAB II. KONDISI UMUM WILAYAH PEKALONGAN SEBELUM TAHUN 1965

Bab ini membahas keadaan geografis Pekalongan yang sangat strategis di pesisir utara laut jawa, demografis, kehidupan sosial ekonomi, dan politik masyarakat Pekalongan sehingga dapat dilihat gambaran bagaimana situasi masyarakat Pekalongan sebelum tahun 1965.

BAB III. GERAKAN PEMUDA (GP) ANSOR DI PEKALONGAN TAHUN 1965

Bab ini membahas mengenai proses berdirinya Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Pekalongan dan bagaimana kegiatan Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Pekalongan, pertentangan Banser dengan PKI.

BAB IV. GERAKAN PEMUDA (GP) ANSOR DALAM PENUMPASAN PKI DI PEKALONGAN TAHUN 1965

Bab ini membahas mengenai apa saja usaha Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Penumpasan PKI di Pekalongan yang melakukan koordinasi dengan ABRI, penggalangan persatuan umat beragama, dan berkerjasama dengan masyarakat. Membahas mengenai dampak setelah penumpasan PKI bagi NU, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Masyarakat, dan Partai lain.

BAB V. KESIMPULAN

Bab ini merupakan jawaban dari masalah yang diajukan dalam rumusan masalah pada bab 1 dari penulisan skripsi ini.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH PEKALONGAN SEBELUM TAHUN 1965

A. Keadaan Geografis dan Demografi

Pekalongan muncul dari ketaatan Bupati Pekalongan Baurekso yang juga merupakan salah seorang panglima Kerajaan Mataram ketika mendapat perintah dari Sultan Agung untuk menyerang Batavia tahun 1628, kemudian Baurekso mempersiapkan mental maupun fisik yaitu bertapa seperti kalong atau kelelawar di hutan Gambiran. Pada saat bertapa Ki Baurekso digoda dan diganggu prajurit siluman utusan Dewi Lanjar yang dianggap sebagai penguasa pantai utara, namun utusan Dewi Lanjar itu tidak mampu menggagalkan tekad Ki Baurekso bahkan Dewi Lanjar dapat dipersuntingnya. Oleh keberhasilan dalam bertapa ngalong inilah tempat itu kemudian dinamakan Pekalongan¹. Selain itu ada yang mengatakan bahwa sebutan Pekalongan berasal kata *ampek* dan *along* dari bahasa Jawa. *Ampek* berarti mencari dan *along* berarti banyak, istilah ini digunakan untuk melihat keadaan geografis Pekalongan yang merupakan kota pantai yang kaya akan hasil ikan.

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan memiliki luas wilayah kurang lebih 836,12 km². Kabupaten Pekalongan terletak antara 109° 49' BT-109° 73' BT dan 6° 33' LS-7° 23' LS. Kajan, ibu kota Kabupaten Pekalongan berada di bagian tengah-tengah wilayah kabupaten, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan meliputi 16 kecamatan dan terdiri dari 237 desa dan 14 kalurahan.

¹Tim, *Kerusuhan di Pekalongan Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004), hlm. 9.

Kecamatan Kandangserang terdiri 14 desa, Kecamatan Paninggaran terdiri 15 desa, Kecamatan Lebak barang terdiri 11 desa, Kecamatan Petungkriyono terdiri 9 desa, Kecamatan Talun terdiri 10 desa, Kecamatan Doro terdiri 14 desa, Kecamatan Karanganyar terdiri 15 desa, Kecamatan Kajen terdiri 24 desa, Kecamatan Kesesi terdiri 23 desa, Kecamatan Sragi terdiri 16 desa, Kecamatan Bojong 22 desa, Kecamatan Wonopringgo terdiri 14 desa, Kecamatan Kedungwuni terdiri 16 desa, Kecamatan Buaran terdiri 7 desa, Kecamatan Tirta terdiri 16 desa, Kecamatan Wiradesa terdiri 11 desa². Di sebelah utara, Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan laut Jawa dan Kodya Pekalongan. Wilayah Kabupaten Batang merupakan batas sebelah timur Kabupaten Pekalongan. Sebelah selatan kabupaten ini berbatasan dengan wilayah pembantu Gubernur Banyumas dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pemalang³.

Topografi Kabupaten Pekalongan yaitu dataran tinggi terletak dibagian tengah dan pegunungan terletak dibagian selatan daerah ini yang terdiri dari bukit-bukit yang membujur dari barat sampai timur. Penggunaan tanah di Kabupaten Pekalongan sawah 34.340,04 ha; ladang atau tanah yang ditanami tanpa air 12.540,48 ha; tegalan 14.092,78 ha; tanah perkebunan 1.842,33 ha; hutan 18.458,38 ha; dan bukit, gunung, air rawa, sungai 2.519,99 ha.

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di tunjang infrastuktur yang cukup memadai seperti jalan-jalan untuk ke kota yang beraspal dibangunnya

²<http://www.Pekalongankab.go.id>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2011.

³Tim, *Kabupaten Pekalongan dalam Angka 1974*, (Kantor Statistik Kabupaten Dati II Pekalongan, 1974), hlm.1.

jembatan untuk penghubung Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Pemalang, jalan-jalan lintas kecamatan, kelurahan, dan desa juga sudah di aspal. Dengan alat transportasi yang cukup memadai seperti truk, sepeda, mobil, dan dokar.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan latusal coklat di Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Panigoro, dan Kecamatan Doro; Aluvial kelabu tua di Kecamatan Sragi dan Kecamatan Kedungwuni; Komplek gramosal mediteran di Kecamatan Kandangserang; As latusal coklat di Kecamatan Panigaran, Kecamatan Doro, Kecamatan Karangayar, Kecamatan Kajen, Kecamatan Karesi, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni; As aluvial kelabu di Kecamatan Sragi, Kecamatan Kajen, Kecamatan Kasesi, Kecamatan Bojong, Kecamatan Buaran, Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa; Aluvial hidromof di Kecamatan Sragi, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Tirto; Komplek latosal merah di Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Panigaran; Kekuning-kuningan dan latosal coklat di Kecamatan Lebakbarang, dan Kecamatan Petungkriyono; dan As adlosal coklat di Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Lebak barang, Kecamatan Petungkriyono⁴.

Jarak dari ibu kota Kabupaten Dati II Pekalongan ke ibu kota Kabupaten tingkat II Batang 7 Km, ibu kota Kabupaten tingkat II Pemalang 35 km, ibu kota Kabupaten tingkat II Tegal 80 km, ibu kota Kabupaten tingkat II Brebes 78 km, ibu kota Kotamadya tingkat II Tegal 65 km, dan ibu kota Kotamadya tingkat II Pekalongan 0 km.

⁴*Ibid.*

Pada Pertengahan abad XIX kalangan kaum liberal Belanda muncul pemikiran etis, selanjutnya dikenal sebagai politik Etis yang menyerukan Program Desentralisasi Kekuasaan Administratif yang memberikan hak otonomi kepada setiap Karesidenan (*Gewest*) dan Kota Besar (*Gemeentee*) serta pembentukan dewan-dewan daerah di wilayah administratif tersebut. Pemikiran kaum liberal ini ditanggapi oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dengan dikeluarkannya Staatblaad Nomor 329 Tahun 1903 yang menjadi dasar hukum pemberian hak otonomi kepada residensi (*gewest*) untuk Kota Pekalongan, hal otonomi ini diatur dalam Staatblaad Nomor 124 tahun 1906 tanggal 1 April 1906 tentang *Decentralisatie Afzondering van Gemiddelan voor de Hoofdplaats Pekalongan ult de Algemene Geldmiddelan van Nederlandsch Indie Instelling van een Gemeenteraad de dier Plaats* yang berlaku sejak tanggal ditetapkan⁵. Pada tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menandatangani penyerahan kekuasaan kepada tentara Jepang, Jepang menghapus keberadaan dewan-dewan daerah, sedangkan Kabupaten dan Kotamadya diteruskan dan hanya menjalankan pemerintahan dekonsentrasi.

Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh dwitunggal Soekarno-Hatta di Jakarta, ditindaklanjuti rakyat Pekalongan dengan mengangkat senjata untuk merebut markas Tentara Jepang pada tanggal 3 Oktober 1945. Perjuangan ini berhasil, sehingga pada tanggal 7 Oktober 1945 Pekalongan bebas dari Tentara Jepang.

⁵<http://www.pekalongankota.go.id/>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2011.

Secara yuridis formal, Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kota besar dalam lingkungan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka Pekalongan berubah menjadi Kotamadya Dati II Pekalongan. Terbitnya PP Nomor 21 Tahun 1988 tanggal 5 Desember 1989 dan ditindaklanjuti dengan Inmendagri Nomor 3 Tahun 1989 merubah batas wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan sehingga luas wilayahnya berubah dari 1.755 Ha menjadi 4.465,24 Ha dan terdiri dari 4 kecamatan, 22 desa dan 24 kelurahan. Sejalan dengan era reformasi yang menuntut adanya reformasi di segala bidang, diterbitkan PP Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 32 Tahun 2004 yang mengubah sebutan Kotamadya Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Jawa. Kota Pekalongan tidak lepas dari pengaruh letak kota yang strategis yaitu di pesisir utara pantai Jawa. Kota Pekalongan memiliki letak geografis sebagai berikut 6° - 11° LS dan 109° - 110° BT, dengan koordinat *infratif* 510.000-518.000 km² membujur, 517.875-526.75 km² melintang, dengan ketinggian 1 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2189 mm/tahun sangat cocok untuk pertanian tanah kering, perkebunan, dan areal persawahan⁶. Topografi Kota Pekalongan merupakan daerah dataran rendah yang dekat dengan pantai, musim

⁶Tim, *Kotamadya Pekalongan dalam Angka 1981*, (Kantor Statistik Kodya Pemerintah Dati II Pekalongan, 1981), hlm. 2.

kemarau pada bulan April-Oktober musim penghujan Oktober-April, angin musim timur biasanya pada bulan april-oktober dan angin musim barat pada bulan Oktober-April, udara di Kota Pekalongan pada siang hari terasa panas (angin laut) dan pada malam hari terasa agak dingin (angin darat), dan pada bulan Agustus-Februari arus laut sangat kuat dan bergelombang besar.

Keadaan tanah di Kota Pekalongan berwarna agak kelabu, dengan jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial hohidromorf. Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 17,55 km², dengan 32,52% tanah sawah dan 67,48% tanah kering dalam hal ini tanah sawah berkurang 0,88% yang disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan kebutuhan akan perumahan meningkat yang berdampak berkurangnya luas tanah pertanian. Adapun batas administrasi yang membatasi Kota Pekalongan dengan wilayah sekitarnya adalah:

- Bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan
- Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, dan
- Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Kota Pekalongan terdiri dari dua kecamatan yang meliputi 22 kalurahan yang semuanya merupakan desa swasembada⁷. Adapun luas daerah tiap Kecamatan sebagai berikut:

⁷Sebelum ada keputusan pemerintah Nomor 21 tahun 1988 dan intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1989 wilayah Kota Pekalongan terdiri dari 2 kecamatan dengan 22 kalurahan kemudian setelah ada keputusan pemerintah tersebut wilayah Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dengan 46 kalurahan, lihat, Nasrudin Hars, dkk, *Profil Provinsi Republik Indonesia "Jawa Tengah"*, (Jakarta: PT Intermasa, 1992), hlm. 150-151.

- a. Kecamatan Pekalongan Barat dengan luas daerah 10,05 km² terdiri dari 13 kalurahan meliputi: Pajang Wetan, Kandang Pajang, Dukuh, Kraton Lor, Kraton Kidul, Kramat Sari, Bendan, Medono, Kebulen, Sapuro, Podosugih, Kargon.
- b. Kecamatan Pekalongan Timur dengan luas daerah 9,52 km² terdiri dari 10 kalurahan meliputi: Krapyak Lor, Krapyak Kidul, Klego, Landungsari, Noyotaan, Keputran, Kauman, Sampangan, Sugih Waras, Poncol.

Penduduk di suatu wilayah sangat terkait dengan potensi wilayah, hal tersebut terlihat di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan termasuk berpenduduk padat. Hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas perekonomian dan industri. Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 1961 diperkirakan mencapai 100.498 jiwa.

Ditinjau dari jenis kelamin, jumlah wanita di Kota Pekalongan lebih besar dari pada laki-laki. Pada tahun 1961 rasio penduduk Kota Pekalongan sebesar 97%, dengan jumlah penduduk laki-laki 48.851 jiwa dan jumlah penduduk wanita 51.647 jiwa.

Ditinjau dari kepadatan penduduk, Kota Pekalongan masih tergolong relatif padat pada tahun 1961. Penduduk Pekalongan lebih banyak di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dibanding dengan Kecamatan Pekalongan Timur. Jumlah Penduduk Kecamatan Pekalongan Barat yang tersebar di 12 Kalurahan sekitar 52.502 jiwa, yang terdiri atas 26.105 laki-laki dan 26.397 perempuan⁸.

⁸Sensus Penduduk 1961, *Penduduk Desa Jawa Buku II Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Pusat Penelitian Dan Studi Kependudukan UGM dan BPS, 1980), hlm. 162-163.

Tabel 1

Jumlah Penduduk Kota Praja Pekalongan menurut Tempat Tinggal Kecamatan Pekalongan Barat Tahun 1961

No	Kecamatan Pekalongan Barat	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pajang Wetan	4.021	3.317	7.338
2	Kandang Pajang	2.648	2.744	5.392
3	Dukuh	1.529	1.739	3.268
4	Medono	1.995	1.932	3.927
5	Kebulen	1.100	1.132	2.232
6	Sapuro	1.295	1.277	2.572
7	Podosugih	2.324	2.464	4.788
8	Kergon	2.768	2.990	5.758
9	Bendan	3.682	3.766	7.448
10	Kraton Lor	1.536	1.661	3.197
11	Kramatsari	1.566	1.568	3.134
12	Kraton Kidul	1.080	1.247	2.327
JUMLAH		26.105	26.397	52.502

Sumber: Sensus Penduduk 1961 Penduduk Desa Jawa, Buku II Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM dan BPS, 1980, hlm. 162-163.

Tabel 2

Jumlah Penduduk Kota Praja Pekalongan menurut Tempat Tinggal Kecamatan Pekalongan Timur Tahun 1961

No	Kecamatan Pekalongan Timur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Landungsari	2.025	1.999	4.024
2	Noyontaan	2.825	3.061	5.886
3	Keputran	2.225	2.382	4.607
4	Kauman	1.218	1.326	2.544
5	Sampangan	2.782	3.152	5.934
6	Sugihwaras	2.692	3.300	5.992
7	Poncol	295	3.201	6.126
8	Klego	2.571	3.073	5.644
9	Krapyak Lor	1.840	1.944	3.784
10	Krapyak Kidul	1.643	1.812	3.455
JUMLAH		22.746	25.250	47.996

Sumber: Sensus Penduduk 1961 Penduduk Desa Jawa, Buku II Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM dan BPS, 1980, hlm. 162-163.

B. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Kota Pekalongan sebagian besar adalah pengrajin batik. Terdapat banyak industri-industri batik yang berkembang baik industri besar, sedang, maupun kecil terdapat di daerah Pekajangan, Pesindon, Kauman, dan Medono. Penduduk Pekalongan adalah pribumi Jawa dan pendatang yaitu etnis Cina dan Arab. Mata pencaharian penduduk pribumi sebagai petani, nelayan, buruh, pegawai sipil, maupun ABRI. Sektor pertanian meliputi padi sawah, padi gogo, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai. Tidak sedikit dari mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan karena letak Kota Pekalongan itu sendiri di pesisir Pantai Utara Jawa. Para nelayan tersebut ada yang bekerja harian dan ada yang bekerja dengan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menangkap ikan, hasil perikanan di Pekalongan sangat besar karena adanya TPI di pelabuhan Kota Pekalongan yang terletak di Jl. WR Supratman termasuk Kelurahan Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Timur.

Untuk etnis Cina dan Arab sebagian besar mata pencahariannya pedagang batik, etnis Cina yang mendiami kampung Pecinan berada di sekitar Jalan Sultan Agung, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pintu Dalam, dan Jalan Haji Win; sedangkan etnis Arab yang biasa disebut dengan kampung Arab berada di komplek Saragenen, Jalan Patiunus, Jalan Kenanga, Jalan Surabaya, Jlamprang, dan Bandengan⁹. Etnis Cina dan etnis Arab yang menguasai perekonomian Kota Pekalongan kebanyakan mereka bergerak di bidang perdagangan terutama kain

⁹Tim, *op.cit.*, hlm. 11.

cita dan *malam*¹⁰, sedangkan etnis Jawa (Pribumi) kebanyakan menjadi buruh pembatik.

Kota Pekalongan lebih mengarah pada kota industri. Hal ini disebabkan lahan pertanian semakin sempit dan kesuburannya berkurang. Dalam rangka menuju kota industri, Pemerintah Daerah Pekalongan telah aktif membantu penyediaan tanah-tanah dan penyelesaian pemindahan hak tanah. Pemerintah telah berusaha memelihara iklim yang baik serta aman bagi pendirian dan pertumbuhan industri baik fisik maupun politis bagi industri kecil.

Pada tahun 1960 PKI membangun sebuah basis yang kuat di sebagian besar wilayah Kota Pekalongan, khususnya di Kelurahan Sampangan Kecamatan Pekalongan Timur yang terdapat banyak industri perbatikan¹¹. Di wilayah Sampangan terdapat banyak industri batik yang dikuasai oleh orang-orang Cina yang ber ideologi komunis. Para pekerjanya adalah orang-orang pribumi yang sebagian sebagai petani miskin dan petani penggarap yang tidak mempunyai tanah. Para pekerja atau buruh ini di iming-imingi akan diberi tanah yang subur bila, jika mengikuti ideologi komunis¹². PKI dan BTI besreta para pekerja berusaha menguasai tanah yang luas dan subur milik para tuan tanah, hingga

¹⁰Cita/Mori adalah Bahan baku batik yang terbuat dari kain, Malam adalah Bahan perintang warna dalam proses pembatikan.

¹¹Wawancara dengan Bapak Zailani warga asli Pekalongan, tanggal 13 Desember 2011.

¹²Wawancara dengan Bapak Subadi mantan anggota PNI, tanggal 13 Desember 2011.

mengakibatkan bentrokan dengan tuan-tuan tanah yang kebanyakan adalah orang-orang NU.

Masuknya partai politik telah memicu adanya pergeseran pandangan di kalangan petani. Partai politik sebagai organisasi massa berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh dukungan yang dijadikan basis dalam mencapai tujuan partai tersebut. Keadaan sosial kemasyarakatan di Pekalongan khususnya di Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Barat dalam kurun waktu 1950-an sampai 1960 sangatlah riskan. Hal ini disebabkan karena partai politik mengadakan kampanye pemilu 1955 sebagai perebutan politik dan masih menghargai kyai sebagai panutan¹³.

Pemilu 1955 merupakan gambaran persaingan partai-partai politik di Pekalongan karena banyak partai politik yang bersaing untuk menarik hati rakyat Pekalongan, sehingga kehidupan masyarakat Pekalongan mengalami Perubahan sosial yang berdasarkan kepentingan politik yang menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda faham¹⁴. Munculnya UU (Undang-Undang) *Landreform* merupakan sarana tepat bagi PKI untuk mendapat dukungan petani, dengan cara PKI menghasut para petani dengan iming-iming kelak akan diberi tanah untuk digarap. UU tersebut bertujuan mengganti UU Agraria peninggalan Kolonial Belanda dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan kemakmuran petani.

¹³Wawancara dengan Bapak Mostofa Bisri, Mantan ketua NU Pekalongan, tanggal 14 Desember 2011.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Subadi, Mantan anggota PNI, tanggal 13 Desember 2011.

Perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan tidak terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian tingkat pusat. Sekitar tahun 1960-an mengalami krisis yang berkepanjangan disertai dengan musim kemarau panjang yang mengakibatkan persediaan beras berkurang dan kegagalan panen di beberapa tempat keadaan perekonomian semakin suram, sistem ekonomi yang bersifat nasional demokratis tidak melaksanakan asas-asas demokrasi ekonomi. Kondisi ekonomi yang semakin parah ditambah dengan ketegangan politik yang memanas di ibu kota membawa dampak besar terhadap kondisi sosial politik di berbagai daerah. Sampai pada tahun 1965 pemerintah harus mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang setiap tahun semakin besar, akibat inflasi semakin meluas dan harga-harga barang semakin naik sekitar 500 persen dan menyebabkan rakyat kecil semakin menderita¹⁵. Kenaikan harga yang demikian tinggi dirasakan oleh petani di Pekalongan karena pemerintah menentukan setiap setengah kwintal padi seharga setengah meter tekstil¹⁶. Dampak ini sangat terasa terutama bagi petani tidak bertanah. Harga beras dari pemerintah hanya Rp 1.000,00 menjadi Rp 2.000,00. Kata Bapak Abdul Halim, mantan anggota ABRI, setiap keluarga hanya mendapat jatah beras 1 cangkir terkadang bercampur dengan kutu atau ulat¹⁷. Untuk mendapatkannya pun harus rela antri berjam-jam. Banyak beras yang

¹⁵Nugroho Notosusanto, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 325.

¹⁶Fajar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan Gagalnya Politik Radikalasi Petani*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000), hlm. 3.

¹⁷Wawancara dengan Bapak Abdul Halim, mantan Anggota ABRI, tanggal 14 juni 2011.

ditimbun oleh para saudagar Cina yang membuat rakyat semakin menderita¹⁸. Masalah tanah ini akan menjadi faktor yang menarik dalam kerangka politik paska diberlakukannya UU *Landreform* dan peranan PKI melalui organisasi massanya yaitu BTI dalam mengorganisasikan petani untuk melakukan gerakan aksi, yang dikenal dengan gerakan aksi sepihak yang dilakukan di Kelurahan Podosugih.

Mayoritas penduduk Pekalongan beragama Islam dan Kristen adalah agama minoritas, untuk agama Hindu-Budha sangatlah kecil. Clifford Geertz membagi struktur penduduk Jawa menjadi tiga bagian yaitu penduduk abangan, priayi, dan santri¹⁹. Di Jawa Tengah bagian Selatan, penduduk didominasi oleh kelompok abangan. Kaum petani Jawa termasuk golongan kaum abangan. Bentuk agama Islam orang Jawa disebut juga *agami jawi* atau *kejawen*²⁰. Golongan ini mengikuti tradisi pikiran kejawen yang pertama-tama diilhami oleh buah pikiran Jawa kuno dan Hindu Budha serta unsur-unsur tambahan dari Islam. Bisa dikatakan bahwa penduduk Kota Pekalongan pada tahun 1960-an hampir sebagian tidak ada yang benar-benar memeluk agama Islam secara sempurna²¹.

¹⁸Wawancara dengan Bapak Suhartono, Mantan anggota ABRI, tanggal 12 Desember 2011.

¹⁹Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Midas Surya Graffindo, 1989), hlm. 2.

²⁰Islam *kejawen* adalah suatu keyakinan dan konsep Hindu-Budha yang cenderung ke arah mistis, yang tercampur menjadi satu dan diakui sebagai agama Islam. Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 187.

²¹Rukun Islam artinya menjalankan syariat Islam yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji.

Lahirnya kekuatan komunis serta kaum Islam di wilayah Pekalongan bisa ditarik dari kondisi sosio-geografisnya. Pekalongan merupakan wilayah yang dekat dengan Semarang, dengan demikian wajar jika wilayah Pekalongan juga menjadi basis Komunis meskipun bukanlah golongan yang dominan. Herbert Feith menjelaskan bahwa Karesidenan Semarang merupakan basis kaum abangan yang secara langsung juga telah menunjukkan kekuatan Komunis²². Arbi Sanit menjelaskan bahwa Semarang tidak hanya menjadi basis kaum abangan atau komunis tetapi juga merupakan basis kaum santri. Hal ini dijelaskan oleh Sanit karena ada dua hal. Pertama, Semarang merupakan tempat awal berdirinya *Indische Sosial Demokratische Vereeniging* (ISDV) yang merupakan pendahulu PKI. Kedua, jauh sebelum Sneevliet datang, Semarang telah menjadi pusat penyebaran agama Islam yang kuat di masa kerajaan Demak. Untuk itu karesidenan Semarang menjadi tempat dua kekuatan sosial politik, yaitu golongan agama dan golongan komunis²³.

Ketiga, dari empat Karesidenan; Karesidenan Semarang, Karesidenan Surakarta, Karesidenan Pekalongan, dan Karesidenan Yogyakarta PKI menduduki posisi ke tiga²⁴. Wajar jika kemudian di Kota Pekalongan yang merupakan bagian dari Karesidenan Pekalongan, kekuatan politik komunis tidak begitu kuat. Mayoritas diimbangi oleh kekuatan nasionalis dan partai politik keagamaan.

²²Arbi Sanit, *Badai Revolusi Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 185.

²³*Ibid.*

²⁴Arbi Sanit, *op.cit.*, hlm. 251.

Menurut Sanit, Karesidenan Pekalongan dengan rasio 255, berarti untuk tiap 1 lembaga agama dipergunakan untuk 255 orang. Perbandingan antara jumlah lembaga-lembaga Islam yang tersedia dan yang dapat dibangun oleh masyarakat sangat besar, maka dapat disimpulkan bahwa di Karesidenan Pekalongan golongan santri lebih kuat²⁵.

Penduduk Kota Pekalongan sudah mengenyam pendidikan, diantaranya sekolah setingkat SD, SLTP, SLTA, Madrasah dan Pesantren²⁶. Ada beberapa diantara mereka yang tidak bersekolah karena di samping biayanya mahal juga terkadang karena alasan tingkat kecerdasan yang rendah. Apabila seseorang tidak naik kelas, langsung berhenti sekolah karena orang tuanya menganggap bahwa anaknya bodoh. Pendidikan pada umumnya hanya bisa diikuti oleh mereka yang berekonomi baik seperti petani yang memiliki tanah yang luas, petani yang memiliki pekerjaan sampingan berdagang batik, pegawai sipil dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Aktivitas penduduk Pekalongan telah didukung jalan yang beraspal baik jalan Kotapraja, Kabupaten, dan Kecamatan. Kemudian juga sarana kendaraan yang cukup banyak baik umum maupun pribadi seperti kereta kuda, sepeda, sepeda motor, mobil, truk.

²⁵*Ibid.*, hlm. 183-187.

²⁶Wawancara dengan Bapak Mahmud Maskur, Mantan ketua GP Ansor, tanggal 18 Juni 2011.

C. Keadaan politik

Suasana politik di Pekalongan sampai meletusnya pemberontakan PKI tahun 1965-1966 tidak terlepas dari perjalanan perpolitikan Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda situasi masyarakat pada umumnya banyak diwarnai dengan berbagai peristiwa yang merugikan bagi bangsa. Hal ini terjadi karena sistem kolonialisasi tidak menghendaki adanya kemajuan, kebersamaan, serta kestabilan dari bangsa Indonesia, sehingga segala bentuk kegiatan yang mengarah kepada orientasi dinamika bangsa selalu dihalangi.

Gerakan kaum komunis di Pekalongan telah berakar kuat dan bisa dilihat dari peristiwa revolusi sosial tiga daerah pada tahun 1945, kaum kiri aktif melakukan gerakan revolusi menentang status quo di Pekalongan. Hal ini berawal orang-orang komunis yang beragama Islam bekas buangan dari Digul akibat pemberontakan tahun 1926 memantapkan untuk memberontak terhadap penguasa²⁷. Meningkatnya kegiatan kaum kiri mendorong Belanda untuk meningkatkan kewaspadaan, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari Belanda maka golongan kiri membentuk jaringan-jaringan bawah tanah di samping memelihara organisasi partai yang ada. Revolusi sosial tersebut untuk mengubah struktur masyarakat kolonial menjadi suatu susunan masyarakat yang lebih demokratis.

Sejak tahun 1950 sampai 1955 bangsa Indonesia menganut sistem multi partai, sehingga menimbulkan berbagai macam polemik atau perpecahan di dalam

²⁷Anton E Lucas, *One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah dalam Revolusi Indonesia*, (Yogyakarta: Resist Book, 2004), hlm. 27.

masyarakat Indonesia. Penyebab timbulnya konflik adalah kebebasan mengembangkan partai politik dan adanya faktor perbedaan ideologi dasar dari partai-partai yang ada. Sebagai contoh, tahun 1952 NU keluar dari Masyumi, mendirikan partai sendiri, di samping itu Masyumi harus menghadapi lawan politiknya yaitu PKI dan PNI²⁸.

Menghadapi Pemilu 1955, semua partai politik di Pekalongan berlomba-lomba untuk memperkenalkan dan menonjolkan partainya agar mendapat suara banyak. Pada waktu itu terdapat 33 tanda gambar peserta Pemilu, baik yang berasal dari organisasi politik, perseorangan atau masyarakat. Banyak cara ditempuh oleh partai politik untuk menarik simpati rakyat, salah satunya dengan menggunakan pendekatan langsung. Mereka mengadakan kampanye, rapat umum, pawai, panggung pertunjukkan terbuka dan mengadakan pendekatan dengan organisasi-organisasi massanya. Dari sekian banyak partai politik peserta pemilu, di Pekalongan hanya ada tiga kekuatan besar yang mendapat dukungan dari rakyat, partai tersebut adalah PKI, PNI dan NU. PKI memperoleh suara minoritas dengan 2.507 pemilih dan menduduki posisi ketiga di Pekalongan. Partai NU sekitar 6.057 pemilih, PNI 17.947 pemilih, jadi NU juga berkembang pesat di daerah Pekalongan di bawah PNI²⁹.

²⁸Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Sala: Jatavu, 1985), hlm. 195.

²⁹Arbi Sanit, *log.cit.*

Sejak pemilu 1955-1965 penduduk Pekalongan terbagi atas tiga kekuatan politik besar yang saling bersaing dan berkonfrontasi, terutama dalam usaha menggalang massa petani. Kalau melihat perkembangan politik di Kota Pekalongan, perkembangan partai-partai politik di tingkat nasional maupun daerah sejak awal masa kemerdekaan tidak bisa diabaikan. Setiap partai berusaha untuk mendapatkan simpati masyarakat, baik di tingkat Pedesaan maupun Perkotaan, dengan mengkampanyekan program-program politik dan menyebarkan ideologinya. Bagi masyarakat sendiri, garis politik dan ideologi suatu partai tidak begitu penting dan tidak berpengaruh secara signifikan bagi mereka.

Hasil Pemilu 1955 menciptakan sistem baru dalam perpolitikan di Kota Pekalongan. Pada tanggal 26 Juni 1956, dengan berdasar UU No. 7 tahun 1956, DPRDS dibubarkan dan disusun DPR dengan nama baru, yaitu “DPRD Peralihan”. Anggotanya sebagian besar dari PKI, yang sebelumnya dari Masyumi, dengan demikian Kota Pekalongan mengalami perubahan di bidang legislatif karena adanya pergeseran partai politik. Berdasarkan Ketetapan Presiden No. 5 tahun 1960³⁰, ketua DPRD ditangkap oleh Kepala Daerah, maka sejak tahun 1961 DPRD Kota Pekalongan diketuai oleh Wali Kotanya sendiri yaitu R. Mochamad Tedja .

Semakin hari PKI semakin berani, berbagai organisasi massa yang berhasil mereka pengaruhi dipergunakan sebaik mungkin untuk melontarkan tuduhan-

³⁰Berisi antara lain menambah sebutan “Gotong-Royong” pada DPRD, sehingga menjadi DPRD-GR. Penambahan baru ini disesuaikan dengan arus politik pada saat itu yang ingin menghimpun segala kekuatan masyarakat dalam proses revolusi dan jebakan taktik PKI dengan program Nasakom. Lihat Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 73.

tuduhan terhadap lawan-lawan politiknya. Mereka yang terkena tekanan-tekanan dari PKI merasakan bagaimana teror mental itu terus menghantuinya. Cara-cara yang dipergunakan PKI rupanya menimbulkan ketidaksenangan dan kebencian lawan politiknya. Seperti yang dituturkan Bapak Nurzen Tho`at, mantan anggota GP Ansor Pekalongan, semakin keras hasutan PKI, semakin keras pula pendirian lawan-lawan politik yang menentanginya. Setiap ada rapat-rapat organisasi, PKI sering melakukan hasutan-hasutan dan demo yang mengakibatkan bentrokan dengan lawan politiknya³¹.

Organisasi politik PNI, NU, PKI rupa-rupanya saling berlomba untuk memperoleh dukungan dari rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut antara lain tampak dengan diselenggarakannya pertemuan, rapat serta ceramah oleh organisasi politik tersebut. Dalam laporan politik Kota Pekalongan pada tahun 1965 hampir selalu tercantum kegiatan PKI beserta organisasi massanya. Kegiatan PKI di Pekalongan dalam laporan-laporan tersebut dilukiskan sebagai usaha untuk memperkuat organisasinya dengan aktif yang diikuti oleh organisasi buruh, pemuda, tani maupun wanitanya, antara lain dalam bentuk rapat, pertemuan, ceramah dan tari-tarian³². Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memperdalam pengetahuan berorganisasi yang didasarkan pada ajaran Marxisme/Leninisme.

³¹Wawancara dengan Bapak Nurzen Tho`at, Mantan anggota GP Ansor Pekalongan, tanggal 1 November 2010.

³²*Arsip*, Surat dari Komando Resor Militer 071 Widjajakusuma Komando Distrik Militer 0710 tanggal 30 desember 1965, yang berisi tentang laporan situasi daerah Komando Distrik Militer 0710 Pekalongan. Lihat lampiran 7, hlm. 112.

Sikap partai-partai lainnya seperti NU, PNI, Murba, Masyumi dan sebagainya lebih berhati-hati dalam menghadapi agitasi atau hasutan yang dilakukan oleh PKI. PKI sebagai partai politik yang mendasarkan perjuangannya pada ideologi pertentangan kelas, sejak semula berusaha mencari pengaruh dari kalangan kaum buruh, petani dan sebagainya yang dianggap sebagai kelas proletar. Pengaruh PKI biasanya tumbuh dengan subur di daerah yang kurang subur dan miskin, namun tidak menutup kemungkinan jika paham komunis dapat tumbuh subur di daerah-daerah yang relatif dihuni banyak kelas pekerja, memiliki tanah yang subur dan kehidupan ekonomi menengah.

Secara umum wilayah-wilayah yang dipilih menjadi basis komunis adalah daerah perindustrian di Kota Pekalongan. Seperti perindustrian di Jalan Sultan Agung, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pintu Dalam, dan Jalan Haji Win yang berada di Kelurahan Sampangan, dimana industri batik dimiliki oleh saudagar Cina. Sebagian besar pekerja adalah orang-orang pribumi. Pendeknya pola pikir yang dimiliki pekerja dan tidak terjamahnya Kelurahan Sampangan oleh tokoh-tokoh agama sehingga dengan mudah paham komunis tumbuh dan berkembang.

BAB III

GERAKAN PEMUDA (GP) ANSOR DI PEKALONGAN TAHUN 1965

A. Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pekalongan

Gerakan Pemuda (GP) Ansor sebagai badan otonom NU (Nahdlatul Ulama) mempunyai sejarah kelahiran yang hampir bersamaan prosesnya dengan NU. Keduanya lahir diawali timbulnya organisasi-organisasi lokal yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan dakwah. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya sebagai organisasi yang mewakili Islam tradisional. Pada Mukhtamar tahun 1928, NU menetapkan anggaran dasarnya untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Belanda, diterima tanggal 6 Februari 1930. NU kemudian menetapkan tujuannya untuk mempromosikan panutan yang ketat pada keempat *mazhab*¹ (Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali) dan mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan Agama Islam².

Sejak saat NU berdiri, NU selalu eksis dalam perjuangan Bangsa Indonesia, mulai dari pemerintahan Kolonial Belanda, Jepang, Orde Lama, Orde Baru. NU tidak hanya bergerak dalam bidang agama saja, melainkan politik, pendidikan, ekonomi dan sosial. Kiprah NU yang paling menonjol saat awal berdirinya adalah di bidang pendidikan. Jumlah Madrasah meningkat pesat selama kurun waktu akhir tahun 1920-an hingga awal 1930-an. Di bidang ekonomi, NU

¹*Mazhab* adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam, Lihat, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 726.

²Andree Feillard, *Islam et Armee Dans L'indonesie Contemporaine Les Pionniers de la Tradition*. a.b. Lesmana, *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm. 11-12.

telah melaksanakan berbagai gagasan dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Banyak koperasi yang didirikan oleh orang-orang NU. PBNU juga membentuk Badan Urusan Perusahaan dan Perniagaan untuk mengelola barang-barang. Selain itu, juga sudah ada pengelolaan harta wakaf.

Dibentuknya Nahdlatul ulama di Surabaya diikuti dengan pembentukan cabang-cabangnya, termasuk cabang Pekalongan. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 1930 Nahdlatul Ulama mengadakan *muktamar* (konferensi) ke-V di Pekalongan³ yang dipimpin langsung oleh KH Hasyim Asyari dan H Ahmad Muhsin. Pada *muktamar* ke-V tersebut pembagian tugas organisasi mulai dipertegas, dari situ kemudian dibentuk berbagai lembaga dan *lajnah* (panitia) yang menangani berbagai tugas, ada yang menangani bidang umum, bidang dakwah, bidang pendidikan, dan bidang urusan luar negeri.

Pada tahun 1931 Pemuda Nahdlatul Syubban dan beberapa organisasi lokal membentuk Persatuan Pemuda NU. Organisasi ini gagal diakui PBNU, karena banyak ulama senior kurang setuju terhadap ketidaksabaran kelompok muda dalam melakukan reformasi agama dan gaya berpakaian mereka yang kebarat-baratan. Pada tahun 1934 organisasi ini kembali berusaha mendapat pengakuan dengan nama baru Ansor dan mendudukan kyai muda seperti K.H.A. Wahid Hasyim, K.H. Abdullah Ubaid dan K.H. Mahfud Sidiq yang mempunyai hubungan baik dengan PBNU, sebagai pimpinannya. Akhirnya dengan dukungan

³Wawancara dengan Bapak Ngizam Kholil anggota Rohis NU, tanggal 15 Juni 2011.

Kyai Wahab pada Mukhtar NU tahun 1934, Ansor mendapat persetujuan menjadi salah satu cabang pemuda NU⁴.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang didirikan di Surabaya pada tanggal 14 Desember 1949 merupakan kelanjutan dari Ansor Nahdlatul Ulama (ANO) yang didirikan pada tanggal 24 April 1934⁵. Ansor berasal dari kata *al-anshar* yang berarti 'kaum penolong', orang-orang yang membantu Nabi di Madinah. Gerakan pemuda di kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengajukan permohonan kepada alim ulama yang bergabung dalam Jam'iyah ini agar mereka dihimpun dalam satu wadah dan berdirilah Ansor Nahdlatul Ulama (ANO).

Setelah tentara Jepang menduduki Indonesia, maka seluruh kegiatan politik organisasi pergerakan terhenti. Aktivitas politik Bangsa Indonesia dalam bentuk apapun dilarang, kecuali kegiatan non politik seperti olahraga dan kesenian dengan syarat harus melapor dahulu. Pada masa pendudukan Jepang hampir seluruh kekuatan ANO masuk tentara Hizbullah. Setelah Proklamasi kemerdekaan, ANO ikut dalam revolusi fisik melawan sisa-sisa tentara Belanda.

Pada tanggal 14 Desember 1949 diselenggarakan kongres pertama yang dihadiri oleh ANO seluruh Indonesia. Saat itu kongres menekankan pentingnya dihidupkan ANO untuk membentengi perjuangan Umat Islam Indonesia dan untuk mempersiapkan diri sebagai kader pengurus NU. Dalam pertemuan tersebut

⁴Aceng Abdul Azis, dkk., *Islam Ahlussunnah Waljama'ah di Indonesia; Sejarah, Pemikiran dan Dinamika Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Ma'arif NU. 2007), hlm. 116-117.

⁵Choirul Anam, *Gerak Langkah Pemuda Ansor Seputar Sejarah Kealahiran*, (Jakarta: PT. Duta Aksara Mulia, 1996), hlm. 76.

dicapai kesepakatan untuk menghidupkan kembali ANO dengan nama Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor).

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pekalongan terbentuk beriringan dengan terbentuknya ANO sehingga berganti nama Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang beranggotakan kader-kader NU dan masyarakat yang berumur 15-40 tahun, dengan tujuan serta pokok-pokok usaha sebagai berikut: 1) Memperjuangkan berlakunya syari`at Islam dengan berhaluan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi`i; 2) Mengusahakan terbentuknya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Islam untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan rohani dan jasmani; 3) Mempersatukan pemuda-pemuda Islam dalam suatu organisasi untuk membentuk kepribadian yang luhur⁶. Kegiatan Gerakan Pemuda (GP) Ansor adalah kegiatan pramuka, kursus organisasi, latihan ketrampilan, dengan tujuan untuk melatih kekuatan tubuh dan menanamkan cinta terhadap organisasi. Dalam perkembangannya Gerakan Pemuda (GP) Ansor cabang Kota Pekalongan mempunyai 5 anak cabang dan 85 ranting dengan anggota 10.000⁷.

Menapaki perjalanan sebagai partai politik, NU dihadapkan pada kebutuhan yang sangat mendesak karena hanya sedikit diantara pemimpin organisasi ini mempunyai pengalaman politik dan sebagian dari kadernya yang paling handal telah memegang jabatan di Masyumi dan enggan melepaskannya

⁶*Ibid.*

⁷*Arsip*, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Djawa Tengah, Daftar Laporan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Djawa Tengah 1969. Lihat lampiran 9, hlm. 133.

saat itu NU juga tidak memiliki dana yang cukup, sementara administrasi dan kepengurusan cabang-cabang mengalami kemandekan⁸.

Organisasi yang memiliki basis kuat di pedesaan ini membutuhkan tenaga-tenaga terampil dan para praktisi politik. Untuk mengisi berbagai jabatan dalam jajaran partai, maka dilakukanlah rekrutmen besar-besaran, penghidupan kembali cabang-cabangnya, pembentukan subdidang baru untuk melayani kelompok pendukung khusus seperti veteran; buruh; dan mahasiswa, penerbitan koran dan jurnal, dan pembangunan basis dana yang kuat dalam NU untuk mengimbangi predikatnya yang baru sebagai partai politik⁹. Begitu NU berubah sebagai partai politik, dalam waktu yang relatif singkat organisasi ini harus memasuki persiapan Pemilu 1955.

Persiapan NU yang sangat sempit menuai prestasi yang mengejutkan berbagai kalangan. Ternyata dalam Pemilu 1955 NU berhasil meraup suara cukup banyak dan keluar sebagai empat besar dalam kehidupan politik Indonesia saat itu NU muncul sebagai partai terbesar ketiga dengan menarik hampir tujuh juta pemilih atau 18,4% dari total suara nasional, serta mendongkrak perwakilan di parlemen dari 8 menjadi 45. Jumlah yang tidak mungkin diraih seandainya NU tetap bergabung sebagai anggota istimewa Masyumi.

Hal yang menggembirakan bagi NU ini bisa dilihat juga sebagai kenyataan pahit yang harus diterima umat Islam. Dengan keluarnya NU dari Masyumi maka Partai Sarekat Islam Indonesia (PSSI) tidak memenangkan Pemilu 1955.

⁸Greg Fealy, *IJTihad POLITIK ULAMA Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 129.

⁹*Ibid.*, hlm.131.

Keberhasilan NU dalam menjaring suara cukup banyak dalam Pemilu 1955 pantas diacungi jempol. Saat menggelar kampanye NU mampu membangkitkan gelora solidaritas yang tinggi, khususnya di kalangan pesantren dan simpatisan pesantren. NU mampu menggalang perasaan senasib sepenanggungan, terutama di lingkup masyarakat pedesaan, dan NU juga mampu menunjukkan sikap politiknya yang anti komunis.

Pada tahun 1960 para simpatisan PKI sudah melakukan aksi-aksi yang dinilai sangat merugikan umat islam diantaranya tentang mempercepat UUPA dan aksi sepihak. Melihat sepak terjang PKI itu para tokoh umat Islam khususnya NU melakukan koordinasi antar umat Islam seperti: PII, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah. Untuk mengantisipasi gerakan-gerakan PKI para orang-orang tua NU dan pemuda Ansor melakukan koordinasi dalam bentuk umum maupun khusus untuk para anggota. Bentuk umum yang dilakukan adalah pengajian-pengajian yang mendatangkan para kyai-kyai dari luar Pekalongan dan bertujuan agar masyarakat khususnya umat Islam tidak terpengaruh bujuk rayu PKI. Bentuk khusus adalah melakukan koordinasi secara intern untuk semua anggota yang tersebar di wilayah Pekalongan¹⁰.

NU sebagai organisasi keagamaan dan politik mudah menyesuaikan diri dalam percaturan politik di Indonesia. NU menjadi partai politik yang bertujuan di antaranya menghambat kepentingan PKI. Untuk mewujudkan hal tersebut, NU mengadakan konsolidasi organisasi beserta ormas-ormasnya, khususnya GP

¹⁰Wawancara dengan Bapak H. Mustofa Bakri, Mantan ketua NU Pekalongan, tanggal 14 Desember 2011.

Ansor¹¹. Keadaan yang sangat kacau itu, NU mempersiapkan diri menghadapi pertempuran-pertempuran yang diduga akan semakin gawat. Organisasi kepemudaan NU, Ansor membentuk Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) tahun 1962, karena merasa yakin PKI telah merembes ke dalam tubuh angkatan bersenjata. Cabang-cabang di daerah diperintahkan untuk siaga. Pedoman yang diberikan pada saat itu ialah menempatkan anggota yang pernah mempunyai pengalaman ketentaraan pada jabatan ketua cabang Ansor sebagai penasihat BANSER.

BANSER adalah pendidikan massa anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor dengan menghimpun tenaga inti yang penuh daya juang, daya tahan, militansi (ketangguhan dalam berjuang) dan disiplin yang tinggi dan dapat bergerak disegala bidang kepentingan untuk perjuangan Gerakan Pemuda Ansor dan kemaslahatan umum¹². Anggota BANSER cabang Pekalongan terdiri dari anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang meyakini ideologi dan ketaatannya kepada organisasi serta telah mengalami pendidikan mental dan jasmani, penentuan keanggotaan BANSER dilakukan oleh Pimpinan Gerakan Pemuda (GP) Ansor ranting setempat dengan pedoman pada syarat-syarat sudah menjadi anggota

¹¹Einar M. Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1989), hlm. 144.

¹²Choirul Anam, *op.cit.*, hlm. 258.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor sekurang-kurangnya 1 tahun dan memiliki kondisi fisik yang baik. Anggota BANSER Cabang Pekalongan berjumlah 5000 orang¹³.

Sebagai organisasi kepanduan, BANSER mempunyai tugas pokok yaitu mengamalkan dan mengamankan ideologi gerakan, mempertahankan serta menyelamatkan segala hasil perjuangan yang telah dicapai dan melaksanakan program perjuangan gerakan serta membantu pelaksanaan program pemerintah.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan BANSER sebagai berikut¹⁴:

1. Tindakan-tindakan atau usaha gerakan aksi massa yang bersifat politik untuk:
 - a. Sosial kontrol dan partisipasi sosial
 - b. Memenangkan strategi perjuangan
 - c. Pertahanan dan penyelamatan partai atau gerakan beserta pemimpin-pemimpinnya.
 - d. Pengamanan jalannya pelaksanaan program perjuangan gerakan.
2. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha gerakan massa untuk pembangunan dengan cara:
 - a. Kerja bakti dalam pembangunan, pembersihan, perbaikan tempat-tempat umum (masjid, saluran-saluran air, madrasah-madrasah/sekolah-sekolah, jalan-jalan umum, dan sebagainya).
 - b. Pembukaan tanah-tanah garap untuk para transmigran.

¹³*Arsip*, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Djawa Tengah, Daftar Laporan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Djawa Tengah 1969. Lihat lampiran 9, hlm. 133.

¹⁴Choirul Anam, *op.cit.*, hlm. 259-260.

- c. Penghijauan tanah dan hutan, pemberantasan hama tanaman dan semacamnya.
 - d. Pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam (gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya).
 - e. Mengadakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pemberantasan wabah penyakit.
 - f. Mengadakan pengajian-pengajian atau tablig-tablig, ceramah-ceramah umum, diskusi-diskusi, dan sebagainya.
 - g. Mengadakan latihan-latihan ketangkasan, bela diri, baris bebaris, dan cabang olahraga.
3. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha yang khusus menyangkut bidang keamanan dan pertahanan negara, BANSER mengintegrasikan diri dengan instansi-instansi resmi pemerintah.
4. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha intern ditujukan untuk mempertinggi lima kesadaran yaitu:
- a. Sadar akan keberadaan ideologi negara dan keharusan untuk mengamalkan.
 - b. Sadar akan keberadaan tujuan dan cita-cita partai NU.
 - c. Sadar bahwa BANSER adalah pengemban amanat, pengawal, penjaga, pengaman, dan pembela cita-cita partai dan pelaksana perjuangan Gerakan.
 - d. Sadar bahwa BANSER adalah kader pemegang hari depan perjuangan ummat.

- e. Sadar akan prinsip-prinsip sendiri dan prinsip-prinsip orang lain serta sadar akan ruang dan waktu.

B. Mekanisme Kerja Gerakan Pemuda (GP) Ansor

Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam melaksanakan kegiatannya berpijak pada tujuan yang telah dicita-citakan para pendirinya. Menjelang pemberontakan PKI organisasi Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pekalongan sering melakukan konsolidasi intern dan melakukan beberapa program kerja yaitu melakukan *basic training* atau kaderisasi. Organisasi ini memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) sendiri, serta memiliki tingkat-tingkat kepengurusan dari pusat hingga ke ranting¹⁵. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut merupakan pedoman untuk melaksanakan tata susunan dan tata organisasi untuk mencapai tujuan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Organisasi GP Ansor ini berasaskan Pancasila, berakidah Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan mengikuti madzhab Syafi'I, di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lambang yang dipakai adalah gambar segitiga sama sisi dengan garis tebal di sisi luar dan tipis di sisi dalamnya berarti keseimbangan pelaksanaan ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah yang meliputi iman, islam, ikhsan, keserasian dan

¹⁵Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khithah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), hlm. 19.

keharmonisan hubungan antara pemimpin (garis tebal) dan yang dipimpin (garis tipis). Di dalamnya terdapat bulan sabit dengan sembilan bintang mengelilingi satu diantaranya agak besar terletak di atas bulan sabit dengan lima garis sinar ke atas tiga ke bawah berarti kepemudaan, sunnah Rasulullah, sahabat Nabi, dan 4 mazhab. Tulisan “Ansor” di bawahnya berarti pendirian dan ketegasan sikap, warna dasar adalah hijau yang melambangkan kedamaian dan lukisan warna putih melambangkan kesucian¹⁶.

Untuk melaksanakan jalannya organisasi GP Ansor cabang Pekalongan mempunyai pengurus yang terdiri dari: 1) Pengurus Harian yaitu: ketua utama, ketua 1 dan ketua 2, sekretaris utama, sekretaris, dan bendahara; 2) pengurus pleno yaitu pengurus harian, ketua-ketua departemen, dan anggota pimpinan cabang¹⁷. Dalam pelaksanaan pengambilan keputusan ditetapkan adanya rapat-rapat, konperensi-konperensi, dan kongres. Rapat terbagi rapat anggota dan rapat pimpinan, rapat pimpinan anak cabang, rapat pimpinan cabang, rapat pimpinan wilayah; sedang konperensi terdiri dari konperensi anak cabang, konperensi cabang, konperensi wilayah, dan konperensi besar; kongres terbagi atas kongres biasa dan kongres luar biasa¹⁸.

¹⁶Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *ANTOLOGI NU: Sejarah-Istilah-Aamaliah-Uswah Buku I*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 48-49.

¹⁷*Arsip* Surat Keputusan PD/PRT Gerakan Pemuda (GP) Ansor tahun 1968. Lihat lampiran 8, hlm. 117.

¹⁸*Ibid.*

Ada beberapa bentuk aktivitas yang dilaksanakan oleh GP Ansor Pekalongan untuk melawan PKI serta untuk menarik umat Islam khususnya para pemuda Islam dan masyarakat untuk ikut bergabung yaitu:

1. Bentuk sosial kemasyarakatan.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor sebagai lembaga masyarakat tidak terlepas dari berbagai permasalahan sosial yang ada. Masyarakat harus senantiasa dibina, dibantu, serta diarahkan. Kegiatan sosial yang dilakukan GP Ansor seperti menjaga keamanan penduduk. Kegiatan ini dilakukan oleh anggota Ansor yang tersebar di wilayah Pekalongan. Kegiatan ini berjalan sampai situasi daerah masing-masing aman dari bahaya komunis¹⁹.

2. Usaha peningkatan nilai-nilai agama.

Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang diwujudkan untuk pemantapan aqidah. Peningkatan wawasan keagamaan, kebangsaan serta dalam rangka mendorong proses dinamisasi organisasi. Wilayah Pekalongan merupakan mayoritas beragama Islam, sehingga tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang bersifat agamis. GP Ansor sebagai tulang punggung pemuda NU senantiasa merangkul generasi muda Islam untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap agama, bangsa, dan organisasi. Aktivitas yang sejak lama ada di Pekalongan adalah kegiatan pengajian-pengajian yang berada di

¹⁹Wawancara dengan Bapak Ngizam Kholil anggota Rohis NU, tanggal 15 Juni 2011.

pondok-pondok pesantren dan kampung-kampung. GP Ansor dan NU sadar akan keberadaannya yang masih banyak kekurangan dan disamping itu terus mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diperolehnya, GP Ansor terus mengkaji ilmu-ilmu agama untuk memantapkan aqidah. Pemuda Ansor melakukan pengajian dengan pengurus NU bertujuan untuk mengantisipasi propaganda PKI dan aksi-aksinya²⁰.

3. Pendidikan Jasmani dan Rohani.

Memantapkan dan mematangkan kesiapan dalam menghadapi PKI, para sesepuh NU mengadakan penggemblengan diri kepada anggota pemuda Ansor agar tubuhnya kebal dari serangan musuh juga memberikan amalan-amalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Langkah-langkah ini diambil karena mengingat keganasan PKI semakin menjadi-jadi dengan banyaknya masyarakat dan pemuda Islam yang terhasut oleh bujuk rayu dari PKI²¹.

²⁰Wawancara dengan bapak Mahmud Maskur, mantan Ketua Gerakan Pemuda Ansor, tanggal 18 Juni 2011.

²¹Wawancara dengan bapak Nurzen Tho`at Mantan anggota GP Ansor Pekalongan, tanggal 1 November 2010.

C. Pertentangan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Dengan PKI

Pada awal tahun 1960, pemerintah Soekarno telah mengesahkan dua Undang-Undang Agraria yakni Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dengan UU No. 5/1960 yang mengatur pemilikan dan penguasaan tanah serta Undang-Undang Pertanahan dan Bagi Hasil (UUPBH) dengan UU No. 2/1960 yang bertujuan membentuk hubungan yang lebih adil antara pemilik tanah dengan petani *penyakap*²². *Landreform* di satu pihak berarti penghapusan segala hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, dan mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur. *Landreform* di lain pihak berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum tani²³. Sasaran pokok tanah yang dinyatakan sebagai objek *landreform* adalah tanah-tanah yang melebihi batas maksimum, tanah *absentee*²⁴, tanah swapraja, dan tanah bekas swapraja serta tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara.

Pada tahun 1964-an, sasaran gerakan lebih ditujukan kepada tuan tanah. Isu tanah menjadi vokal, khususnya karena agitasi PKI dan aksi-aksi massa BTI. Konflik yang terjadi bersifat internal, yakni antara buruh tani dan petani-petani miskin melawan tuan-tuan tanah dan petani kaya. Ketika masa diundangkannya UUPA, konflik tersebut memperoleh legitimasi hukum. Namun, pada tahun 1964-

²²Fadjar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan, Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000), hlm. 107.

²³*Ibid.*

²⁴Tanah *absentee* adalah tanah luas yang dimiliki tidak dikelola atau digunakan karena jarak atau letak geografis yang jauh dengan si pemilik sehingga menjadi terlantar.

an, UU ini gagal dilakukan dengan beberapa alasan di antaranya administrasi buruk, korupsi, dan oposisi dari pihak tuan tanah dalam bentuk manipulasi. Panitia *landreform* di dalam melaksanakan tugasnya, memang belum sesuai dengan ketentuan atau garis-garis yang ditetapkan di dalam UUPA maupun UUPBH. Panitia *landreform* di desa-desa ternyata masih ada yang belum terbentuk sehingga *landreform* belum terlaksana dan masih ada lembaga bagi hasil tradisional yang bertentangan dengan ketentuan di dalam UUPBH, dimana sesuai penjelasan pasal 7 UUPBH semestinya antara pemilik dan penggarap 1 : 1 untuk padi yang ditanam di sawah²⁵. Didorong oleh ketidakpuasan pelaksanaan *landreform*, PKI dan BTI mengorganisasi gerakan aksi sepihak²⁶.

Kegagalan aksi revolusioner yang dilancarkan PKI di pedesaan bukanlah menjadi faktor lemahnya para kader PKI untuk meningkatkan kerjanya dalam mewujudkan Indonesia yang berideologi komunis. Berbagai cara dan jalan ditempuh, meskipun banyak mengalami hambatan. Aksi massa yang cukup berbahaya dari manuver politik PKI adalah usaha-usaha memobilisasi massa untuk melakukan berbagai tindak kekerasan yang dikenal dengan "aksi sepihak". Tindakan-tindakan kekerasan yang dinamakan "aksi sepihak", PKI tidak segan-segan untuk mempermalukan pejabat pemerintah dan bahkan melakukan

²⁵Sugiyanto Padmo, *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*, (Yogyakarta: Media Pressindo dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2000), hlm. 107.

²⁶Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), hlm. 122-123.

perampasan-perampasan hak milik orang lain yang mereka golongkan tuan tanah²⁷.

Kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan untuk para petani selama beberapa dasawarsa sebelum 1965, polarisasi dan eksploitasi ekonomi meningkat di pedesaan Jawa yang mengakibatkan tekanan pada struktur desa tradisional dan mengurangi kemampuan penduduk desa dalam memenuhi kebutuhan²⁸. Banyak di antara petani harus menjual tanahnya karena sulitnya memenuhi kebutuhan uang tunai. Keadaan ini memperlebar jurang pemisah antara petani kaya dan petani miskin.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di pedesaan Jawa berdasarkan pada teori-teori PKI merupakan gejala pertentangan kelas, pejabat desa yang menjadi penghalang bagi penguasaan tanah oleh petani dan kepada alat negara yang berusaha menjaga ketertiban pelaksanaan *landreform* yang dilakukan para petani. *Landreform* dalam arti sempit ditujukan pada 1) Pembatasan hak milik tanah dan penguasaan atas tanah, mengadakan retribusi atas tanah yang berlebihan daripada maksimumnya agar terdapat pembagian yang adil dari sumber penghidupan rakyat tani yang berakar pada tanah dan juga didapat pembagian hasil yang adil; 2) Memperbaiki keadaan sosial dan perekonomian rakyat; 3) Memperbaiki produksi nasional; 4) Mengakhiri eksploitasi tuan tanah. Dalam arti luas *landreform* adalah

²⁷Agus Sunyoto, *Banser Berjihad Menumpas PKI*, (Tulungagung: Lembar Kajian dan Pengembangan PW. GP. Ansor Jawa Timur dan Pesulukan Toriqoh Agung (PETA), 1996), hlm. 70.

²⁸Margo L.Lyon, *Dasar-Dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa, dalam Dua Abad Penguasaan Tanah*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 169-182.

mengadakan perubahan dalam struktur agraris menuju kepada pembangunan masyarakat desa²⁹. Tidak semua tanah menjadi sasaran dalam aksi sepihak PKI dan BTI. PKI masih membedakan antara tuan tanah yang patriotik yaitu tuan tanah yang tidak mempersulit pelaksanaan *landreform* dengan tuan tanah yang kontra-revolusi yang harus diganyang. Tuan tanah yang memberikan dukungan revolusi ditarik menjadi kader. Menurut Arbi Sanit ada dua kemungkinan yang dapat ditarik kesimpulan. Pertama, karena tidak adanya jaminan hukum terhadap keselamatan, baik diri maupun tuan tanah tersebut. Kedua, karena tidak ada yang dapat membela mereka dalam menghadapi tekanan, ancaman-ancaman dengan aksi-aksi yang datang dari simpatisan PKI³⁰. Masuknya tuan tanah dalam tubuh PKI karena mereka terpaksa mengikutinya. Alasan menganut ajaran komunis adalah untuk memperoleh perlindungan dari PKI³¹.

Memasuki tahun 1964, berbagai aksi sepihak yang didalangi PKI dengan tokohnya Maktub hadi, Goyohan dan BTI di Kota Pekalongan umumnya berkisar pada masalah perebutan hasil tanah garapan yang dilakukan PKI kepada orang-orang NU yang memiliki tanah, bila petani tersebut melakukan panen orang-orang PKI langsung menyerobot padi yang ada milik tuan tanah di antaranya H. Jonet, H. Walon, dan H. Asikhin yang kebanyakan warga NU³², dan PKI menghasut petani agar tidak membayar pajak baik milik golongan agama maupun milik

²⁹Fadjar Pratikto, *op.cit.*, hlm. 108.

³⁰Margo L.Lyon, *op.cit.*, hlm. 169-180.

³¹Arbi Sanit, *Badai Revolusi Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 100.

³²Wawancara dengan Bapak Subadi, Mantan anggota PNI, tanggal 13 Desember 2011.

golongan nasionalis disepanjang Pekalongan Barat khususnya di Kelurahan Podosugih akan tetapi hal ini dapat ditanggulangi oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor dengan BANSER³³. PKI pada tahun 1964 bersama ormasnya berusaha melaksanakan *landreform* yakni mengorganisasi "tujuh setan desa". PKI terus mempropagandakan untuk menghancurkan semua kekuatan konservatif yang digambarkan sebagai "tujuh setan desa"³⁴.

Usaha PKI untuk menanamkan ide-idenya kepada rakyat kecil terutama petani dan buruh dengan memakai ormas dalam PKI yaitu BTI, PR, SOBSI, GERWANI, LEKRA. Sebelum dipengaruhi oleh PKI sejak dulu hubungan antara yang mempunyai tanah dengan para penggarap tanah sebenarnya sangat baik dan disediakan tempat penginapan atau rumah walaupun statusnya hanya hak pakai³⁵. Tetapi pada tahun 1960 PKI dengan UUPA dan UUBH mempengaruhi para penggarap untuk mendapat hak yang lebih atau bahkan meminta bagian panen melebihi ketentuan yang ada seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat.

³³Wawancara dengan Bapak Mahmud Maskur, mantan Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor tanggal 18 Juni 2011 dan *Arsip*, Surat Instruksi PW GP Ansor Jawa Tengah tanggal 18 oktober 1964 kepada PC GP Ansor se-Jawa Tengah untuk secara aktif memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga yang terganggu oleh organisasi Buruh Tani Indonesia tahun 1964, Lihat lampiran 5, hlm. 107.

³⁴Tujuh setan desa adalah lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat, tengkulak jahat, bandit desa, pengusaha jahat, dan tuan tanah yang dianggap penghisap. Lihat Aminudin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*, (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 102.

³⁵Wawancara dengan Bapak H. Mostofa Basri, Mantan ketua NU Pekalongan, tanggal 14 Desember 2011.

Konflik BANSER terhadap PKI tidak hanya terjadi sebelum meletusnya pemberontakan PKI namun terjadi setelah meletusnya pemberontakan pada tanggal 15 Oktober 1965 jam 15.00 di lapangan pelajar Soroganan diselenggarakan rapat raksasa mengganyang Gestapu dan PKI atau Aidit, rapat raksasa tersebut diselenggarakan oleh panitia aksi pengganyangan G30.S yang diketuai H. Ridwan (NU). Berbicara dalam rapat umum yang dihadiri kurang lebih 1.000.000 orang antara lain Walikota, Kodim 0710, Kepala polisi Kota Pekalongan dan tokoh-tokoh partai nasional yang diwakili Umar Suparman (PNI) dan H. Ridwan (NU). Kemudian pengunjung rapat raksasa tersebut secara teratur terpecah menjadi dua kelompok. Pertama menuju kantor orang-orang PKI di Jalan Progo kemudian membakar dan menghancurkan alat-alat drum band, Kedua menuju kantor PKI yang berada di Jalan Dr. Wahidin untuk menghancurkan dan membakarnya³⁶.

Tahun 1966 terjadi gangguan keamanan yang merupakan dampak dari kontra revolusi G30S/PKI antara lain³⁷: Pertama, Peristiwa pengambilan alihan gedung sekolah asing milik warga negara RRT didesa Grogolan Pekalongan timur tanggal 22 Maret 1966 jam 07.30 yang dilakukan sekolah SMA dan SPG dengan menggunakan organisasi Kodjarsena (Pramuka) pimpinan guru-guru SMA Setiadji dan Setiadi tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan gedung, hanya

³⁶*Arsip*, Surat laporan tanggal 29 Oktober 1965 dari GP Ansor kota praja Pekalongan kepada PP GP Ansor tentang peristiwa pengganyangan G 30 S/PKI. Lihat lampiran 6, hlm. 108.

³⁷*Arsip*, Surat dari Komando Resor Militer 071 Widjajakusuma Komando Distrik Militer 0710 tanggal 30 desember 1965, yang berisi tentang laporan situasi daerah Komando Distrik Militer 0710 Pekalongan. Lihat lampiran 7, hlm. 112.

coret-coreot pada tembok dan semua buku-buku pelajaran. Peristiwa tersebut segera dapat diambil tindakan oleh pihak ABRI, dalam hal ini anak-anak serta pimpinannya dibawa ke KODIM 99 Pekalongan. Tindakan PEPEKUPER (Pembantu Pelaksana Kuasa Perang) memberitahukan semua corat-coreot pada tembok sekolah segera dibersihkan kembali oleh anak-anak yang turut gerakan tersebut dan diadakan pengusutan oleh pimpinannya selanjutnya sekolahan harus tetap dibuka seperti sediakala; Kedua, Peristiwa tanggal 6 April 1966 jam 14.00 terjadi pengrusakan dan pencabutan papan-papan nama partai dari PNI, GSNI, dan Persatuan Wanita Marheinis di Kota Pekalongan oleh orang-orang KAPPI dan KAMI yang bergabung dalam rombongan MAN Arif Rochman Hakim sekembalinya dari Solo dan bermalam di Pekalongan. Bentrokan timbul dari golongan Pemuda Marheinis dan golongan Pemuda Pelajar yang bergabung dengan rombongan KAPPI/KAMI; Ketiga, Peristiwa tanggal 7 April 1966 jam 08.00 terjadi pengambilan alih gedung atau rumah kediaman Tiong Hwa yang sudah diamanatkan Go Jo Han Jalan Sultan Agung No. 109 yang dilakukan oleh KAPPI Pekalongan pimpinan Cherodji, Syeh, dan Imam Soeripto.

BAB IV

GERAKAN PEMUDA (GP) ANSOR DALAM PENUMPASAN PKI DI PEKALONGAN TAHUN 1965

A. Koordinasi ABRI

Selama bulan Oktober 1965, keruntuhan sistem Demokrasi Terpimpin telah dimulai. Dalam pidatonya tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto yang saat itu masih menjadi Panglima KOSTRAD, menyatakan akan membasmi kaum komunis hingga ke akar-akarnya. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Soeharto mengakui adanya perintah dari Soekarno untuk mengambil komando tentara, tetapi dengan syarat bahwa Soekarno-lah yang memiliki kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban dan keamanan. Kekuasaan tentara di bawah Soeharto ini kemudian dilembagakan pada tanggal 1 November 1965 dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Pada tanggal 3 Oktober 1965, mayat para Jenderal yang dibunuh ditemukan di kawasan Halim, dan di makamkan pada 5 Oktober yang selanjutnya diperingati sebagai hari ABRI. Tentara mulai secara terang-terangan menyalahkan PKI yang melakukan pembunuhan tersebut, yang terkenal dengan sebutan Gerakan 30 September (G-30-S), sedang bantahan PKI atas keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut sama sekali tidak dihiraukan¹.

Peristiwa pembunuhan para Jenderal Angkatan Darat digunakan secara maksimal oleh Soeharto untuk menggoyangkan kedudukan Presiden Soekarno. Soeharto mengarahkan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi

¹M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia 1200-2004*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 564-565.

menentang pemerintahan Soekarno. Tentara mendorong para mahasiswa untuk berdemonstrasi menuntut pembubaran PKI, membentuk kabinet baru, dan melakukan reformasi ekonomi. Tuntutan ini terkenal dengan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat)². Lewat Tritura yang disuarakan para mahasiswa, Soeharto berusaha menekan Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI dan menyingkirkan menteri-menteri yang tidak disukainya. Hal ini dikarenakan PKI dianggap terlibat G-30-S dan beberapa menteri yang dianggap bagian dari PKI.

Peristiwa kudeta PKI terhadap militer pada 1 Oktober 1965 di Jakarta menjalar dengan cepat ke daerah Kodam VII/Diponegoro. Kondisi ini sangat logis karena pada Pemilu 1955 PKI memiliki suara mayoritas di Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan tempat pelarian para anggota PKI untuk mengalihkan kegiatannya³.

Mayjen Soeharto mengeluarkan pernyataan resmi melalui radio bahwa G30S/PKI merupakan gerakan kontra-revolusioner yang didalangi PKI. Tuntutan pembubaran PKI bergema dimana-mana dan aksi massa terus-menerus dilancarkan. Situasi kemudian berbalik, sebelum peristiwa kudeta di Jakarta, PKI terus melancarkan aksi dan agitasi. Namun, setelah itu PKI mendapat gempuran

²Tri Tuntutan Rakyat ini mencakup Turunkan harga, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, dan Rombak Kabinet Dwikora. Lihat Choiru Anam, *Gerak Langkah Pemuda Ansor Seputar Sejarah Kelahiran*, (Jakarta: PT Duta Aksara Mulia, 1996), hlm. 114.

³Robert Cribb, *The Indonesian Killings of 1965-1966 Studies from Java and Bali*. a.b Erika S Alkhatab dan Nurulita Rusli, *The Indonesian Killings, Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, (Yogyakarta: Mata Bangsa Syariat Indonesia, 2004), hlm. 266.

hebat di berbagai daerah. Aksi ganyang PKI diadakan di berbagai tempat, demonstrasi semakin sering terjadi, komando aksi semakin dipersiapkan.

Pada peristiwa berdarah G30S setelah PKI dinyatakan sebagai pelakunya, TNI AD (Tentara Negara Indonesia-Angkatan Darat) juga turut andil dalam penumpasannya. Namun, menurut Hermawan, peristiwa tersebut merupakan implementasi dari konflik internal TNI. Ada fakta kunci yang dianggap mendukung keterlibatan TNI-AD bahwa mereka yang diculik dan para penculiknya adalah personal AD, tidak ada orang sipil yang terlibat⁴.

Situasi yang penuh dengan ketidakpastian tersebut dimanfaatkan oleh semua partai politik dan organisasi massa, seperti PKI, PNI, NU, Masyumi, dan organisasi lainnya untuk menggalang kekuatan. Melihat kecenderungan tersebut, PKI mengambil sikap hati-hati, para tokoh PKI di tingkat seksi mengimbau kepada anggotanya untuk tetap tenang.

Panglima Kodam VII/Diponegoro Brigjen TNI Soeryosumpeno mengadakan pengarahan pada Garnizum dan Komandan-Komandan kesatuan setempat. Selanjutnya, disusunlah rencana penumpasan G30S/PKI⁵. Rencana itu meliputi hal-hal berikut.

1. Pemulihan kembali garis komando antara Kodam dan seluruh kesatuan-kesatuan di bawahnya.
2. Konsolidasi slogorde Kodam VII

⁴Hermawan Sulistiyo, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000), hlm. 52.

⁵ *Ibid.*

- a. konsolidasi fisik
 - b. konsolidasi mental dan ideologi
 - c. konsolidasi personil
3. Pemulihan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Kodam VII/Diponegoro Jawa Tengah.

Pada hari-hari pertama bulan Oktober tampak betapa dekatnya hubungan sebagian tokoh NU dengan ABRI. Kontak-kontak dengan beberapa jenderal sudah terjalin sejak Zaman Revolusi tahun 1940-an dan terus berlanjut di dalam Legiun Veteran melalui Ikatan Bekas Pejuang Islam yang juga tergabung di dalamnya. Ketika terjadi aksi sepihak yang dilancarkan oleh para petani pada tahun 1964, hubungan NU dengan Angkatan Darat juga semakin dikuatkan⁶. Banyak yang mempunyai akses kepada jenderal-jenderal Angkatan Darat, terutama dengan Jenderal Abdul Haris Nasution yang merupakan satu-satunya jenderal yang lolos dari sergapan komunis dan dengan Sarwo Edhie yang merupakan ujung tombak aksi anti-komunis serta Alamsyah Ratu Perwiranegara. Setelah kudeta meletus di Jakarta, situasi di Kota Pekalongan pun menjadi kacau dengan adanya informasi yang simpang-siur mengenai siapa yang berada di balik gerakan itu.

Di rumah Jenderal Alamsyah beberapa tokoh NU tinggal sementara, dan dengan senang hati jenderal ini melindungi mereka, memberikan tanda izin untuk keluar pada malam hari selama diberlakukannya jam malam bagi para aktivis NU dan menyediakan dana untuk mengirim kurir ke daerah-daerah dengan pesawat,

⁶Wawancara dengan Bapak Sohid Aldin, Mantan anggota Rohis NU, tanggal 14 Desember 2011.

kereta api, bus, dengan pesan “pemberontakan PKI kita hadapi bersama-sama ABRI”. Para anggota NU ini diperintahkan untuk berhubungan dengan tentara setempat, dan segeralah mereka berangkat menuju pelosok-pelosok yang terpencil di seluruh Nusantara⁷. Baru setelah bulan Desember 1965, sesudah perintah Panglima Daerah Militer (Pangdam), partai dan ormas Islam menempatkan diri di belakang tentara dalam kampanye anti-komunis.

Gelombang penangkapan orang-orang PKI yang dilakukan oleh tentara secara sistematis oleh unsur Angkatan Darat di ibu kota akhirnya mendorong sebuah gerakan yang sama dan cukup besar di daerah-daerah. Melalui koran resminya (Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata), Angkatan Darat mengawali sebuah kampanye menentang PKI yang disertai berita kekejaman yang dilakukan PKI. Hal ini disambut dengan demo besar-besaran untuk mengubur dan menentang PKI, sehingga menciptakan perubahan kondisi politik di daerah-daerah. Kondisi politik mengalami perubahan ketika unsur Angkatan Darat mulai menjadi kekuatan utama yang mendorong pembasmian PKI sampai ke akar-akarnya. Pada bulan Oktober 1965, penumpasan orang-orang PKI maupun orang-orang yang dikaitkan dengan partai itu telah dimulai di daerah-daerah. Selang beberapa bulan, pembunuhan massal terhadap orang-orang PKI yang terbesar terjadi di Pulau Jawa dan Bali.

Di Jawa Tengah, sejumlah kerusuhan anti-komunis yang cukup spektakuler terjadi di beberapa kota, khususnya terhadap markas-markas PKI.

⁷Andree Feillard, *Islam et Armee Dans L'indonesie Contemporaine Les Pionniers de la Tradition*. a.b. Lesmana, *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm. 76.

Pembunuhan massal yang paling buruk terjadi di pedesaan di Kota Pekalongan. Pelaku utamanya adalah unit-unit militer, khususnya unit para komando RPKAD dan kelompok siaga sipil, yang sebagian besar anggotanya adalah kelompok pemuda yang bergabung dengan partai-partai politik anti-komunis. Di sini kelompok pemuda Ansor yang berafiliasi dengan NU memainkan peranan penting.

Pada bulan Oktober 1965, kelompok-kelompok pemuda anti-komunis di Pekalongan yang kebanyakan berasal dari organisasi-organisasi Islam mulai melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang diduga menjadi simpatisan PKI. Beberapa simpatisan berasal dari orang-orang Masyumi, tetapi orang-orang NU terutama Ansor juga turut ambil peranan penting dalam pembersihan orang-orang PKI⁸.

Pada saat yang sama, kesatuan-kesatuan RPKAD mulai menyisir Jawa Tengah, dengan instruksi dari Jakarta untuk memulihkan ketertiban dan menghancurkan sisa-sisa G-30-S. Gerakan ini tidak lagi memiliki bentuk terorganisasi, tetapi sisa-sisanya diidentifikasi sebagai anggota-anggota dan orang-orang yang diduga menjadi simpatisan PKI. Di Jawa Tengah khususnya di Pekalongan, Pemerintah, Kodim, dan Kepolisian berupaya mengumpulkan para pemuda non-komunis, terutama para pemuda Ansor, dan pemuda-pemuda desa untuk dilatih menggunakan senjata dengan tujuan khusus untuk menghancurkan

⁸Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 84.

PKI. Kepentingan-kepentingan kelas, semangat keagamaan, kebencian-kebencian komunal, perbedaan-perbedaan ideologis yang mendalam, semuanya digerakkan dalam kekerasan anti-komunis. Ribuan kelompok penjaga keamanan yang didukung oleh kesatuan-kesatuan militer lokal, seringkali diarahkan oleh para komandan militer untuk membunuh atau menangkap orang-orang yang diduga sebagai simpatisan PKI. Simpatikan PKI yang hanya sekedar menjadi massa komunis sering dijadikan sebagai petunjuk anggota PKI karena mereka mengetahui siapa saja yang menjadi anggota PKI. Setelah anggota PKI dibersihkan simpatisan-simpatikan ini yang kemudian menjadi koban berikutnya.

Partai NU Jawa Tengah dalam suratnya tanggal 2 Oktober 1965 menginstruksikan kepada warga NU serta seluruh badan otonom di Jawa Tengah agar tetap taat dan setia berdiri di belakang Presiden/Panglima tertinggi ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi, dan selalu siap siaga dengan bertawakal kepada Allah terhadap segala provokasi⁹. Pucuk pimpinan Ansor juga menginstruksikan untuk terus mengadakan kontak dengan pimpinan, atasan, dan dengan alat negara. Sejak tanggal 3 Oktober 1965, Ansor secara resmi meminta anggotanya untuk bersama-sama membantu pihak ABRI memulihkan keamanan dan menjaga keutuhan bangsa serta menyelamatkan revolusi di bawah pimpinan Soekarno.

Pada 15 Oktober 1965, dengan disponsori oleh golongan agama dan Marhaen, melakukan aksi pembakaran gedung-gedung PKI, Baperki, dan toko-

⁹Koran *Suara Merdeka* Tanggal 6 Oktober 1965. Lihat lampiran 10, hlm. 134.

toko Cina seperti di Jalan Progo, Dr. Wahidin, bioskop Merdeka, Gedung *Cung Hwa Cung Hwi*¹⁰.

Pasukan RPKAD dikirimkan ke Jawa Tengah untuk menormalkan situasi. Praktis mulai tanggal 17 Oktober 1965, kondisi politik nyaris berubah total dengan massifnya Angkatan Darat melalui RPKAD mengejar dan mendorong pembantaian dengan segera berlangsung dan dengan cepat meluas ke daerah-daerah. Setelah selesai tugas pengamanan, maka pasukan RPKAD menyerahkan kembali tugas keamanan daerah selanjutnya kepada pemerintah dan pimpinan militer setempat, dan pada tanggal 25 Desember 1965 kembali bergerak menuju Jakarta untuk menunggu tugas-tugas baru. Selepas itu, seluruh tokoh-tokoh G-30-S di Pekalongan berhasil dibekuk oleh ABRI dan rakyat Pekalongan.

B. Penggalangan Persatuan Umat Beragama

Periode tahun 1960-1965, NU berada dalam lingkaran kekuasaan Demokrasi Terpimpin. Selama periode ini NU selalu masuk di dalam kabinet dan menjadi pendukung Soekarno dengan Nasakomnya. Pada era ini juga kekuatan PKI sangat luar biasa. Hal ini membuat NU harus bekerja keras untuk menandingi PKI.

Pada tanggal 4 Oktober 1965, NU meminta supaya PKI dan semua organisasi massanya dibubarkan. Menariknya, pernyataan tersebut disiapkan oleh

¹⁰*Arsip*, Surat laporan tanggal 29 Oktober 1965 dari GP Ansor kota praja Pekalongan kepada PP GP Ansor tentang peristiwa pengganyangan G 30 S/PKI. Lihat lampiran 6, hlm. 108. Wawancara dengan Bapak Mahmud Maskur, Mantan ketua GP Ansor, tanggal 21 Oktober 2011.

aktivis-aktivis muda NU dengan restu Subchan dan sehari kemudian ditandatangani oleh kalangan pemimpin senior NU¹¹. Tanggal 5 Oktober 1965 PBNU bersama-sama ormasnya menuntut secara mutlak dibubarkan PKI dan menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk membantu ABRI dalam menumpas Gerakan 30 September. Oleh karena itu, PBNU mengeluarkan suatu statement yang diberi nama “Resolusi Mengutuk Gestapu”¹².

Pada tanggal 6 Oktober 1965, PKI secara resmi menyerahkan penyelesaian masalah kudeta kepada Presiden Soekarno dan memutuskan untuk menghindari perlawanan fisik. Meskipun demikian, pemberantasan komunisme sejak saat itu telah menjadi target utama Angkatan Bersenjata, dan NU menyerukan kepada anggotanya untuk membantu ABRI memulihkan ketentraman¹³. Muhammadiyah juga mendukung pengganyangan komunis dengan mengeluarkan sebuah fatwa tertanggal 11 November 1965 yang mengumandangkan perang jihad melawan

¹¹Pernyataan itu ditandatangani oleh pemimpin NU pada hari pemakaman para Jenderal. Di bawah sebatang pohon kamboja, Kyai Masykur dan Kyai Dahlan tampak tergesa-gesa membubuhkan tanda tangan mereka pada pernyataan tersebut. Idham Chalid, karena tidak dapat ditemui, memberikan tanda tangannya pada rapat Kabinet di Bogor. Lihat Andree Feillard, *op.cit.*, hlm. 74-75.

¹²M. Masykur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hlm. 137-140.

¹³Walau tidak memberikan petunjuk terperinci yang menyetujui kekerasan-kekerasan yang terjadi kemudian, pernyataan beberapa kyai yang mengajak para aktivis mereka untuk “mengganyang komunis” dimengerti sebagai undangan untuk mengikis orang-orang komunis. Seperti yang dituliskan pada harian NU, *Duta Masyarakat*, di tajuk rancananya tanggal 7 Oktober 1965 menyatakan bahwa “keputusan yang paling tepat dan paling baik adalah memberantasnya (para komunis), akar-akarnya, komplotannya, pembelanya, dan semua yang bertindak bersamanya baik secara terbuka maupun tersembunyi. Lihat Andree Feillard, *op.cit.*, hlm. 66.

kaum komunis adalah wajib, namun dengan tambahan harus dilakukan tanpa kekerasan yang merugikan, fitnah, dan rasa dendam.

Pada akhir bulan Oktober, para mahasiswa anti-PKI membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan dukungan dan perlindungan tentara. KAMI berintikan kelompok pemuda Islam, Katolik dan mantan PSI. Sedang front kesatuan pelajar juga membentuk Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia (KAPPI), dan para sarjana juga membentuk Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) pada tahun 1966. Kedua front ini berintikan simpatisan Masyumi dan PSI.

Pada tanggal 12 oktober 1965 umat Islam mengadakan rapat akbar yang didukung oleh umat Katolik bertempat di lapangan muka Universitas Diponegara Peleburan, pernyataan yang dibacakan oleh Imron Siregar atas nama umat Islam dan umat katolik se-Jawa Tengah untuk mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan kontra revolusi dan serentak tetap taat kepada Presiden Soekarno serta memanjatkan doa kepada Allah S.W.T¹⁴. Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pekalongan juga mengirimkan anggotanya dengan beberapa bus untuk ikut serta dalam apel akbar yang diadakan di Jawa Tengah khususnya di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1965, NU, Pemuda Ansor, dan Partai Katolik mengadakan rapat akbar dan pengajian untuk umat Islam seluruh Pekalongan yang bertempat di alun-alun Pekalongan dan di lapangan Sorogenen. Para pemuda muslim menguasai jalan-jalan, membakar markas-markas besar PKI yang berada di Jalan

¹⁴Koran *Suara Merdeka* tanggal 12 Oktober 1965. Lihat lampiran 11, hlm. 137.

Progo dan di jalan Wahidi, serta mengobrak-abrik dan menjarah rumah-rumah/toko-toko orang-orang komunis. Tanpa dikomando mereka melakukan operasi pembersihan PKI¹⁵.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pekalongan khususnya Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) juga mengambil tindakan dengan cara *Riyadloh Bathin* atau latihan-latihan bathin yang berupa mengerjakan amalan-amalan yang baik yang dilatih oleh para kyai yang bertujuan untuk mendapatkan kekebalan dan kekuatan, amalan tersebut berupa: puasa, sholat, berdoa, dan zikir. *Riyadloh Bathin* diiringi dengan *Riyadloh Badaniyah* atau latihan-latihan fisik berupa olah raga, pencak silat, dan karate¹⁶.

C. Bekerjasama dengan Masyarakat

Konflik politik antara PKI dan NU yang telah dimulai pada tahun 1963 berubah benturan fisik pada pertengahan Oktober 1965. Pada saat itu, Soeharto mengirim satuan-satuan prajurit penyerang yang terpercaya ke Jawa Tengah. Pembunuhan massal terhadap orang-orang PKI mulai dilakukan di sana, bersama tentara yang membantu para pemuda menemukan orang-orang PKI. Kampanye besar-besaran anti komunis dan tuntutan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya mulai berkembang dan bergerak massif di jalan protokol.

¹⁵*Arsip*, Surat laporan tanggal 29 Oktober 1965 dari GP Ansor kota praja Pekalongan kepada PP GP Ansor tentang peristiwa pengganyangan G 30 S/PKI. Lihat lampiran 6, hlm. 108.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Mahmud Maskur, Mantan ketua GP Ansor tanggal 18 Juni 2011.

Tanggal 4 Oktober 1965, KAP-Gestapu mengadakan demonstrasi pertama yang menuntut pelarangan partai-partai yang telah merencanakan atau mendukung G-30-S, yaitu PKI dan organisasi-organisasi *underbow*-nya, yang mendalangi, mendukung, dan bersimpati terhadap G-30-S. Selain itu, mereka juga menuntut agar harta orang-orang yang tersangkut dalam peristiwa itu disita dan perangkat-perangkat pemerintah segera dibersihkan dari unsur-unsur komunis.

Para pendukung Angkatan Darat yang dipimpin oleh Subchan, ketua KAP-Gestapu dan Front Pancasila yang dibentuk tanggal 23 Oktober sebagai penggabungan partai-partai yang meliputi NU dan organisasi-organisasi sosial anti-komunis lainnya, bersama Zamroni yang juga aktif dalam KAMI. KAMI menggerakkan penduduk ibu kota melawan PKI, mengorganisasi banyak demonstrasi, dan mendapat dukungan dari Angkatan Darat. Subchan terus mengorganisir demonstrasi-demonstrasi anti-PKI¹⁷. Menurut harian anti-komunis, pada bulan Oktober gerakan anti-PKI sudah berhasil menggerakkan ratusan ribu orang. Akan tetapi, konfrontasi yang sebenarnya dengan Soekarno baru mulai terjadi pada bulan November, dengan adanya demonstrasi anti-komunis yang luar biasa besarnya di Jakarta, yaitu di Lapangan Banteng. Slogan-slogan masih memihak Soekarno, namun demonstrasi yang kurang lebih dihadiri 1,5 juta orang tersebut merupakan sebuah tekanan yang tidak dapat diabaikan oleh Kepala Negara. Di lain pihak, terdapat tokoh-tokoh NU yang berhati-hati, yang sekalipun anti-komunis namun tetap dekat dengan Soekarno menjadi lebih was-was karena pemimpin mereka Idham Chalid adalah orang yang terbuka terhadap kompromi.

¹⁷Andree Feillard,*op.cit.*, hlm. 78.

Pengelompokan kekuatan semakin meningkat dalam tubuh gerakan Islam tradisional, antara pendukung konfrontasi terhadap Soekarno, yang di mata mereka terlalu dekat dengan PKI, dengan yang lebih menyukai pendekatan halus dan bahkan mungkin ingin mempertahankan Presiden. Meskipun sikap NU dalam menghadapi Soekarno berbeda-beda, namun penting untuk dicatat bahwa pada dasarnya NU bersatu dalam sikap anti-komunisnya. Idham Chalid menganggap larangan terhadap PKI sebagai “urusan antara NU dengan Allah” dan menganggap atheisme sebagai kejahatan terbesar di dunia.

Aksi-aksi pengejaran, pembunuhan, kekerasan, pembakaran/pengerebutan rumah-rumah dan toko-toko yang dianggap sebagai milik orang-orang PKI terjadi di daerah Pekalongan di Jalan Progo, Dr. Wahidin, bioskop Merdeka, Gedung *Cung Hwa Cung Hwi* (sekarang SMA 1 Pekalongan)¹⁸. Tentara-lah yang memulai dan mengawali penyerangan yang kemudian diperparah dengan serangan dari berbagai milisi sipil yang berasal dari organisasi-organisasi yang selama ini mempunyai torehan ketegangan dan konflik politik dengan PKI, seperti Pemuda Marhaen, Pemuda Ansor, dan ormas-ormas Islam lainnya.

Salah satu tugas utama pemuda non-komunis adalah memelihara keamanan di desa mereka masing-masing. Di wilayah yang kekuatan komunisnya merupakan golongan minoritas, semua gerak-gerik mereka diawasi dengan ketat oleh orang-orang non-komunis. Pemerintah desa yang dikendalikan oleh orang-orang PNI menegaskan bahwa jika anggota PKI tidak mengikuti perintah dan

¹⁸*Arsip*, Surat laporan tanggal 29 Oktober 1965 dari GP Ansor kota praja Pekalongan kepada PP GP Ansor tentang peristiwa pengganyangan G 30 S/PKI. Lihat lampiran 6, hlm. 108. Wawancara dengan Bapak Mahmud Maskur, Mantan ketua GP Ansor, tanggal 21 Oktober 2011.

instruksi yang diberikan, maka keselamatan mereka tidak dijamin. Meskipun ada peringatan seperti itu, biasanya orang-orang komunis lebih suka meninggalkan desa mereka dan bergabung dengan kawan-kawannya di desa lain¹⁹.

Dalam rangka membalas kegiatan komunis yang makin meningkat, kelompok Nasionalis, Muslim, dan Kristen mengorganisasi pemudanya ke dalam kekuatan-kekuatan tempur. Golongan Nasionalis yang dimiliki PNI membentuk sebuah satuan khusus yang dikenal sebagai Pasukan Banteng Serba Guna. Peleton-peleton yang beranggotakan tiga puluh orang ditempatkan di setiap desa, Antusiasme mereka untuk memerangi musuh dikobarkan oleh kyai Dasuki dari Solo yang sengaja dipanggil untuk memberikan ceramah pada mereka. Bentuk latihan seperti ini dijalani oleh semua anggota Pemuda Marhaenis. Pemuda Islam di Kota Pekalongan diorganisasi menjadi sebuah pasukan yang dikenal sebagai Barisan Serba Guna. Ada juga Pemuda Kristen yang menyebut dirinya sebagai Barisan Pengawal Yesus. Organisasi-organisasi pertahanan yang dibentuk oleh kelompok-kelompok politik non-komunis mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: membantu pemerintah bilamana diperlukan, membantu penduduk desa dalam mempertahankan keamanan desa mereka, dan memberikan latihan militer²⁰.

Jika dilihat dari cara kerja dan praktik pengejaran, penangkapan dan pembunuhan orang-orang PKI di Kota Pekalongan, memang ada beberapa pola yang secara umum hampir sama di beberapa wilayah lain. *Pertama*, Penangkapan yang langsung dilakukan oleh petugas, baik dari unsur militer maupun kepolisian.

¹⁹Robert Cribb, *op.cit.*, hlm. 223.

²⁰*Ibid.*, hlm. 224.

Pihak militer diwakili oleh Kodim 0710 Pekalongan dan kepolisian Pekalongan. *Kedua*, Penangkapan dan pembunuhan dengan melibatkan dan menggunakan massa partai dan ormas-ormas yang secara politik mempunyai perbedaan dalam sikap dan ideologi yaitu NU, Partai Katolik, HMI. *Ketiga*, penangkapan dan pembunuhan dengan melalui kerjasama antara militer dan polisi dengan berbagai kelompok massa. *Keempat*, pemanggilan secara resmi yang dilakukan oleh para pejabat daerah untuk mengumpulkan mereka yang dianggap terlibat dan tersangkut paut dengan PKI²¹. Di Pekalongan, orang-orang PKI yang telah masuk dalam daftar penangkapan dipanggil secara resmi melalui surat untuk berkumpul di kodim 0710 Pekalongan.²²

Menurut keterangan Abdul Halim, operasi penangkapan orang-orang yang dianggap PKI biasanya berlangsung pada saat dini hari, di mana orang-orang sedang terlelap. Orang-orang PKI yang akan ditangkap sudah ada daftarnya, baik tua, muda, pria, wanita, jika sudah tercatat, pasti akan diambil dari rumahnya untuk dikumpulkan di tempat penampungan sementara. Sebagian penangkapan orang-orang PKI saat itu menggunakan truk yang diberi bendera PKI, hal ini bertujuan untuk mengecoh PKI beserta ormas-ormasnya, karena mereka menganggap bahwa truk itu adalah milik PKI yang akan melakukan gerakan, sehingga mereka tanpa curiga menaiki truk tersebut. Setelah orang-orang PKI ikut

²¹Wawancara dengan Bapak Abdul Halim, Mantan anggota ABRI tanggal 14 Juni 2011.

²²Wawancara dengan Bapak Suhartono, Mantan anggota ABRI, tanggal 12 Desember 2011.

naik, ternyata mereka dibawa ke *Depo*²³ dan ditahan sementara di sana. Biasanya orang-orang PKI yang ditangkap ini adalah mereka yang ikut-ikutan, sedangkan gembongnya sudah melarikan diri sebelumnya, karena mereka sudah tahu kalau akan ada operasi pembersihan. Beruntung bagi massa PKI yang mendapat perlindungan dari Aparat desa mereka. Mereka disuruh lapor ke kecamatan untuk menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam gerakan PKI dan mereka disuruh apel pagi jam 08.00-10.00²⁴.

Kebanyakan saat operasi, para gembong PKI sudah melarikan diri, yang lelaki juga sudah tidak ditemukan di rumahnya masing-masing, istri-istri mereka banyak yang mengaku sudah janda, dan para Gerwani yang akan ditangkap biasanya berpura-pura gila dan telanjang, sehingga yang akan menangkapnya tidak tega. Orang-orang PKI yang tertangkap disiksa dan disuruh untuk menunjukkan teman-teman yang lain, sebelum dibawa ke pos penjagaan. Setelah semua ditangkap, mereka dibawa ke tahanan kota Pekalongan untuk diklasifikasikan²⁵, namun tempat tahanan tidak cukup untuk menampung semua tahanan, sehingga banyak rumah-rumah dan gedung-gedung yang kosong milik orang Tionghoa (Cina) digunakan sebagai tempat penahanan.

²³*Depo* adalah Tempat penampungan atau pembuangan sementara.

²⁴*Arsip*, Surat laporan tanggal 29 Oktober 1965 dari GP Ansor kota praja Pekalongan kepada PP GP Ansor tentang peristiwa pengganyangan G 30 S/PKI. Lihat lampiran 6, hlm. 108.

²⁵Dari hasil klasifikasi tapol A, B dan C ini mereka mendapat peradilan. Banyak orang-orang tapol PKI dari Pekalongan dibawa ke Pangdam Jawa Tengah dan Pulau Buru, dan sekarang banyak yang kembali. Wawancara dengan Bapak Abdul Halim, mantan anggota ABRI tanggal 14 Juni 2011.

Ketika dilakukan Operasi Khusus (Opsus), orang-orang PKI ditanyai, apabila jawabannya tidak sesuai dengan data yang ada, mereka disiksa, disetrum dengan listrik, baru kemudian mereka mengaku. Untuk golongan ringan ditahan sementara di Pekalongan hingga terjadi proses peradilan, yang pada akhirnya membawa mereka ke Kota Semarang, Pulau Buru, atau Nusakambangan. Selama dalam masa tahanan di Kota Pekalongan, mereka tidak boleh dijenguk dan berbicara dengan keluarga. Hingga sampai tanggal 30 Desember 1965 jam 10.00 tawanan dari G-30-S tercatat 3009 laki-laki, 29 wanita, serta tercatat 206 tahanan meninggal dunia disebabkan sakit mencret²⁶.

Sejak tahun 1966, pemerintahan Orde Baru mengharuskan setiap warga Negara Indonesia untuk mengakui keberadaan Tuhan dan memeluk salah satu agama, supaya mereka tidak menjadi penganut atheisme yang dianggap berhubungan dengan komunisme, sehingga beberapa kasus perpindahan hanya dilakukan sebagai registrasi formal. Bagaimanapun skala perpindahan agama ini menunjukkan bahwa trauma politik tahun 1965 telah mengguncangkan banyak orang dan membuat mereka kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai yang dianut sebelumnya, sehingga sebagai solusinya mereka menerima agama baru. Atas guncangan tersebut agama Kristen-lah yang mendapatkan angin segar dan diterima dengan baik, karena tidak seperti agama Islam, agama Kristen terkesan

²⁶*Arsip*, Surat dari Komando Resor Militer 071 Widjajakusuma Komando Distrik Militer 0710 tanggal 30 Desember 1965, yang berisi tentang laporan situasi daerah Komando Distrik Militer 0710 Pekalongan. Lihat lampiran 7, hlm. 112.

jauh dari keterlibatan peristiwa konfrontasi politik sebelum tahun 1965²⁷. Lebih jauh lagi hal lain yang membedakan dengan Islam adalah gereja Kristen memiliki orang-orang yang bekerja dengan penuh semangat membimbing para tahanan, keluarganya, dan orang-orang dari kelompok komunis.

Setelah tahun 1965, ketegasan Islam yang kian meningkat terbukti dengan besarnya peran para aktivis Islam dalam usaha pembersihan PKI tahun 1965-1966. Mereka menyeru kepada kaum mukmin untuk menyempurnakan akidah mereka. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap Islam dengan gayanya yang baru dan lebih dinamis ini tidak menarik. Sebagian bahkan keluar dari Islam dan memeluk kepercayaan lain. Ketika peristiwa 1965 terjadi, orang memeluk agama bukan karena memang ingin menjadi penganut agama dunia yang dikenal secara resmi, namun lebih karena khawatir akan diberi label atheis dan komunis²⁸. Sebagian orang Indonesia yang tidak ingin menyebut diri mereka muslim menyatakan diri mereka sebagai Kristen, kadang-kadang sebelumnya tanpa mengalami kontak dengan penyebar agama Kristen.

Kegigihan melawan PKI ini tidak juga berhenti dengan ditangkapnya para aktivis dan simpatisan komunis secara besar-besaran. Pada saat tahanan golongan C dilepaskan pada pembebasan pertama kali sejak 1965, NU meminta para aktivisnya di Jakarta untuk meminta nama, alamat, dan pekerjaan para bekas tahanan tersebut, mengawasi kegiatan mereka setelah dibebaskan dan melaporkan bila mereka kembali melakukan kegiatan-kegiatan yang meragukan dan berusaha

²⁷Robert Cribb, *op.cit.*, hlm. 74.

²⁸M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 576.

agar RT, RW, atau Kepala Desa tempat bekas tahanan itu tinggal terdiri atas para anggota NU²⁹. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila NU dianggap sebagai unsur penting penggerak penghancuran partai komunis.

D. Dampak Penumpasan PKI Bagi NU, Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Masyarakat, dan Partai lain.

1. Bagi NU

Sikap anti komunis yang dinyatakan dalam koran *Duta Masyarakat* mendapat banyak sanjungan dari harian *Angkatan Bersenjata*. Dengan nada yang semakin keras. Harian ini memuat pernyataan-pernyataan menuntut pembubaran PKI, bahkan sering dengan nada yang lebih ganas daripada harian ABRI, seperti *Berita Yudha*. Peranan Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam penumpasan PKI juga banyak dimuat dalam media massa sehingga pasca penumpasan PKI rasio pendukung NU meningkat meskipun belum bisa mengungguli PNI. Media massa juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembalian stabilitas keamanan wilayah Kota Pekalongan. Media massa memberikan informasi tentang perkembangan penumpasan PKI di berbagai daerah sehingga mempermudah Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam menekan anggota PKI dalam masyarakat agar tidak mengkoordinir anggotanya kembali karena pemerintah menindak tegas terhadap gerakan PKI yang membahayakan bagi bangsa Indonesia. NU menghendaki perubahan yang lebih cepat dan mendukung tatanan politik baru. Partai NU semakin kuat dalam bidang politik, begitu juga massa pendukung Partai

²⁹Andree Feillard. *op.cit.*, hlm. 85-86.

NU semakin banyak dalam menghadapi pemilu 1971. Setelah penumpasan PKI masyarakat Pekalongan banyak yang beralih ke agama Islam khususnya ke golongan NU.

2. Bagi Gerakan Pemuda (GP) Ansor

Pasca penumpasan PKI pemerintah Kota Pekalongan secara umum masih dikuasai oleh partai PNI karena PNI merupakan partai nomor 1 di Pekalongan dan memiliki pendukung yang banyak. Namun untuk pemerintahan tingkat kecamatan golongan NU atau Pemuda Ansor memiliki peran yang meningkat dalam pemerintahan karena PKI sudah tidak dipercaya dalam menduduki jabatan pemerintahan. Pembersihan pemerintahan Kota Pekalongan dari unsur PKI sudah dimulai sejak awal Oktober 1965, reorganisasi pemerintahan Kota Pekalongan memaksa anggota-anggota PKI yang menduduki jabatan DPR-GR untuk turun dari jabatannya³⁰. Masyarakat secara umum menganggap bahwa masyarakat yang menjadi anggota PKI adalah melanggar hukum negara dan menyebarkan paham komunis yang tidak mempercayai adanya Tuhan, sehingga menyimpangkan ajaran agama dan Pancasila. Orang-orang GP Ansor terus bekerja sama dengan Hanra, Koramil, Kepolisian Distrik, dan Kodim di Kota Pekalongan untuk menindak tegas penduduk yang dianggap terlibat gerakan G-30-S atau eks anggota PKI.

Anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor berkoordinasi dengan anggota-anggota diberbagai kecamatan untuk menetralsir situasi pasca penumpasan PKI dengan melakukan kewaspadaan agar aksi-aksi PKI tidak kembali terjadi dan mempersempit ruang gerak PKI untuk mengkoordinir anggotanya melakukan

³⁰*Ibid.*, hlm. 88.

tindakan balasan. Selain meningkatkan kewaspadaan dalam hal keamanan Gerakan Pemuda (GP) Ansor juga mengadakan perbaikan dalam bidang spiritual masyarakat kota Pekalongan dengan mengadakan pengajian-pengajian di berbagai daerah di wilayah Kota Pekalongan agar meningkatkan keimanan dan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan sehingga faham komunis yang telah merusak masyarakat dan menggantikan Pancasila dapat dinetralisir kembali meskipun membutuhkan waktu yang tidak singkat³¹. Dibukanya pesantren dan madrasah di kota-kota pekalongan dianggap sebagai suatu perkembangan yang sangat positif baik oleh pengurus NU maupun pemerintah. Pemerintah juga lebih memperhatikan kepekaan Ormas Islam dalam memasyarakatkan Pancasila menurut Islam.

3. Bagi Masyarakat

Gerakan militer Kodim 0710 Pekalongan, Kepolisian Pekalongan serta golongan antikomunis untuk menumpas PKI di Kota Pekalongan dan sekitarnya membawa dampak psikologis yang buruk bagi seluruh masyarakat Kota Pekalongan. Perasaan trauma, takut, dan kepanikan selalu dalam diri penduduk Kota Pekalongan dan sekitarnya. Banyak penduduk yang tidak berani beraktivitas di luar rumah. Ketika ada isu tentara RPKAD sudah mendekati Kota Pekalongan, banyak di antara mereka yang bersembunyi³². Ketakutan penduduk akan kondisi

³¹Wawancara dengan bapak Mahmud Maskur mantan Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor tahun 1965, tanggal 21 Oktober 2011.

³²Wawancara dengan Bapak Suharto, Mantan anggota IPPI, tanggal 12 Desember 2011.

Kota terjadi karena penangkapan orang-orang PKI yang selalu disertai tindak kekerasan.

Rasa trauma akan peristiwa-peristiwa kekerasan dan kepanikan masyarakat juga menimbulkan ketakutan bagi anak-anak untuk bersekolah. Kata Bapak Suharto bahwa beliau termasuk korban karena dikeluarkan dari sekolah ketika beliau kelas 3 karena beliau ikut organisasi *anderbow* PKI yaitu IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) sehingga beliau pergi dari Kota Pekalongan untuk menuntut ilmu di Kota Semarang untuk mengulang SMA kelas 1.

Sehubungan dengan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, Presiden/Pangti ABRI mengklasifikasi penindakan terhadap mereka, baik yang terlibat maupun yang baru dicurigai terlibat dalam Gestapu, dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 09/Kagom/5/1966 yang kemudian disahkan MPR berdasarkan TAP MPRS RI No. XXV/MPRS/1966³³. Menurut ketentuan tersebut, mereka yang dinyatakan dalam Golongan A adalah yang terlibat langsung dalam pemberontakan G30S/PKI, baik yang berada di pusat maupun di daerah. Klasifikasi Golongan B adalah mereka yang disumpah atau menurut saksi telah menjadi anggota PKI atau pengurus ormas yang sejasas dengan PKI atau mereka yang menghambat usaha penumpasan G30S/PKI. Golongan C adalah mereka yang pernah terlibat dalam pemberontakan PKI-Madiun atau anggota ormas

³³Tim, *Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 6*, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 135.

seasas dengan PKI atau mereka yang bersimpati atau telah terpengaruh sehingga menjadi pengikut PKI.

Dampak diskriminasi lain adalah wajib lapor yang dilaksanakan di Koramil Pekalongan Timur dan di kodim 0710 Pekalongan. Sebagai Warga Negara Indonesia Frekuensi melapor dari eks tapol memang berbeda-beda. Tidak ada standar baku dalam penentuan pelaksanaan wajib lapor. Umumnya eks tapol PKI Pekalongan dikenakan wajib lapor sebulan sekali. Ada juga yang diwajibkan seminggu sekali. Tetapi ada juga yang mendapatkan aturan bahwa setiap saat dibutuhkan maka eks tapol tersebut harus segera menghadap³⁴. Kebijakan wajib lapor merupakan tindakan yang dapat dikatakan sebagai bentuk penahanan rumah.

4. Bagi Partai lain

Pasca jatuhnya Soekarno, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Soeharto, TAP MPRS RI No. XXV/MPRS/1966 digunakan sebagai upaya konsolidasi dan mobilisasi para pendukung Orde Baru. Pemilihan umum yang sebelumnya dijadwalkan selambat-lambatnya pada 5 Juli 1968, diundur sampai tahun 1971. Pengunduran jadwal pemilu disebabkan belum stabilnya kondisi politik dan belum tuntasnya pembersihan golongan komunis di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Pemilu diselenggarakan pada 3 Juli 1971 dan ini merupakan pemilihan umum kedua dalam sejarah Indonesia³⁵. Jumlah partai dan organisasi yang mengikuti Pemilu 1971 dan Pemilu 1955 mengalami penyusutan.

³⁴Wawancara dengan Bapak Suharto, Mantan anggota IPPI, tanggal 12 Desember 2011.

³⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973*, (Jakarta: Cipta Lamtoro Gung Persada, 1985), hlm. 219-220.

Pada Pemilu 1971, diikuti oleh 10 partai politik³⁶. Eks tapol Pekalongan beralih mendukung partai politik yang berlaku, hal ini tidak terlepas dari dilarangnya PKI di Pekalongan. Sikap ini diambil oleh masyarakat karena adanya rasa takut atas diskriminasi dalam berpolitik. Partai yang dipilih oleh masyarakat secara umum adalah Partai Golongan Karya (Golkar) yang merupakan partai Pemerintah³⁷.

³⁶Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Golongan Karya, Partai Kristen Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Nasional Indonesia, Partai Islam PERTI, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia.

³⁷Wawancara dengan Bapak Suharto, Mantan anggota IPPI, tanggal 12 Desember 2011.

BAB V

KESIMPULAN

Kota Pekalongan Tahun 1960 membangun sebuah basis komunis yang kuat di sebagian besar wilayah Kota Pekalongan, khususnya di Kelurahan Sampangan Kecamatan Pekalongan Timur yang terdapat banyak industri perbatikan. Di wilayah Sampangan terdapat banyak industri batik yang dikuasai oleh orang-orang Cina yang berideologi komunis. Para pekerjanya adalah orang-orang pribumi yang sebagian sebagai petani miskin dan petani penggarap yang tidak mempunyai tanah. Para pekerja atau buruh ini di iming-imingi akan diberi tanah yang subur bila mereka mengikuti ideologi komunis. PKI beserta BTI dan para pekerja berusaha menguasai tanah luas dan subur yang dimiliki para tuan tanah, hingga mengakibatkan bentrokan dengan tuan-tuan tanah yang kebanyakan adalah orang-orang NU. Munculnya UU *Landreform* merupakan sarana tepat bagi PKI untuk mendapat dukungan petani. Masuknya unsur politik memicu adanya pergeseran pandangan di kalangan petani.

UU *Landreform* bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan memakmurkan petani, namun tahun 1960an terjadi depresi ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan krisis yang berkepanjangan disertai dengan musim kemarau panjang yang mengakibatkan persediaan beras berkurang dan kegagalan panen di beberapa tempat. Kondisi perekonomian semakin suram, mulai merosotnya nilai rupiah dan mengakibatkan melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, terutama sandang dan pangan. Kenaikan harga yang demikian tinggi dirasakan oleh petani

di Pekalongan karena harga beras dari pemerintah yang awalnya hanya Rp 1.000,00 menjadi Rp 2.000,00.

Sejak tahun 1950 sampai 1955 bangsa Indonesia menganut sistem multi partai, sehingga menimbulkan berbagai macam polemik atau perpecahan di dalam masyarakat Indonesia. Penyebab timbulnya konflik adalah kebebasan mengembangkan partai politik dan adanya faktor perbedaan ideologi dasar dari partai-partai yang ada. Sebagai contoh, tahun 1952, NU keluar dari Masyumi, mendirikan partai sendiri, di samping itu Masyumi harus menghadapi lawan politiknya yaitu PKI dan PNI. Menghadapi Pemilu 1955, semua partai politik di Pekalongan berlomba-lomba untuk memperkenalkan dan menonjolkan partainya agar mendapat suara banyak.

Pemilu 1955 menghasilkan partai-partai yang besar yaitu PNI, NU, PKI, dan Masyumi. PKI memperoleh suara minoritas dan menduduki posisi ketiga di Pekalongan dengan 2.507 pemilih. Partai NU sekitar 6.057 pemilih, PNI 17.947 pemilih, jadi NU juga berkembang pesat di daerah Pekalongan di bawah PNI. Sejak pemilu 1955-1965 penduduk Pekalongan terbagi atas tiga kekuatan politik besar yang saling bersaing dan berkonfrontasi, terutama dalam usaha menggalang massa petani.

Keberhasilan PKI mempengaruhi berbagai organisasi massa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap lawan-lawan politiknya. Setiap adanya rapat-rapat organisasi, PKI juga melakukan hasutan-hasutan dan demo yang mengakibatkan bentrokan dengan lawan politiknya, sehingga menimbulkan ketidaksenangan dan kebencian lawan politiknya. Secara

umum wilayah-wilayah yang dipilih menjadi basis komunis adalah daerah perindustrian di Kota Pekalongan. Seperti perindustrian di Jalan Sultan Agung, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pintu Dalam, dan Jalan Haji Win yang berada di Kelurahan Sampangan, dimana industri batik dimiliki oleh saudagar Cina. Sebagian besar pekerja adalah orang-orang pribumi. Pendeknya pola pikir yang dimiliki pekerja dan tidak terjamahnya daerah Sampangan oleh tokoh-tokoh agama sehingga dengan mudah paham komunis tumbuh dan berkembang.

NU di bawah kepemimpinan K.H. Abdul Wahab Hasbullah memberi tempat khusus bagi pemuda untuk mengembangkan wawasan keagamaan dan kebangsaan. Pelbagai kegiatan dilaksanakan, mulai dari kegiatan kepemudaan yang berlatar pendidikan, keagamaan dan sosial. Organisasi kepemudaan ini lahir dalam situasi dan kondisi sosial yang cukup kacau dan mereka bergabung dengan berbagai kalangan, namun tetap dalam satu tujuan yakni mempertahankan Tanah Air dari belenggu penjajah. Organisasi pemuda ini dinamakan Ansor Nahdlatul Oelama (ANO), nama ini menjadi cikal bakal dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang menjadi badan otonom NU. Kegiatan utama GP Ansor adalah kaderisasi para pemuda dan mengembangkan wawasan kebangsaan serta keagamaan. GP Ansor mengembangkan gerakan kepanduan dimana anggotanya adalah orang-orang Ansor, mereka menyebut sebagai Banoe (Barisan Ansor Nahdlatul Oelama) yang mulai tahun 1962 dikenal dengan nama Banser (Barisan Ansor Serbaguna).

Setelah Banser terbentuk kemudian dilakukan gerakan *Riyadloh Bathin* atau latihan-latihan bathin yang berupa amalan-amalan baik yang dilatih oleh para kyai dengan tujuan untuk mendapatkan kekebalan dan kekuatan, amalan tersebut

berupa: puasa, sholat, berdoa, dan zikir. *Riyadloh Bathin* diiringi dengan *Riyadloh Badaniyah* atau latihan-latihan fisik berupa olah raga, pencak silat, dan karate. Dengan modal latihan-latihan yang telah diberikan oleh para kyai, maka Banser bersama-sama dengan ABRI melakukan penumpasan PKI di Kota Pekalongan. Rapat akbar merupakan langkah awal perjuangan umat Islam yang bekerjasama dengan umat Katolik. Lalu NU mengadakan pengajian untuk umat Islam seluruh Pekalongan yang bertempat di alun-alun Pekalongan dan di lapangan Sorogenen. Selanjutnya para pemuda Islam tanpa dikomando mereka melakukan operasi pembersihan PKI dengan menguasai jalan-jalan, membakar markas-markas, mengobrak-abrik dan menjarah rumah-rumah/toko-toko orang-orang komunis yang berada di Jalan Progo dan di Jalan Wahidi, gedung Merdeka, gedung Cung Hwa Cung Hwi (sekarang SMA 1 Pekalongan).

GP Ansor menyerukan kepada semua anggotanya untuk tegak berdiri di belakang Soekarno dan mempertinggi kewaspadaan dengan menjauhkan diri dari provokasi-provokasi yang dapat menyeret GP Ansor kedalam Aksi Kontra Revolusioner G-30-S. Pucuk pimpinan GP Ansor juga menginstruksikan untuk terus mengadakan kontak dengan pimpinan, atasan, dan dengan alat Negara. GP Ansor meminta anggotanya agar bersama-sama pihak ABRI untuk memulihkan keamanan dan menjaga keutuhan bangsa serta menyelamatkan revolusi di bawah pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Pahlawan Islam dan Kemerdekaan, Presiden Soekarno. Untuk itu, dalam rangka menumpas G-30-S dan antek-anteknya, para anggota GP Ansor diharap menunggu dan hanya

melaksanakan instruksi dari pimpinan koordinasi Jama'ah NU yang telah dibentuk di pusat dan yang akan dibentuk di daerah.

Pasca penumpasan PKI, Kota Pekalongan secara umum masih dikuasai oleh partai PNI karena PNI memiliki mayoritas pendukung yang tinggi. Namun untuk pemerintahan tingkat kecamatan golongan NU atau Pemuda Ansor memiliki peran yang meningkat dalam pemerintahan karena PKI sudah tidak dipercaya dalam menduduki jabatan dalam pemerintahan. Orang-orang GP Ansor terus bekerja sama dengan Hanra, Koramil, Kepolisian Distrik, dan Kodim di Kota Pekalongan untuk menindak tegas penduduk yang dianggap terlibat gerakan G30S/PKI atau eks anggota PKI dan berkoordinasi untuk menetralsir situasi pasca penumpasan PKI dengan melakukan kewaspadaan agar aksi-aksi PKI tidak kembali terjadi. Selain meningkatkan kewaspadaan dalam hal keamanan Gerakan Pemuda (GP) Ansor juga mengadakan perbaikan dalam bidang spiritual masyarakat Kota Pekalongan dengan mengadakan pengajian-pengajian di berbagai daerah di wilayah Kota Pekalongan agar meningkatkan keimanan dan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan.

Partai NU memanfaatkan media massa untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang penumpasan PKI dan keamanan wilayah Kota Pekalongan. NU juga semakin kuat dalam bidang politik, dan memiliki massa pendukung yang banyak untuk menghadapi pemilu 1971, hal ini tidak terlepas dari peranan media massa. Masyarakat Kota Pekalongan mengalami trauma dan tekanan psikologis karena ketakutan akan peristiwa penumpasan PKI. Wajib lapor bagi eks tapol, dan mantan eks tapol beralih ke partai politik yang diakui.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip :

Surat Instruksi PW GP Ansor Jawa Tengah tanggal 18 oktober 1964 kepada PC GP Ansor se-Jawa Tengah untuk secara aktif memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga yang terganggu oleh organisasi buruh tani Indonesia tahun 1964.

Surat laporan tanggal 29 oktober 1965 dari GP Ansor Kota Praja Pekalongan kepada PP GP Ansor tentang peristiwa penganyangan G 30 S/PKI.

Surat dari Komando Resor Militer 071 Widjajakusuma Komando Distrik Militer 0710 tanggal 30 desember 1965, yang berisi tentang laporan situasi daerah Komando Distrik Militer 0710 Pekalongan.

Surat Keputusan PD/PRT Gerakan Pemuda (GP) Ansor tahun 1968.

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Djawa Tengah, daftar laporan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Djwa Tengah 1969.

Buku :

Aceng Abdul Aziz, dkk., *Islam Ahlussunnah Waljama'ah di Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Dinamika Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Pustaka Ma'arif NU, 2007.

Agus Sunyoto, dkk., *Banser Berjihad Menumpas PKI*, Tulungagung: Lembar Kajian dan Pengembangan PW. GP. Ansor Jawa Timur dan Pesulukan Thoriqoh Agung, 1996.

Aminudin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965*, Yogyakarta: Jendela, 2001.

Arbi Sanit, *Badai Revolusi, Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Bruinessen, Martin van, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Sala: Jatavu, 1985.

_____, *Gerak Langkah Pemuda Ansor Seputar Sejarah Kelahiran*, Jakarta: PT Duta Aksara Mulia, 1996.

- Cribb Robert, *The Indonesian Killings of 1965-1966 Studies from Java and Bali*.
a.b. Erika S. Alkhatab dan Narulita Rusli, *The Indonesian Killings
Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, Yogyakarta:
Matabangsa, 2004.
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung: Renaja Rosdakarya, 2000.
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik jilid I*, Medan: Dwipa, 1965.
- Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1999.
- Einar M. Sitompul, *NU dan Pancasila*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1989.
- Fajar Pratikto, *Gerakan Rakyat Kelaparan Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*,
Yogyakarta: Media Pressindo, 2000.
- Fealy, Greg, *IJTIHAD POLITIK ULAMA Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta:
LKiS, 2003.
- Frederick, William H dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum
dan Sesudah Revolusi*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Feillard, Andree, *Islam et Armee Dans L'indonesie Contemporaine Les Pionniers
de la Tradition*, a.b. Lesmana, *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi,
Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Feith, Hebert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: KPG (Kepustakaan
Populer Gramedia), 1999.
- Gottschalk, Louis, *Underestanding History*, a.b Nugroho Notosusanto, *Mengerti
Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Depertemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1996.
- Hermawan Sulistiyo, *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal
yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965—1966)*, Jakarta: Kepustakaan
Populer Gramedia, 2000.
- Jalmi Salmi, *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru dalam Melihat Hak-
Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: komite untuk anti kekerasan (KUAK)
dan Pustaka Pelajar, 2003.

- Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khithah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 1995.
- Lucas, Anton E, *One Soul One Struggle: Peristiwa Tiga Daerah dalam Revolusi Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2004.
- Lyon, Margo L., *Dasar-Dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa, dalam Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.
- Muhamad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi Politik Kaum Muda*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Nasrudin Hars, dkk, *Profil Provinsi Republik Indonesia "Jawa Tengah"*, Jakarta: PT Intermasa, 1992.
- Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999.
- Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma dalam Pemikiran dan penulisan Sejarah*, Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1988.
- _____, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- _____, *Sejarah Indonesia 1200-2004*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Rinto Tri Hasworo, *Penangkapan dan Pembunuhan di Jawa Tengah setelah G-30-S*, dalam John Roosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid, *Tahun yang Tak Pernah Berakhir. Memahami Pengalaman Korban 65. Esai-esai Sejarah Lisan*, Jakarta: ELSAM, Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2004.
- Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Sensus Penduduk 1961, *Penduduk Desa Jawa Buku II Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pusat Penelitian Dan Studi Kependudukan UGM dan BPS, 1980.

- Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah sebagai Ilmu*, Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1966.
- Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *ANTOLOGI NU: Sejarah-Istilah-Aamaliah-Uswah Buku I*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Soelistiyawati Ismail, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sugiyanto Padmo, *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*, Yogyakarta: Media Pressindo dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2000.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.
- Tim, *Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 6*, Jakarta: Cipta Adi Pusaka, 1989.
- _____, *Kabupaten Pekalongan dalam Angka 1974*, Kantor Statistik Kabupaten Dati II Pekalongan, 1974.
- _____, *Kerusuhan di Pekalongan Jawa Tengah*, Yogyakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004.
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1972.

Skripsi

- Dewi Puji Lestari, ``Peranan Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam oprasi Pembersihan PKI di Ceper, Klaten Tahun 1965``, *skripsi*, Yogyakarta: FISE UNY, 2008.
- Dwi Indiasuti, ``penumpasan PKI di Desa Lanjaran, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali tahun 1965--1979``, *skripsi*, Yogyakarta: FISE UNY, 2010.
- Kuncoro Hadi, ``Penghancuran PKI (Studi Tentang Aksi Kekerasan di Jogonalan Klaten Tahun 1965-1971)``. *Skripsi*, Yogyakarta: FISE UNY, 2009.
- Slamet Jubaidi, ``Peranan GP Ansor Dalam Penumpasan PKI Di Ngawi Jawa Timur (1965-1966)``, *skripsi*, Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2002.

Surat Kabar Sejaman :

Suara Merdeka, 06 Oktober 1965.

_____, 12 Oktober 1965.

Internet :

[http://www. Pekalongankab.go.id](http://www.Pekalongankab.go.id). Diakses pada tanggal 14 Desember 2011.

<http://www. Pekalongankod.go.id>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2011.

DAFTAR INFORMAN

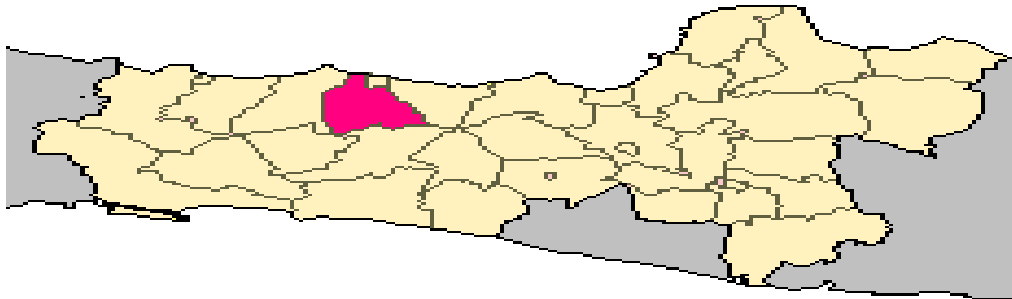
NO	NAMA	ALAMAT	UMUR	JABATAN
1	H. Mahmud maskur	Kauman Gang 10.32 Jl. Wahid Hasyim	71 Tahun	Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor 1965
2	H. Nurzen tho`at	Jl. Raya Kranji No.11 Kedungwuni	70 Tahun	Anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor 1965
3	Ngisam kholil	Podosugih, Pekalongan	68 Tahun	Anggota Rohis NU
4	Abdul halim	Slambaran, Pekalongan	73 Tahun	Anggota ABRI
5	H. Mostofa bakri	Jenggot, Pekalongan	77 Tahun	Ketua NU 1965
6	Shohid aldin	Buaran Pekalongan	67 Tahun	Anggota Rohis NU
7	Suharto	Kraton, Pekalongan	66 Tahun	Anggota IPPI
8	Subadi	Podosugih, Pekalongan	70 Tahun	Anggota PNI
9	Suhartono	Jl. Mulia, Pekalongan	90 Tahun	Anggota ABRI
10	Zailani	Jl. Pembangunan, Pekalongan	68 Tahun	Warga asli Pekalongan

LAMPIRAN

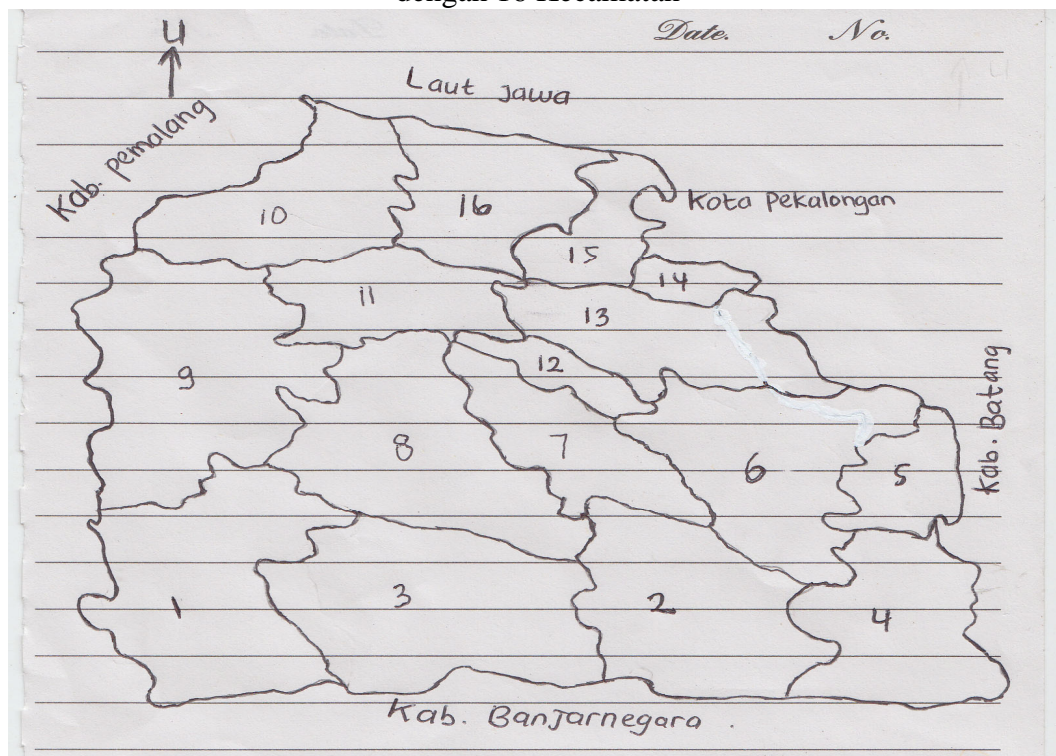
LAMPIRAN 1

Peta Jawa Tengah

Yang bertanda merah adalah wilayah Kabupaten dan Kota Pekalongan



Peta Kabupaten Pekalongan dengan 16 Kecamatan



Kecamatan:

- | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1. Kandangserang | 6. Doro | 11. Bojong | 16. Wiradesa |
| 2. Paninggaran | 7. Karanganyar | 12. Wonopringgo | |
| 3. Lebakbarang | 8. Kajen | 13. Kedungwuni | |
| 4. Petungkriyono | 9. Kesesi | 14. Buaran | |
| 5. Talun | 10. Sragi | 15. Tirto | |

Sumber: Tim, *Kabupaten Pekalongan dalam Angka 1974*, Kantor Statistik Kabupaten Pemerintah Dati II Pekalongan, 1974.

LAMPIRAN 2

Peta Kabupaten Pekalongan
dengan 19 Kecamatan



Sumber: [http://www.pekalongankab.go.id/images/stories/Peta Wilayah/peta_kab.pekalongan.jpg](http://www.pekalongankab.go.id/images/stories/Peta_Wilayah/peta_kab.pekalongan.jpg). Diakses pada tanggal 14 Desember 2011

LAMPIRAN 3

**Peta Kota Pekalongan
dengan 2 Kecamatan**



Keterangan Peta: -+--+ : Batas Kotamadya, -.-.- : Batas Kecamatan, ----- : Batas Kalurahan, : Sungai/Kali

Kecamatan Pekalongan Barat

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Panjangwetan | 11. Kebulen |
| 2. Kandangpanjang | 12. Kergon |
| 3. Dukuh | |
| 4. Kraton Lor | |
| 5. Kraton Kidul | |
| 6. Kramatsari | |
| 7. Bendan | |
| 8. Podosugih | |
| 9. Medono | |
| 10. Kebulen | |

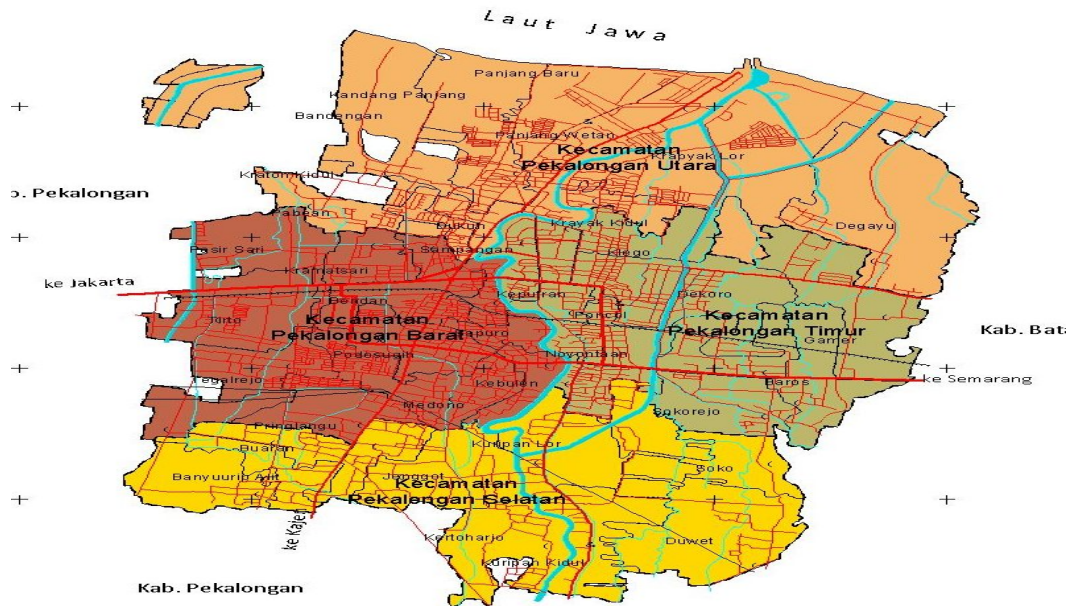
Kecamatan Pekalongan Timur

- | |
|-------------------|
| 13. Krapyak Lor |
| 14. Krapyak Kidul |
| 15. Klegon |
| 16. Poncol |
| 17. Sugihwaras |
| 18. Sampangan |
| 19. Kauman |
| 20. Keputran |
| 21. Noyontaan |
| 22. Landungsari |

Sumber: Tim, *Kotamadya Pekalongan dalam Angka 1981*, Kantor Statistik Kodya Pemerintah Dati II Pekalongan, 1981.

LAMPIRAN 4

Peta Kota Pekalongan dengan 4 Kecamatan



1. Kecamatan Pekalongan Utara
2. Kecamatan Pekalongan Barat
3. Kecamatan Pekalongan Timur
4. Kecamatan Pekalongan Selatan

Sumber: http://www.pekalongankod.go.id/images/stories/Peta_Wilayah/peta_kod.pekalongan.jpg. Diakses pada tanggal 14 Desember 2011.

LAMPIRAN 5

Surat Instruksi PW GP Ansor Jawa Tengah tanggal 18 oktober 1964 kepada PC GP Ansor se-Jawa Tengah untuk secara aktif memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga yang terganggu oleh organisasi buruh tani Indonesia tahun 1964.

PIMPINAN WILAJAH
GERAKAN PEMUDA ANSOR DJAWA-TENGAH
Alamat: Djl. Erlangga-Tengah III/15 Semarang

No : PW/104/B/X/64.
Lampiran: --
Perihal : Instruksi.-

Semarang, 8 Oktober '64

K e p a d a ,
Jth: Sdr. Pimpinan Tjabang G.P.
Ansor Se Djawa-Tengah.

Assalamuallaikum W. W.

Berkenaan dengan pada akhir2 ini sering terdjadi gangguan-gangguan yang menimpa warga kita dikalangan para petani yang dilakukan oleh pihak B.T.I. seperti misalnya yang terdjadi di daerah Kendal, Pemalang dan dilain2 tempat di Djawa-Tengah berupa perampasan tanah setjara paksa dan sebagainya.

Maka Pimpinan Wilajah G.P. Djawa-Tengah memandang perlu untuk menginstruksikan kepada Tjabang2 G.P. Ansor agar setjara aktif memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga kita yang terganggu oleh pihak B.T.I. dengan perlawanan yang setimpal, demi untuk mengikis habis kaum kontra revolusi yang dholim dan aktivitas kita ini adalah ditudjukan guna membantu Pemerintah didalam merealisasikan pelaksanaan Landreform dan U.W.P U2U: P.B.H. setjara consequent dan djudjur.-

Demikianlah instruksi kami untuk didjadikan perhatian sepenuhnya dan atas perjuangannya Sdr2. kami doakan semoga succe amien.-

Wabillahir taufiq wal hidajah.-

Ketua ,

t.t.d.

(SODERI SISWODARSONO).-

Wassalam,
Pimpinan Wilajah G.P. Ansor
Djawa-Tengah,
Sekretaris,
(A. Wahab Djaelani).

Tindakan disampaikan kepada:

- 1-P.B.N.U. di Djakarta.
- 2-P.P- G.P. Ansor di Djakarta.
- 3-P.W.N.U. Djawa-Tengah dan segenap nevennja di Semarang.
- 4-Tjabang2 N.U. se Djawa-Tengah.
- 5-Segenap Pimpinan Wilajah G.P. Ansor Djawa-Tengah.
- 6-Arsip.-

(Col:-Type imbs).

Sumber: Perpustakaan dan Kearsipan Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN 6

Surat laporan tanggal 29 Oktober 1965 dari GP Ansor Kotapraja Pekalongan kepada PP GP Ansor tentang peristiwa pengganyangan G 30 S/PKI.

Pimpinan Tjabang Gerakan Pemuda
Ansor
KotaPradja Pekalongan

Alamat : Djl. Ra. Kartini no. 65

4 Rajab 1385H
Pekalongan , 29 Oktober 1965 H.

Kepada Jth :

Nomor : PT/048/A/GPA/X/1965.

Lamp.-

Hal : Laporan kegiatan/
pengganyangan G.30.S

Petunjuk Pimpinan
Gerakan Pemuda ANSOR
Djl. Kramat Raya 160
di DJAKARTA.-

Assalamualaikaum wr.wb

Kami pimpinan cabang Gerakan Pemuda ANSOR Kotapraja Pekalongan dengan ini memberikan laporan2 kegiatan pengganyangan terhadap yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September” dengan “Dewan Revolusinya” di Pekalongan sebelum dan sesudah tanggal 1 Oktober 1965, sebagai berikut:

1) a. Tanggal 1 Oktober 1965 :

Djam 20.00 dirumah kediaman walikota KDH Pekalongan akan dibuka rapat anggota R.P.H. Koore Pekl., tiba2 masuk 2 orang anggota/tokoh2 (ketua2 PKI), masing2 Naktub Hadi dan Sugeng. Tokoh PKI Pekalongan ter.berkata bahwa, Dewan Djendral akan mengadakan coup terhadap PNI Presiden tapi digagalkan oleh Dewan Revolusi dibawah pimpinan Letkol Untung komandan jen. Tjokrobirowo dan Bung Karno diselamatkan olehnya.

b. Seteruanya dia berkata, bahwa daerah Jawa Tengah telah mendukung Dewan Revolusi, maka tanpa ragu dia mengajak walikota atas nama Front nasional untuk menyelenggarakan rapat umum pada tanggal 2 Oktober 1965 guna mendukung dewan revolusi di Kota dan Kabupaten Pekalongan.

c. Pada hari itu walikota Pekalongan dan para anggota NU belum mendengar sendiri keterangan dari Djakarta disebabkan sudah 15 hari tidak ada aliran.

d. Ajakan PKI/Naktub Hadi teb. ditolak oleh angota NU H.A. Ghany Saimun (Ketua GP Ansor Kopra.Pekalongan) dengan alasan bahwa sampai detik itu dari partai belum ada instruksi dari atasan apalagi belum mengetahui, dengan maksud Dewan Revolusi yang katanya telah menyelamatkan Negara dan Bung Karno.

e. Walikota sependapat untuk tidak mengamil keputusan sebelum ada penegasan dari atasan.

f. Sdr. Naktub dan Sdr. Sugeng terus meninggalkan rumah Walikota pada jam 21.00 dan kemudian walikota memerintahkan HA Ghani Saimun

- untuk segera berangkat ke Semarang guna mengamankan konsultasi dengan tingkat 1 Jawa Tengah. Ternyata sampai hari tanggal 2 oktober 1965 pagi itu Semarang dikuasai oleh Dewan Revolusi, tapi baru kira2 jam 10.00 dapat direbut kembali oleh Pangdam Diponegoro.
- g. Sejak tanggal 1 Oktober 1965. PR aktif mengadakan penjagaan dengan bersenjata api lengkap namun kemudian oleh G.Ansor/NU dimintakan untuk dicabut bagi mereka yang memegang senjata api kecuali angkatan bersenjata. Sebab sejak itu anggota Hansip/OPR semua dilucuti senjatanya kecuali dari Hansip/OPR/Veteran yang seidiologi dengan mereka kemudian permintaan tersebut dikabulkan oleh pihak yang berwajib.
- h. Perlu dilaporkan bahwa sejak itu alat negara yang dapat kami dekati (bekerjasama) hanyalah Brimob/ angkatan kepolisian, adapun dari tentara/militer (kodim 0710) tidak ada kekompakan karena sebagian dari kepala stafnya diduga terlibat dalam apa yang dinamakan G.30.S. Hal ini sangat jelas pada waktu mereka keliling mengadakan pengawasan selalu memperkeras pengawasan terhadap pihak kami, bahkan ada yang sampai mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan pendirian pemerintah (mendukung Gestapu)

(II)

- 1) Dalam pertemuan dengan anggota RPH dirumah walikota itu, oleh Sdr. Maktub Hadi(PKI) juga telah disodorkan kepada kami suatu susuna (Konsep) dari apa yang mereka namakan Dewan Revolusi, didalam tertera nama2 dan tokoh2 NU antara lain J.M.K.H. Fattach Jasin, rachmadan, Jahja Ubaid SH oleh HA Ghany Saimun pencantuman tokoh2 NU tsb.tidak dibenarkan.
- 2) Tanggal 2 Oktober 1965:
Mulai tanggal 2 Oktober 1965 segera kami perintahkan kepada ranting/anak cabang untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan combad-ready dalam satu barisan yang kokoh kuat untuk mempertahankan bila mereka mengadakan penyerangan, bahkan bila perlu menyerang kami benarkan.
Demikian pula cabang memindahkan kantor darurat yang dibuka dari jam 19.00 a/d 6.00 pagi.
- 3) Tanggal 3 Oktober 1965:
 - a. 3 Oktober 1965 jam 8.00 pagi : Front nasional cabang Kopra.Pekalongan 1945 yaitu perlawanan/pertempuran masyarakat Pekalongan melawan tentara fasis jepang dihalaman gedung pemuda Pekalongan (S.S.Hotel) dan sekitarnya dalam upacara perigatan tsb mengeluarkan peraturan untuk tetap berdiri dibelakang P.J.H. Presiden, pembesar, pangli ABRI, pahlawan Islam dan kemerdekaan Bung Karnodan mengutuk apa yang dinamakan GESTAPU/Dewan Revolusi. Dalam peringatan itu PKI tidak mau ikut menanda tangani, karena tidak setuju mengutuk G.30.S.

b. Mulai tanggal 3 Oktober 1965 corat-corek pamflet disana sini bertebaran yang isinya mengganyang GESTAPU/PKI dengan ormas-ormasnya.

c. Malam 3 Oktober 1965 umat Islam yang terdiri dari parpol (NU,PSII) dan ormas Islam di Pekalongan yang dihadiri pula dandim (Kodim) Pekalongan AKB. Polisi Drs. Tunggul.

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kebulatan tekad umat Islam tetap berdiri dan setia kepada Bung Karno, bersyukur atas keselamatan beliau dan Menkohankam Djend. Nasution dan belasungkawa atas guurnya para pahlawan revolusi serta berterima kasih atas kesigapan dan jasa mayor Jendral Suharto yang telah menyelamatkan Negara dan Presiden.

Juga akan meyenggarakan appel umat islam pekalongan menggayang Gestapu dan antek-anteknya. Tapi sekiranya appel/rapat raksasa tersebut diikuti pula oleh parpol dari ormas-ormas non komunis (PNI, Partai Katolik, dan IPKI). Rapat raksasa mengganyan Gestapu PKI/Aidit diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 1965 jam 15.00 dilapangan Sorogenen pekalongan.

4) Tanggal 5 Oktober 1965: upacara peringatan hari ABRI digagalkan semua acaranya kecuali hanya jiarah ke makam taman pahlawan Pekalongan. Demikian pula peringatan hari ulang tahun devisi Diponegoro juga digagalkan.

5) Mulai 3 Oktber 1965 pimpinan cabang mengadakan piket nonstop di kantor darurat yaitu di K.U.A.DU Pekalongan tepl.02.

6) Tanggal 8 oktober 1965 GP Ansor beserta warga NU Kopra.Pekalongan menyelenggarakan solat ghoib di masjid jami` Pekalongan.

7) Tanggal 15 Oktober 1965 jam 15.00 dilapangan pelajar Sorogenen diselenggarakan rapat raksasa mengganyang Gestapu/PKI/Aidit. Rapat raksasa tsb diselenggarakan oleh panitia aksi pengganyangan G.30.S yang diketuai H.Ridwan (NU). Berbicara dalam rapat umum yang dihadiri oleh kurang lebih 1.000.000 orang tsb antara lain walikota, kodim 0710, kepala polisi Kopra.Pekalongan dan tokoh-tokoh partai nasional yang diwakili oleh Umar Suparman (PNI), dan H.Ridwan (NU) akir dari rapat umum tsb. Dikeluarkan pernyataan yang antara lain menuntut dibubarkannya PKI dan ormasnya. Kemudian pengujung rapat raksasa tsb dengan teratur terpecah menjadi dua yang pertama menuju kekantor G PKI/PR dijalan Progo (hancur/robok) dan alat-alat Drum band dibakar oleh demonstiran sedang rombongan yan kedua menuju kekantor PKI yang berada dijalan Dr. Wahidin (hancur dibakar) menjadi demonstiran pula ialah kantor IPPIK, PPSMI, PPI, musuh-musuh tokoh PKI, Baperki, dan tokoh-tokoh PKI.

Sebelum rapat umum tanggal 14 Oktober 1965 jam 24.00/keadaan yang baik antara kepolisian/brimop dengan Ansor telah digerebeg kedua kantor PKI dan rumah-rumah tokoh-tokohnya. Dalam

penggrebegan tsb ditemukan sejumlah senjata tajam dikantor PKI jln. Dr.Wahidin 2 buah kelewan/

- 8) Akses dari pada adanya move rapat raksasa yang sukses itu didaerah-daerah terjadi tindakan2 pembakaran pengrusakan terhadap rumah-rumah/toko-toko orang2 PKI dan bangsa Tionghoa.
Sebagian dari pengrusakan itu telah digunakan oleh pihak laen untuk mengail ikan di air keruh, terbukti dianak cabang buaran pengrusakan tersebut mengakibatkan hilangnya barang-barang yang ternyata telah tertangkap orang BTI/PKI oleh ABRI (tentara) bahwa pengrusakan tsb termasuk kriminalisme.
- 9) sejak dibubarkanya PKI/Baperki dan orang-orang bawahannya oleh ABRI mereka diharuskan apel setiap pagi dari jam 8.00 s/d 10.00.
sebagian dari rantingnya telah membubarkan diri dan keluar dari keanggotaan PKI.
- 10) Mulai tanggal 26 Oktober 1965 tokoh PKI/PR/Gerwani/Baperki ditangkapi oleh nagkatan kepolisian dan staf kodim 0710 yang diduga tersangkut dengan apa yang menamakan dirinya G.30.S juga ditangkap dan dibawa ke Pangdam Jawa Tengah.
- 11) Tanggal 28 Oktober 1965 : GP Ansor memelopori mengadakan hari sumpah pemuda yang diselenggarakan di gedung Pendopo Pekalongan dalam peringatan tsb dikeluarkan pernyataan dan oleh Front pemuda cabang Kopra Pekalongan mulai tanggal 28 Oktober 1965 telah dipecat untuk sementara dari kenaggotaan Front pemuda Kopra.Pekalongan dan aktifisnya yang di pecat ialah (PR, MI, IIP, PPI, dan PPSMI)
- 12) Sampai laporan ini kami buat oleh angkatan kepolisian/brimob terus menerus dilakukan pengrebegan siang dari rumah-kerumah dan kampung yang didalamnya terdapat orang-orang PKI.

Demikianlah laporan kami, semoga menjadikan maklum dan perhatian dalam menghadapi situasi dewasa ini di PKI.

Wabillahitaufiq walhidayah

Ketua

Wassalamualikum wr.wb
Pimpinan cabang gerakan Pemuda
Ansor
Kotapraja Pekalongan
Sekretaris

Noot: Perlu kami tambahkan disini bahwa selama ini tidak ada jatuh korban dikedua belah pihak

Sumber: Perpustakaan dan Kearsipan Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN 7

Surat dari Komando Resor Militer 071 Widjajakusuma Komando Distrik Militer 0710 tanggal 30 desember 1965, yang berisi tentang laporan situasi daerah Komando Distrik Militer 0710 Pekalongan.

Komando Resor Militer 071
Widjajakusuma
Komando Distrik Militer 0710

Tjuplikan dari :
Laporan Situasi Daerah

Komando Distrik

Militer 0710 Pkalongan

KEAMANAN

1. GANGGUAN KEAMANAN YANG RETENDENS POLITIK

Dalam triwulan pertama tahun 1966 gangguan keamanan yang bertendens politik adalah merupakan epilog dari kontra revolusi Geestrok.

1.1 Peristiwa pengambilan alih gedung sekolah asing milik warga negara RRT, di desa Grogolan Pekalongan Timur pada tanggal 22-03-1966 jam 07.30 yang dilakukan oleh sekolah SMA dan SPG. Dengan menggunakan organisasi Kodjarsena pimpinan dari pada guru-guru SMA sdr. SETIADJI dan sdr. SETIADI tanpa menimbulkan korban manusia ataupun kerusakan gedung, hanya corat-coret pada tembok serta semua buku-buku pelajaran di dikeluarkan dari dalam kelas. Peristiwa tersebut segera dapat di ambil tindakan oleh pihak ABRI. Dalam hal ini anak-anak serta pimpinannya di bawa ke kodim 99 Pekalongan. Tindakan PEPEKUPER semua corat-coret tembok sekolah supaya dibersihkan kembali, oleh anak-anak yang turut gerakan tersebut dan pemimpinnya diadakan pengusutan selanjutnya, sedangkan sekolah harus tetap di buka seperti sedia kala.

Latar belakang dari kejadian tersebut adalah ambisi dari suatu golongan politik partai nasional OSA-USEP yang rupanya sedang menonjolkan diri untuk menarik perhatian pada masyarakat.

1.2 Peristiwa tanggal 6 April 1966 terjadi pengrusakan dan pencabutan papan nama partai dari P.N.I., G.S.N.I., KBM dan persatuan wanita Marhern di kota Pekalongan oleh anggota-anggota KAPPI dan KAMI yang bergabung dalam rombongan MANARIF ROMHMAN HAKIM sekembaknya dari Solo dan bermalam di Pekalongan. Bentrokan timbul antara golongan pemuda Marhern (ALI) dan golongan pemuda pelajar yang tergabung dengan golongan KAPPI atau KAMI Jakarta tindakan PEPEKEPER dapat di selesaikan dengan musyawarah untuk mengembalikan suasana aman dan tertib dalam kota.

Peristiwa tanggal 7 April 1966 jam 08.00 terjadi pengambilan alih gedung atau rumah kediaman TIONG HWA yang sudah diamankan GO JO HAN di jalan Sultan Agung No.109 yang dilakukan oleh KAPPI Pekalongan pimpinan sdr. Cherodji, syeh dan sdr. Imam Suripto. Tindakan PEPEKUPER pengusutan terhadap pimpinan dan semua pemuda pelajar yang turut pengambilan alihan rumah tersebut dikumpulkan di KODIM 0710.

Persoalan rumah yang diambil alih dengan disertai tanda serah terima dari KAPPI kepada KAP.GESTAPU (Front. Pancasila) untuk selanjutnya rumah tersebut diserahkan kepada PEPEKUPER.

Catatan : pelaksanaan penggunaan gedung tersebut akan di tinjau kembali.

- 1.3 Peristiwa tanggal 08-04-1966 sore terjadi didesa Baros, Batang dimana rombongan pemuda Marherns yang abis mengikiti rapat umum dalam mengaju Baggjo peresmian berdirinya Kab.Batang sesampainya di depan masjid desa Baros, Batang terjadi clash antara pemuda-pemuda Marhaenis dengan pemuda-pemuda dari GPANSOR. Kerusakan material: kaca-kaca jendela dari rumah desa Baros pecah-pecah akibat lemparan batu. Tindakan lempran dari PEPEKUPER pada tanggal 06-04-1966 telah pengumpulan pimpinan pengurus parpol cab. NU dan PNI tingkat Komad/Kab. Pekalongan dan Kab. Batang untuk diajak bersama-sama menjaga ketenangan/ ketertibann di daerah PEPEKUPER / Kab. Pekalongan.

2. GANGGUAN KEAMANAN YANG BERSIFAT KRIMINAL

Dalam triwulan I tahun 1966 adalah agak meningkat dengan adanya penggarongan yang bersenjata pada tanggal 2 Maret 1966 jam 22.00 terjadi penggarongan bersenjata didesa Depok (Ketj.Sragi) sehingga menimbulkan korban Mbok Lurah desa Depok meninggal dunia akibat tembakan dari penjahat tersebut. Kerugian material berupa radio Transister merk PHILIPS 12 batu-batery, 1 (saatu) kalung rante emas 24 karat seberat 25 gr. 1 (saatu) cincin rante emas 24 karat seberat 5 gr. 1 (satu) cincin bermata batu emas berat 5 gr. Dan 1 jaket kulit.

1.

TJUPLIKAN: LAPORAN SITUASI
DAERAH
KOMANDO
DISTRIK MILITER
0710
PEKALONGAN

II. KEAMANAN

Keamanan yang bertendens politik:

Keamanan yang bertendens politik daerah kopra/kab. Pekalongan selama dalam kwartal ke 4 tahun 1965 ini menunjukkan perkembangan keamanan yang naik, karena adanya peristiwa G. 30.S tanggal 30 September 1965, tetapi berkat kecepatan bertindak dari pihak kita dengan bantuan sebuah rakyat progresif revolusioner, maka hal-hal yang sangat tidak diharapkan tidak terjadi.

Dalam pelaksanaan seruan pimpinan Besar Revolusi untuk mengadakan tindakan pengamanan dan ketertiban umum, meskipun hasilnya tidak sempurna tetapi dengan adanya tindakan yang bijaksana dan tegas maka pengrusakan hanay berlangsung sebentar, dan suasananya segera kembali tenang dan tertib. Usaha-usaha memelihara keamanan dan ketertiban dalam rangka penumpasan G.30.S sampai ke akar-akarnya dengan secara kontine dengan cara operasi-operasi dan penggledahan-penggledahan.

-Dilihat dari segi militer sesungguhnya kekuatan G.30.S di dalam daerah kopra/kab. Pekalongan sudah tidak mempunyai arti apa-apa karena hampir 90 % oknum unsur pimpinnan daripada PKI/ dan ormas/ mantel sudah dilengkapi/ diamankan, sedangkan sisanya secara fisik maupun mantelnya sudah lemah, dan selamanya pikiran mereka di bayangi oleh rasa ketakutan-ketakutan (di tangkap) atau oleh kemungkinanya aksi masa.

-Sekalipun demikian untuk membersihkan sampai seakar-akarnya dari oknum G.30.S pepekuper Pekalongan dengan menggunakan pasukan gabungan ABRI, terdiri dari anggota kodim pasukan jon/ para mobrik/ printis, dan di bantu hansip, tetap pengadakan pembersihan dengan operasi sapu lidi, untuk mencari terutama dokumen-dokumen penting, senjata gelap, dan lainnya pula di daerah kecamatan.

-Dalam pelaksanaannya ini, terutama dalam operasi fisik kodim 0710 sendiri telah mengamankan 14 anggotanya terdiri dari 2 pama 9 Ba dan 3 Ta.

-Pada tingkat sekarang pelaksanaan operasi sampai pada tingkat operasi mental di samping masih dilaksanakannya operasi fisik secara insidentil dan operasi intelgence yang dalam tingkat pelaksanaan.

-Hingga sampai sekarang tanggal 30 Desember 1965 jam 10.00 ini tawanan G.30.S telah tercatat laki-laki 3009 orang, wanita 29 orang jadi jumlahnya ada : 3038 orang. Dan telah meninggal dunia di sebabkan sakit diare 206 orang.

-Dalam bidang keamanan/pertahanan telah kembali 34 orang dari ormas Nasa yang telah mengikuti latihan Garuda Pancasila yang diselenggarakan oleh peperda Jateng, dan 48 orang yang telah di selenggarakan oleh pepekuper pekalongan, masing-masing untuk latihan selama 2 minggu, dalam rangka pembubaran HANRA yang sedang dalam penyusunan.

2. Ganggguan keamanan yang bersifat kejahatan/ kriminalitet

2.1 Mengenal kriminal untuk daerah kita pada kwortal ke 4 tahun ini menunjukkan angka-angka yang sangat menonjol sekali.

2.2 Sebab musababnya daripada timbulnya kejahatan ini kemungkinan di karenakan meningkatnya harga bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari hingga kemampuan daya beli masyarakat kecil tidak ada.

- 2.3 Kecuali akibat tekanan ekonomi, kadang-kadang daerah kita juga merupakan suatu basis persembunyian bandit ulung (BU) pelarian dari daerah lain. Tindakan preventif kita telah mengadakan operasi bersama dengan pejabat setempat terutama dalam tingkat kecamatan.
- 2.4 Usaha-usaha kita guna mengatasi gangguan criminal ini ialah dengan jalan meningkatkan penjagaan yang pelaksanaannya kerjasama dengan petugas keamanan setempat. Begitu pula petugas-petugas keamanan setempat juga sering mengadakan razia terhadap desa-desa dan hutan –hutan yang memungkinkan di gunakan persembunyian mereka.

III. POLITIK

- a. 1. Jumlah organisasi partai politik di daerah kita. Semula sbb: PNI, PSSI, katolik, PKI, dan IPKI. adapun PKI berdasarkan keputusan perda No. 0064 beserta ormasnya di bekukan termasuk ormas Bapeki dan ormasnya.
2. Jumlah ormas yang ada didaerah kita semula sbb: pemuda Marhaenis, pemuda rakyat, pemuda Indonesia pemuda Ansor, pemuda katholik, adapun pemuda rakyat yang telah dibekukan sebagai ormas PKI.
3. jumlah gerakan wanita semula: wanita Marhaenis, wanita muslimat, wanita katholik dan gerwani, kecuali ormas Gerwani yang telah dibekukan sebagai ormas PKI.
4. Jumlah gerakan mahasiswa sbb: GMNI, MMI, dan PGM.
5. Jumlah gerakan buruh semula sbb: Buruh pancasila, Buruh Marhaenis, Sarbumusi, SOBSI, kecuali ormas sobri yang dibekukan sebagai ormas PKI.
6. Jumlah gerakan tani semula sbb: petani, petanu, dan NTI, kecuali ormas BTI yang telah dibekukan senagai ormas PKI.
- b. Perkembangan politik keluar
Perkembangan politik keluar dengan peristiwa G.30.S di daerah komad/kab. Pekalongan dari golongan nasionalis maupun agama mengalami kemunduran, seakan-akan hanya terpancang pada peristiwa G.30.S yang di dalangi oleh PKI sehingga menghilangkan jalannya politik yang di jalankan dan digariskan oleh masyarakat maupun oleh bapak presiden RI pemimpin besar revolusi Bung Karno.
- c. Perkembangan politik ke dalam
Perkembangan politik kedalam bahwa semenjak adanya peristiwa G.30.S perkembangan ke dalam politik kita kopra/ kab. Pekalongan sangat maju pesat, semangat dan kejengkelan dari golongan nasrani maupun agama dan ormasnya serta masyarakat lainnya yang progreif, revolusioner, sangat meluas sehingga tanggal 15 Oktober 1965 mengadakan rapat akbar di alun-alun Sorogenen. Hadir dalam rapat semua golongan partai ormas dari

golongan agama dan nasionalis, setelah selesai rapat maka demonstran pengganyangan terhadap gedung/ rumah, kantor-kantor dari gedung PKI dan ormasnya di dalam KOMAD, sehingga meluas sampai ke daerah-daerah, disamping itu semangat menggayang G.30.S terus berjalan dan membantu ABRI dalam usaha mengamankan orang-orang dari golongan KOM/ormas-ormas maupun simpatisan-simpatisannya yang aktif turut G.30.S

- Situasi politik menjadi gawat sekali dengan adanya gejala-gejala dari pihak sub versip yang akan menunggangi dari golongan pro maupun kontra sehingga ada tandatanda jagal-menjagal fitnah memfitnah.
- Golongan progresif revolusioner baik dari nasional maupun agama beserta ormasnya mulai tenang dan mengadakan konsolidasi masing-masing golongan nasional dan agama menyusun dan melebarkan sayapnya.
- Perkemangan orpo dan ormas yang tergabung dalam Front nasional pada umumnya sedang menghimpun dan menggagah persatuan yang progresif revolusioner dan aktif membantu ABRI.
- Sedangkan kegiatan partai politik di daerah kita pada dewasa ini sering melakukan musyawarah bersama, yang diteruskan dengan keputusan bersama untuk mendukung setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan besar revolusi Bung Karno, sedangkan di dalam mereka sedang konsolidasi segala bidang.
- Adapun problem baru adalah gejala-gejala perbuatan anggota dan usaha-usaha keekstrem kanan.
- Dalam rangka melaksanakan komando dwikora oleh presiden, maka untuk meningkatkan konfrontasi terhadap nekolim maka sekalipun kita mendapat tusukan dari belakang, namun tidak mengakibatkan kelemahan kita, kita bahkan lebih ulet lagi untuk menghadapi segala kemungkinan sebab kita sudah tidak ada fitnah dan tidak mengadu domba antara rakyat dan pemerintah.

Sebenarnya dengan yang asli

Yang menurun

SEM TJAB 71

RORAH

Pekalongan 30 Desember 1965

DANDIM 0710 SELAKU

PEPEKUPER

Ttd

POERWOSASMITO

Let.Kol.Inf.NRP.10805

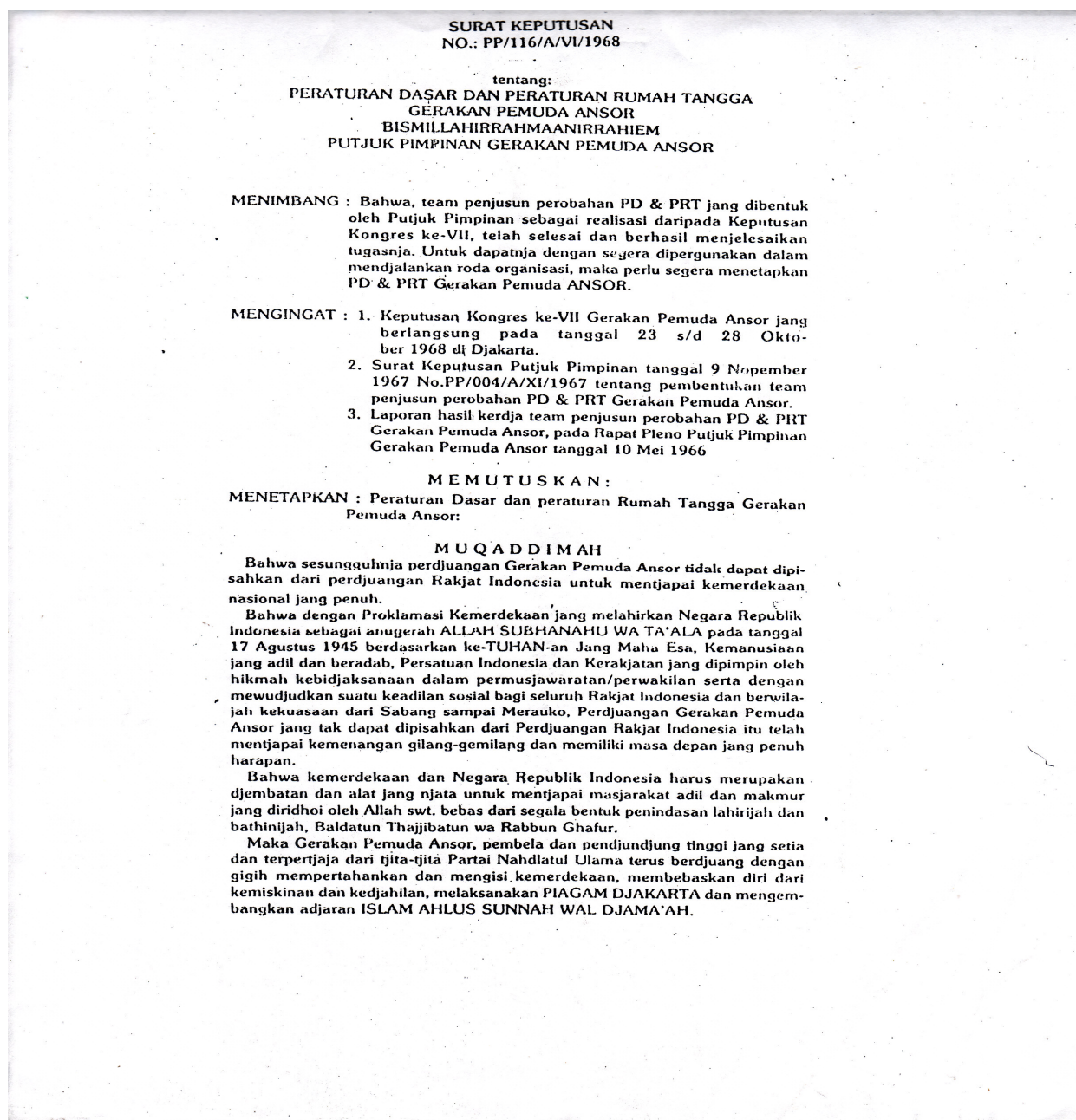
SOEDARSO

Sipil D/II Nrp. 89245

Sumber: Museum Mandala Bakti Kodam IV/Diponegoro

LAMPIRAN 8

Surat Keputusan PD/PRT Gerakan Pemuda (GP) Ansor tahun 1968.



PERATURAN DASAR GERAKAN PEMUDA ANSOR

Pasal I

N A M A

Organisasi ini bernama Gerakan pemuda Ansor disingkat Pemuda Ansor, didirikan di Surabaya pada tanggal 14 Desember 1949 sebagai kelanjutan dari "ANSOR NAHDLATUL ULAMA" yang didirikan pada tanggal 10 Muharrom 1353 H. atau tanggal 24 April 1934 M.

Pasal II

D A S A R

Gerakan Pemuda Ansor berdasarkan ISLAM.

Pasal III

L A M B A N G

Lambang Gerakan Pemuda Ansor adalah: gambar segi tiga sama sisi dengan garis tebal sebelah luar dan garis tipis sebelah dalam, didalamnya terdapat bulan sabit dengan sembilan bintang mengelilinginya, satu diantaranya yang terbesar terletak diatas bulan sabit, dengan lima garis sinar keatas dan tiga kebawah, dan tulisan "ANSOR" dibawahnya.

Lukisan tersebut dilukiskan dengan warna putih diatas dasar hijau.

Pasal IV

S I F A T

Gerakan Pemuda Ansor adalah suatu Organisasi Pemuda ISLAM yang bersifat Nasional dan demokratis sepanjang adjaran-adjaran Islam, serta merupakan organisasi kader dan alat perjuangan Partai NAHDLATUL 'ULAMA yang terpertjaja.

Pasal V

T U D J U A N

1. Berlakunya sjari'at Islam dengan berhaluan salah satu dariempat Madzhab: Hanafi, Maliki, Sjafi'ie dan Hambali.
2. Terbentuknja kehidupan masjarakat yang berdasarkan ISLAM, untuk menjapai kebahagiaan dan kesedjahteraan rohani dan djasmani.
3. Persatuan Pemuda-pemuda Islam dalam suatu Organisasi untuk membentuk kepribadian yang luhur.
4. Terdjaminnja perlindungan hak-hak azasi manusia oleh negara.

Pasal VI

P O K O K U S A H A

Untuk menjapai maksud pasal V Gerakan Pemuda Ansor berusaha:

1. Menjadarkan Pemuda-pemuda Islam terhadap kewadjabannja memperjuangkan tjita-tjita Islam.
2. Mempertinggi mutu pendidikan dan pengadjaran serta memperluas ilmu pengetahuan yang bermanfaat terhadap Agama Bangsa dan Negara.
3. Menpergiat pendidikan rohani dan djasmani untuk memperkuat Djama'ah Islamijah dalam usaha mewujudkan Masjarakat Islamijah.
4. Mengadakan hubungan dan kerdjasama dengan Organisasi-organisasi, terutama dengan organisasi Pemuda Islam dalam dan luar negeri didalam menegakkan Agama dan kedaulatan Negara, serta kemerdekaan dan kebebasan semua Bangsa.
5. Menjusun program umum dan pedoman kerdja organisasi yang sesuai dengan kepentingan para anggauta dan organisasi serta perkembangan masjarakat.
6. Mengembangkan kebudajaan Islam dan memelihara pertumbuhan kebudajaan lain yang tidak bertentangan dengan sjari'at Islam.
7. Mendjalankan kegiatan-kegiatan kemasjarakatan dalam rangka pembinaan masjarakat yang demokratis, adil dan makmur.

Pasal VII

KEDUDUKAN PUTJUK PIMPINAN

1. Putjuk Pimpinan berkedudukan di Ibu Kota Negara.
2. Dalam keadaan luar biasa, Putjuk Pimpinan dapat memindahkan kedudukannya.

Pasal VIII

KEANGGATAAN

Setiap Pemuda Islam Indonesia yang berumur 15 s/d 40 tahun, yang menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor, dapat diterima menjadi anggota.

Pasal IX

SUSUNAN ORGANISASI

Gerakan Pemuda Ansor mempunyai susunan Organisasi sebagai berikut:

- a- Putjuk Pimpinan
- b- Pimpinan Wilajah
- c- Pimpinan Tjabang
- d- Pimpinan Anak Tjabang
- e- Pimpinan Ranting.

Pasal X

SISTIM PIMPINAN

1. Pimpinan Organisasi dilakukan menurut sistim ke-Ketua-an, Sekretariat, Kebendaharaan dan Pembantu-pembantu.
2. Untuk melantarkan jalannya Pimpinan Organisasi maka diadakan beberapa Departemen-departemen.
3. Segala sesuatu mengenai Pimpinan Organisasi diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal XI

RAPAT-2, KONPERENSI-2 dan KONGRES

1. Untuk melantarkan jalannya organisasi, maka ditetapkan adanya rapat-rapat, Konperensi-konperensi dan Kongres.
2. Rapat terbagi atas Rapat Anggauta dan rapat-rapat Pengurus.
3. Konferensi terdiri dari Konferensi Anak Tjabang, Konferensi Tjabang, Konferensi Wilajah dan Konferensi Besar.
4. Kongres terbagi atas Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa.

Pasal XII

KEUANGAN

Keuangan Organisasi didapat dari:

- a. Uang Pangkal
- b. Uang iuran Anggauta
- c. Uang iuran tahunan (I'annah Sanawijah)
- d. Uang bantuan Kongres (I'annah Kongres)
- e. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal XIII

PERUBAHAN

Peraturan Dasar ini hanya dapat dirobah oleh Kongres dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga suara yang sah.

Pasal XIV

TAMBAHAN

1. Peraturan Dasar ini berlaku setelah disahkan oleh Kongres ke-VII (tudjuh) pada tanggal 24 Radjab 1387 H atau tanggal 28 Oktober 1967 di Djakarta.
2. Sesuatu jang tidak ditjantumkan dalam Peraturan Dasar ini, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga dan/atau ketentuan-ketentuan Pujjuk Pimpinan.
3. Djika Gerakan Pemuda Ansor dibubarkan dengan Keputusan Kongres atau referendum, maka hak miliknya akan diserahkan kepada organisasi Islam jang sehaluan dengan Gerakan Pemuda Ansor dan/atau Badan-badan Amal.

PERATURAN RUMAH TANGGA GERAKAN PEMUDA ANSOR

Pasal I

TENTANG HARI LAHIR GERAKAN

Peringatan Hari Lahir Gerakan Pemuda Ansor ditetapkan pada setiap tanggal 24 April.

Pasal II

TENTANG ARTI LAMBANG

- A. Segi tiga sama sisi
 1. Segitiga berarti:
 - Garis alas berarti Tauhid
 - Garis sisi kanan berarti Fiq'ih.
 - Garis sisi kiri berarti Tasawuf.
 2. Sama sisi berarti keseimbangan pelaksanaan Adjaran Islam AHLUS SUNNAH WAL DJAMA'AH jang meliputi segi IMAN, ISLAM dan IHCSAN atau Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqih dan Ilmu Tasawuf.
- B. Garis sisi
 3. Garis tebal sebelah luar dan tipis sebelah dalam pada sisi segi tiga berarti: keserasian dan harmonisma antara Pimpinan (garis tebal) dan jang dipimpin (garis tipis).
- C. Warna Dasar
 4. Warna dasar hijau berarti kedamaian, kebenaran dan kesedjahteraan.
- D. Bulan Sabit
 5. Bulan sabit berarti ke-PEMUDA-an.
- E. Bintang
 6. Sembilan Bintang:
 - a- Satu jang besar berarti Sunnah Rasulullah.
 - b- Empat disebelah kanan berarti Sunnah Sahabat.
 - c- Empat disebelah kiri berarti Madzhab jang empat: Hanafi, Maliki, Sjafi'ie dan Hambali.
- F. Sinar
 7. Tiga sinar kebawah dengan lima sinar keatas:
 - a- Tiga Sinar kebawah berarti pentjaran tjahaja dasar-dasar Agama, jaitu Iman, Islam dan Ihcsan jang terhundjam kedalam djiwa dan hati.
 - b- Lima Sinar keatas berarti manifestasi pelaksanaan konkrit terhadap rukun Islam jang lima chususnya sembahjang lima waktu.
 8. Djumlah sinar jang delapan berarti juga pantjaran semangat djihad dari delapan Ashhabul Kahfi dalam menggerakkan haq dan keadilan, menentang kebathilan dan kezaliman, serta pengembangan Agama ALLAH kedelapan pendjuru angin.
- G. Tulisan ANSOR
 9. Tulisan ANSOR (huruf besar ditulis tebal) berarti ketegasan sikap dan pendirian.

Pasal III

TENTANG KEANGGOTAAN

A. Mendapatkan keanggotaan.

1. Setiap Pemuda Islam yang ingin menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor mengajukan permintaan tertulis atau lisan kepada Pimpinan Ranting didaerahnya dengan disertai uang pangkal.
2. Sedjak seorang mengajukan permintaan menjadi anggota, maka kepadanya dikenakan kewajiban-kewajiban Organisasi dan dianggap sebagai tjalon anggota sampai kepadanya diberikan tanda anggota sebagai pengesahan. Masa ini disebut masa pertjobaan yang harus dilalui sekurang-kurangnya tiga bulan, dan apabila tjalon anggota tersebut dalam masa pertjobaan itu melanggar ketentuan-ketentuan organisasi maka Pimpinan Ranting yang bersangkutan berhak memperpanjang masa pertjobaan tersebut paling lama tiga bulan atau menolaknya.
3. Setiap anggota Gerakan Pemuda Ansor, baik sebagai anggota Pimpinan maupun sebagai anggota biasa mempunyai hak yang sama untuk mempergunakan hak suara, hak dipilih aktif dan pasif, menyatakan pikiran dan pendapat, mengadakan pembelaan diri, mengajukan pertanjaan dan usul yang bersifat membangun, menghadiri rapat-rapat, pertemuan dan mengikuti kegiatan-kegiatan Organisasi.
4. Setiap anggota Gerakan Pemuda Ansor mempunyai kewajiban untuk menundukkan kesetiaan kepada Organisasi, dan melaksanakan semua keputusan organisasi.
5. Setiap anggota Gerakan Pemuda Ansor mempunyai kewajiban untuk membayar uang iuran, iuran tahunan (l'ناه Sanawijah) dan uang Kongres (l'ناه Kongres).
6. Djumlah uang yang dimaksud dalam pasal III ayat 1 dan 5 akan ditentukan oleh Putjuk Pimpinan.

B. Kehilangan Keanggotaan

7. Seorang anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat kehilangan keanggotaannya karena ia meninggal dunia, mengajukan permintaan berhenti, telah mentjapai umur 40 tahun atau karena dipetjat.
8. Seorang anggota Gerakan Pemuda Ansor dapat dipetjat sementara (schorsing) atau dipetjat (royement) karena melanggar Sjari'at Islam melanggar Bai'at Pimpinan bagi anggota Pimpinan atau melanggar ketentuan ketentuan organisasi atau karena melalaikan kewajibannya sebagai anggota. Pemetjatan sementara adalah merupakan peringatan.
9. Seorang anggota Gerakan Pemuda Ansor yang dipetjat sementara atau dipetjat dapat dan berhak mengadakan pembelaan diri setjara bertingkat.
10. Anggota bisa dipetjat sementara atau dipetjat oleh Pimpinan Ranting dan dapat mengadakan pembelaan diri serta naik banding sampai ketingkat Pimpinan Anak Tjabang. Keputusan Pimpinan Anak Tjabang adalah mengikat.
11. Anggota Pimpinan Ranting dipetjat sementara atau dipetjat oleh Pimpinan Ranting dan dapat mengadakan pembelaan diri serta naik banding sampai ketingkat Pimpinan Anak Tjabang. Keputusan Pimpinan Anak Tjabang adalah mengikat.
12. Anggota Pimpinan Anak Tjabang dipetjat sementara atau dipetjat oleh Pimpinan Anak Tjabang dan dapat mengadakan pembelaan diri serta naik banding sampai ketingkat Pimpinan Tjabang. Keputusan Pimpinan Tjabang adalah mengikat.
13. Anggota Pimpinan Tjabang dipetjat sementara atau dipetjat oleh Pimpinan Tjabang dan dapat mengadakan pembelaan diri serta naik banding sampai ketingkat Pimpinan Wilajah. Keputusan Pimpinan Wilajah adalah mengikat.
14. Anggota Pimpinan Wilajah dipetjat sementara atau dipetjat oleh pimpinan Wilajah dan dapat mengadakan pembelaan diri serta naik banding sampai ketingkat Putjuk Pimpinan. Keputusan Putjuk Pimpinan adalah mengikat.
15. Anggota Putjuk Pimpinan dipetjat sementara atau dipetjat oleh Putjuk Pimpinan dan dapat mengadakan pembelaan diri serta naik banding

sampai ketingkat Kongres.

- 16 Pemetjatan sementara dan pemetjatan jang tidak sesuai dengan ajat diatas tidak dianggap sah.

C. Perangkapan Keanggotaan

- 17 Setiap anggota Gerakan Pemuda Ansor tidak diperbolehkan merangkap keanggotaan organisasi lain jang mempunyai dasar dan tujuan jang bertentangan dengan dasar dan tujuan Gerakan Pemuda Ansor.

- 18 Djika seorang Anggota Pemuda Ansor ingin merangkap keanggotaan organisasi lain jang tidak termaksud dalam ajat 17 diatas maka ia harus meminta persetujuan lebih dahulu kepada Putjuk Pimpinan.

D. Pembekuan Badan Pimpinan dalam Organisasi.

- 19 Pimpinan-pimpinan Ranting, Anak Tjabang, Tjabang dan Wilayah sebagai Badan Pimpinan dalam Organisasi Gerakan Pemuda Ansor hanya dapat dibekukan sementara atau dibekukan oleh Putjuk Pimpinan.

Pasal IV

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

A. PUTJUK PIMPINAN

1. Putjuk Pimpinan adalah Pimpinan Tertinggi sehari-hari dalam organisasi jang menerima amanat, hak dan kewajiban dari Kongres untuk menjalankan Pimpinan dan memegang tanggung jawab organisasi setjara bersama (kologial) keluar dan kedalam setjara umum dalam melaksanakan usaha kegiatan dan program organisasi.
2. Putjuk Pimpinan terbagi atas dua badan jaitu Dewan Harian jang terdiri dari Ketua Umum, 4 (empat) orang Ketua, Sekretaris Umum, 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Umum dan Bendahara, dan Dewan Pleno jang terdiri dari Dewan Harian, Ketua-ketua Departemen dan 6 (enam) orang anggota Putjuk Pimpinan.
3. Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Ketua IV, Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum dipilih oleh Kongres, sedangkan Ketua-ketua Departemen dan Anggota-anggota Putjuk Pimpinan lainnya ditundjuk oleh mereka jang dipilih tersebut.
4. Masa jabatan Putjuk Pimpinan paling lama (empat) tahun dan dapat dipilih lagi.
5. Seorang dapat dipilih menjadi Pengurus Putjuk Pimpinan apabila ia telah menjadi Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor sekurang-kurangnya 4 tahun dan berumur tidak lebih dari 45 tahun.
6. Putjuk Pimpinan berkewajiban memberikan bimbingan kepada Pimpinan pimpinan organisasi di daerah-daerah, memperluas dan mengembangkan organisasi.
7. Putjuk Pimpinan berkewajiban melaksanakan semua keputusan Kongres dan Konperensi Besar.
8. Putjuk Pimpinan berkewajiban melaporkan kepada Kongres dan Konperensi Besar tentang kebijaksanaan umum keluar dan kedalam, administrasi dan keuangan organisasi.
9. Putjuk Pimpinan mempunyai hak untuk: a. mengusahakan berdirinya Pimpinan Wilayah dan Tjabang, b. menjabut surat pengesahan, membatalkan keputusan keputusan Pimpinan Wilayah dan Tjabang jang bertentangan dengan sjareat-sjareat Islam, PD & PRT atau jang merugikan organisasi seluruhnya, c. memberikan tanda penghargaan kepada mereka jang berjasa kepada organisasi, d. memberikan dan menjabut tanda anggota.
10. Putjuk Pimpinan diperlengkapi dengan beberapa Departemen jang diketuai oleh Ketua-ketua Departemen jang bertanggung jawab kepada Putjuk pimpinan. Djika dipandang perlu Putjuk Pimpinan dapat membentuk badan-badan khusus baik bersifat sementara (panitia) maupun tetap.

B. PIMPINAN WILAJAH

- 11 Pimpinan Wilayah adalah Badan Pimpinan dalam organisasi yang menerima amanat dari Putjuk Pimpinan dan bersamaan dengan itu menerima hak kekuasaan dan kewajiban dari Konperensi Wilayah untuk menjalankan Pimpinan dan tanggung jawab Organisasi setjara bersama keluar dan kedalam setingkat dan sedaerah Wilayah, terutama dalam melaksanakan usaha, kegiatan dan program organisasi.
- 12 Pimpinan Wilayah dapat dibentuk di tiap daerah Propinsi atau daerah Istimewa di mana telah berdiri paling sedikit 5 Pimpinan Tjabang yang sjah untuk Pulau Djawa atau 3 Pimpinan Tjabang yang sjah untuk Pulau-pulau lainnja.
- 13 Pimpinan Wilayah terbagi atas dua Badan, jaitu Dewan Harian yang terdiri dari Ketua Utama, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris Utama, Sekretaris dan Bendahara, dan Dewan Pleno yang terdiri dari Dewan Harian, Ketua-ketua Departemen dan Anggauta-anggauta Pimpinan Wilayah.
- 14 Ketua, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris Utama dan Sekretaris Pimpinan Wilayah dipilih oleh Konperensi Wilayah, sedangkan Ketua-ketua Departemen dan anggauta-anggauta lainnja ditundjuk dan diangkat oleh mereka yang dipilih tersebut.
- 15 Mereka baik yang dipilih maupun yang ditundjuk harus disjahkan oleh Putjuk Pimpinan. Masa djabatan mereka paling lama 2 tahunan dan dapat dipilih lagi.
- 16 Seorang dapat dipilih menjadi Pengurus Pimpinan Wilayah apabila telah menjadi Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor sekurang-kurangnya 3 tahun.
- 17 Pimpinan Wilayah mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan kepada pimpinan pimpinan Tjabang di daerahnja, memperluas dan mengembangkan Organisasi.
- 18 Pimpinan Wilayah selalu bertanggung jawab kepada Putjuk Pimpinan djuga berkewajiban melaporkan kepada Konperensi Wilayah tentang kebidjaksanaan umum keluar dan kedalam, administrasi dan keuangan organisasi.
- 19 Pimpinan Wilayah mempunyai hak untuk mengumpulkan hal-hal yang tersebut dalam pasal IV-A ayat 9 PRT kepada Putjuk Pimpinan, mengatur daerah Wilajahnya menurut kebidjaksanaan dan kebutuhan daerahnja sedjauh tidak bertentangan dengan Sjari'at Islam. PD & PRT dan kebidjaksanaan umum Putjuk Pimpinan.
- 20 Pimpinan Wilayah mempunyai hak mengirimkan utusannja ke-Konferensi Besar dan Kongres.
- 21 Pimpinan Wilayah diperlengkapi dengan beberapa Departemen yang diketuai oleh Ketua-ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Wilayah.
- 22 Apabila dipandang perlu Pimpinan Wilayah dapat menundjuk salah seorang anggauta Pimpinan Wilayah menjadi Komisaris Daerah untuk mengkoordinir Tjabang-tjabang dilingkungan daerahnja guna mentjapai efisiensi kerdja yang sebesar besarnja.

C. PIMPINAN TJABANG

- 23 Pimpinan Tjabang adalah Badan Pimpinan dalam Organisasi yang menerima amanat dari Putjuk pimpinan dan Pimpinan Wilayah dan bersama dengan itu menerima hak kekuasaan dan kewajiban dari Konperensi Tjabang untuk menjalankan Pimpinan dan Tanggung jawab organisasi setjara bersama keluar dan kedalam setingkat dan sedaerah Tjabang, terutama dalam melaksanakan usaha, kegiatan dan program organisasi.

- 24 Pimpinan Tjabang dapat dibentuk ditiap daerah tingkat II, atau dalam keadaan istimewa ditiap tempat dimana telah berdiri paling sedikit 5 Pimpinan Anak Tjabang yang sah untuk Pulau Jawa dan 3 Pimpinan Anak Tjabang yang sah untuk Pulau-pulau lainnya.
- 25 Pimpinan Tjabang terbagi atas dua badan, yaitu Dewan Harian yang terdiri dari Ketua Utama, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Utama, Sekretaris dan Bendahara, dan Dewan Pleno yang terdiri dari Dewan Harian, Ketua-ketua Departemen dan anggota Pimpinan Tjabang.
- 26 Ketua Utama, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Utama dan Sekretaris Pimpinan Tjabang dipilih oleh Konferensi Tjabang, sedangkan Ketua-ketua Departemen dan anggota-anggota lainnya ditunduk/diangkat oleh mereka yang dipilih tersebut.
- 27 Mereka baik yang dipilih maupun yang ditunduk harus disahkan oleh Pimpinan Wilayah, kecuali Pimpinan yang pertama kali disahkan oleh Putjuk Pimpinan bersama dengan pengesahan berdirinya Tjabang. Masa jabatan mereka paling lama 2 tahun dan dapat dipilih lagi.
- 28 Seorang dapat dipilih menjadi Pengurus Pimpinan Tjabang apabila ia telah menjadi Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor sekurang-kurangnya 2 tahun.
- 29 Pimpinan Tjabang mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan kepada Pimpinan Anak Tjabang dan Ranting di daerahnya, memperluas dan mengembangkan organisasi.
- 30 Pimpinan Tjabang selain bertanggung jawab kepada Pimpinan Wilayah dan Putjuk Pimpinan juga berkewajiban melaporkan kepada Konferensi Tjabang tentang kebijaksanaan umum keluar dan kedalam, administrasi dan keuangan organisasi.
- 31 Pimpinan Tjabang mempunyai hak untuk mengusulkan hal-hal yang tersebut dalam pasal IV ayat 9 PRT kepada Putjuk Pimpinan dengan persetujuan Pimpinan Wilayah, dan mengatur daerah Tjabangnya menurut kbidaksanaan dan kebutuhan daerahnya sed jauh tidak bertentangan dengan sjare'at Islam, PD & PRT dan kbidaksanaan umum Putjuk Pimpinan, serta mengesahkan berdirinya Pimpinan Anak Tjabang dan Pimpinan Ranting.
- 32 Pimpinan Tjabang: 1 diperlengkapi dengan beberapa Departemen yang diketuai oleh Ketua-ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Tjabang.

D. PIMPINAN ANAK TJABANG

- 33 Pimpinan Anak Tjabang adalah badan Pimpinan dalam Organisasi yang menerima amanat dari Pimpinan Wilayah dan Tjabang dan bersama dengan itu menerima hak kekuasaan dan kewajiban dari Konferensi Anak Tjabang untuk menjalankan Pimpinan dan tanggung jawab organisasi setjara bersama keluar dan kedalam setingkat dan sederah pimpinan Anak Tjabang terutama keluar dan kedalam setingkat dan sederah Pimpinan Anak Tjabang terutama dalam melaksanakan usaha, kegiatan dan program organisasi.
- 34 Pimpinan Anak Tjabang dapat membentuk ditiap daerah Ketjamatan atau dalam keadaan istimewa ditiap tempat dimana telah berdiri paling sedikit 5 Pimpinan Ranting yang sah untuk Pulau Jawa dan 3 Pimpinan Ranting yang sah untuk Pulau lainnya.
- 35 Pimpinan Anak Tjabang terbagi atas dua Badan yaitu Dewan Harian yang terdiri dari Ketua Utama, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Utama, Sekretaris dan Bendahara dan Dewan Pleno yang terdiri dari Dewan Harian Ketua-ketua Departemen dan anggota-anggota Pimpinan Anak Tjabang.

- 36 Ketua Utama, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Utama dan Sekretaris Pimpinan Anak Tjabang dipilih oleh Konperensi Anak Tjabang, sedangkan Ketua-ketua Departemen dan anggota lainnya ditunduk / diangkat oleh mereka yang dipilih tersebut.
- 37 Mereka baik yang dipilih maupun yang ditunduk diangkat harus disahkan oleh Pimpinan Tjabang, masa jabatan mereka paling lama 1 tahun dan dapat dipilih lagi.
- 38 Seseorang dapat dipilih menjadi Pengurus Pimpinan Anak Tjabang apabila ia telah menjadi Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor sekurang-kurangnya 1 tahun.
- 39 Pimpinan Anak Tjabang mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan kepada Pimpinan Ranting di daerahnya, memperluas dan mengembangkan organisasi.
- 40 Pimpinan Anak Tjabang selain bertanggung jawab kepada Pimpinan Tjabang juga berkewajiban melaporkan kepada Konperensi Anak Tjabang tentang kebijaksanaan umum keluar dan kedalam, administrasi dan keuangan Organisasi.
- 41 Pimpinan Anak Tjabang mempunyai hak untuk mengusulkan seseorang untuk diberikan tanda penghargaan dan tanda anggota serta mentjabutnya kepada Pimpinan Tjabang dan mengatur daerah Pimpinan Anak Tjabang menurut kebijaksanaan dan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, PD & PRT dan kebijaksanaan umum Pimpinan.
- 42 Pimpinan Anak Tjabang dilengkapi dengan beberapa Departemen yang diketuai oleh Ketua-ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Anak Tjabang.

E. PIMPINAN RANTING

- 43 Pimpinan Ranting adalah badan pimpinan dalam organisasi yang menerima amanat dari Pimpinan Tjabang dan Pimpinan Anak Tjabang dan bersama dengan itu menerima hak kekuasaan kewajiban dari rapat anggota untuk menjalankan Pimpinan dan memegang tanggung jawab Organisasi setinggi bersama keluar dan kedalam tingkat dan sederhana ranting, terutama dalam melaksanakan usaha kegiatan dan program organisasi.
- 44 Pimpinan Ranting dapat dibentuk di tiap Keluarga (desa), dimana telah ada paling sedikit 25 orang anggota Gerakan Pemuda Ansor.
- 45 Pimpinan Ranting terdiri dari Ketua Utama, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Utama, Sekretaris dan Bendahara serta beberapa anggota Pimpinan Ranting.
- 46 Ketua Utama, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Utama dan Sekretaris dipilih oleh rapat anggota, sedangkan anggota-anggota Pimpinan lainnya ditunduk/diangkat oleh mereka yang dipilih tersebut.
- 47 Mereka yang dipilih maupun yang ditunduk harus disahkan oleh Pimpinan Tjabang. Masa jabatan mereka paling lama 1 tahunan dan dapat dipilih lagi.
- 48 Seorang dapat dipilih menjadi Pengurus Pimpinan Ranting apabila ia telah menjadi anggota Gerakan Pemuda Ansor sekurang-kurangnya 1 tahun.
- 49 Pimpinan Ranting berkewajiban untuk menerima pendaftaran calon anggota menurut ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam PD dan PRT dan meneruskannya kepada Pimpinan Tjabang.
- 50 Pimpinan Ranting berkewajiban memberikan bimbingan kepada para anggota dan memperbanyak anggota.
- 51 Pimpinan Ranting mempunyai hak untuk mengusulkan kepada Pimpinan Anak Tjabang dan Pimpinan Tjabang segala sesuatu untuk kepentingan para anggota termasuk pemberian tanda penghargaan dan tanda anggota serta mentjabutnya sepanjang tidak bertentangan dengan PD & PRT dan kepentingan organisasi seluruhnya.

- 52 Untuk menjapai hasil yang lebih sempurna dalam pekerjaan Organisasi, Pimpinan Ranting dapat membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari sepuluh orang anggota yang dipimpin oleh seorang Kepala Kelompok yang ditunjuk/diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Ranting.
- 53 Pimpinan Ranting selain bertanggung jawab kepada Pimpinan Anak Tjbang juga berkewajiban untuk memberikan laporan kepada Rapat anggota tentang kebidaksanaan umum kedalam dan keluar, administrasi dan keuangan organisasi.

F. TENTANG DJABATAN

- 54 Orang pertama dalam Pimpinan (Ketua Umum dan Ketua-ketua Utama) hanya bisa dipilih dua kali berturut-turut sebagai orang pertama.

G. PEMBERHENTIAN KETUA DEPARTEMEN DAN ANGGAUTA PIMPINAN

- 55 Ketua Departemen dan Anggota Pimpinan diberhentikan oleh Pimpinan Harian.

H. BAI'AT

- 56 Semua Pimpinan sebelum memegang jabatan dan menjalankan tugas-tugasnya diwajibkan membuat pernyataan kesediaan diri setjara tertulis dan mengutjapkan bai'at menurut tata-tjara sbb.:
- a- Bai'at Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor diutjapkan oleh setiap Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor sebelum ia memulai tugasnya.
 - b- Pengutjapan bai'at untuk Pimpinan terpilih dilakukan didepan Sidang yang melakukan pemilihan (Putjuk Pimpinan terpilih didepan Kongres, Pimpinan Wilayah terpilih didepan Konperensi Wilayah, Pimpinan Tjbang terpilih didepan Konperensi Tjbang, Pimpinan Anak Tjbang terpilih didepan Konperensi Anak Tjbang dan Pimpinan Ranting terpilih didepan rapat anggota).
 - Pengambilan Bai'at diambil oleh Pimpinan Sidang yang bersangkutan.
 - c- Untuk Pimpinan yang diangkat, pengutjapan bai'at diambil dan dilakukan oleh Pimpinan terpilih.
 - d- Upatjara pengambilan bai'at dilakukan dibawah persaksian Kitab Surji Al-Qur'an.

- 57 Bai'at Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor adalah:

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIEM
ASJHADU ALLA ILAHA ILLALLAH WA
ASJHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH.

Saja berbai'at, bahwa saya, dalam menerima jabatan Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, akan mendjunjung tinggi, amanat yang diperjajakan kepada saya oleh Gerakan, dengan penuh rasa tanggung jawab kepada ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA, bangsa dan negara.

Saja berbai'at, bahwa saya, dalam menerima jabatan Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, akan menunaikan segala kewajiban saya, guna terwujudnya tjita-tjita Gerakan Pemuda Ansor, dengan berpegang teguh pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan.

Saja berbai'at, bahwa saya, dalam menerima jabatan Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, tidak akan sekali-kali, menerima atau memberi, langsung ataupun tak langsung, sesuatu djangji atau pemberian yang saya ketahui, berhubungan dengan jabatan saya dalam gerakan, yang dapat merugikan perjuangan Gerakan, merusak disiplin Gerakan, dan merendahkan martabat Gerakan.

LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAHIL 'ALIJJIL 'ADZIM.

Pasal V
TENTANG DEPARTEMEN

1. Di Putjuk Pimpinan diadakan Departemen-departemen:
 - a - Luar Negeri
 - b - Penerangan
 - c - Kader dan Pendidikan
 - d - Usaha dan Keuangan
 - e - Sosial dan Pembangunan
 - f - Olah Raga dan Kebudayaan
 - g - Organisasi
 - h - Pramuka/Kepanduan
2. Dipimpinan pimpinan Wilayah, Tjabang dan Anak Tjabang diadakan Departemen departemen:
 - a - Penerangan
 - b - Kader dan Pendidikan
 - c - Sosial dan Pembangunan
 - d - Olah Raga dan Kebudayaan
 - e - Usaha dan Keuangan
 - f - Organisasi
 - g - Pramuka/Kepanduan
3. Tugas masing-masing Departemen diatur dalam suatu pedoman kerdja yang diberikan oleh Putjuk Pimpinan.

Pasal VI
TENTANG RAPAT-RAPAT

- A. RAPAT ANGGAUTA
 1. Rapat anggota harus diadakan paling sedikit satu tahun sekali, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu waktu atas keputusan Pimpinan Ranting atau atas permintaan paling sedikit separoh lebih jumlah anggota yang sah.
 2. Rapat anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh separo lebih jumlah anggota yang sah, ketjuali dalam keadaan memaksa atas persetujuan yang hadir Pimpinan Ranting dapat menjimpang dari ketentuan ini.
 3. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh separo lebih dari jumlah anggota yang hadir, termasuk anggota anggota Pimpinan Ranting.
 4. Dalam keadaan suara sama, diadakan pemungutan suara ulangan sekali. Djika keadaan suara masih tetap sama, maka Ketua Pimpinan Ranting mempunyai suara yang menentukan.
 5. Setiap anggota yang hadir mempunyai hak satu suara, sedangkan setiap tjalon anggota yang hadir hanya mempunyai hak mengemukakan pendapat.
 6. Setiap anggota yang hadir, termasuk anggota-anggota Pimpinan Ranting, dalam pemungutan suara tentang suatu masalah masing-masing mempunyai satu suara, sedang dalam pemilihan Pengurus anggota Pimpinan Ranting tidak mempunyai hak suara. Pemungutan suara tentang pemilihan seseorang dilakukan setjara rahasia.
 7. Rapat anggota diadakan untuk membitjarakan pelaksanaan usaha, kegiatan dan program Organisasi dan masalah-masalah lain yang menjangkut kepentingan anggota, dan memilih Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pimpinan Ranting.
- B. RAPAT PIMPINAN
 8. Rapat Pimpinan Ranting diadakan paling sedikit sebulan sekali, atau dalam keadaan Istimewa dapat ditentukan oleh Ketua Pimpinan Ranting atau atas permintaan paling sedikit sepertiga dari anggota Pimpinan Ranting.
 9. Ketentuan mengenai quorum adalah separo lebih dari jumlah anggota-anggota Pimpinan Ranting, sedangkan tentang pemungutan suara adalah separo lebih dari jumlah yang hadir.
 10. Rapat Pimpinan Ranting diadakan untuk membitjarakan masalah masalah organisasi, hal-hal yang menjangkut kepentingan anggota dan masalah-masalah lainnya.

C. RAPAT PIMPINAN ANAK TJABANG

- 11 Rapat Dewan Harian Pimpinan Anak Tjabang, yang merupakan rapat kerdja diadakan paling sedikit 14 hari sekali.
- 12 Rapat Dewan Pleno Pimpinan Anak Tjabang diadakan paling sedikit sebulan sekali, atau dalam keadaan Istimewa dapat diadakan sewaktu waktu atas penetapan Ketua atau atas permintaan paling sedikit sepertiga djumlah anggauta Pimpinan Anak Tjabang.
- 13 Ketentuan mengenai quorum adalah separo lebih dari djumlah anggauta Pimpinan Anak Tjabang sedangkan tentang pemungutan suara adalah separo lebih dari djumlah yang hadir.
- 14 Rapat Dewan Pleno Pimpinan Anak Tjabang diadakan untuk membitjarakan laporan Dewan Harian, pelaksanaan Instruksi dari Pimpinan Tjabang, masalah-masalah organisasi dan masalah-masalah umum lainnya.

D. RAPAT PIMPINAN TJABANG

15. Rapat Dewan Harian Pimpinan Tjabang yang merupakan rapat kerdja diadakan paling sedikit 14 hari sekali.
- 16 Rapat Dewan Pleno Pimpinan Tjabang diadakan paling sedikit 2 bulan sekali atau dalam keadaan Istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Ketua atau permintaan paling sedikit sepertiga dari djumlah anggauta Pimpinan Tjabang.
- 17 Ketentuan mengenai quorum adalah separo lebih dari djumlah anggauta Pimpinan Tjabang, sedangkan tentang pemungutan suara adalah separo lebih dari djumlah yang hadir.
- 18 Rapat Dewan Pleno Pimpinan Tjabang diadakan untuk membitjarakan laporan Dewan Harian, pelaksanaan instruksi dari Pimpinan Wilajah, dan Putjuk Pimpinan, masalah organisasi dan masalah-masalah umum lainnya.

E. RAPAT PIMPINAN WILAJAH

- 19 Rapat Dewan Harian Pimpinan Wilajah yang merupakan rapat kerdja diadakan paling sedikit 14 hari sekali.
- 20 Rapat Dewan Pleno Pimpinan Wilajah diadakan paling sedikit 2 bulan sekali atau dalam keadaan Istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Ketua atau atas permintaan paling sedikit sepertiga dari djumlah anggauta Pimpinan Wilajah.
- 21 Ketentuan mengenai quorum adalah separo lebih dari djumlah anggauta Pimpinan Wilajah, sedangkan tentang pemungutan suara adalah separo lebih dari djumlah yang hadir.
- 22 Rapat Dewan Pleno Pimpinan Wilajah diadakan untuk membitjarakan laporan Dewan Harian, pelaksanaan Instruksi dari Putjuk Pimpinan, masalah-masalah organisasi dan masalah-masalah umum lainnya.

F. RAPAT PUTJUK PIMPINAN

23. Rapat Dewan Harian Putjuk Pimpinan, yang merupakan Rapat Kerdja diadakan paling sedikit 14 hari sekali.
- 24 Rapat Dewan Pleno Putjuk Pimpinan diadakan paling sedikit 3 bulan sekali atau dalam keadaan Istimewa dapat diadakan sewaktu waktu atas penetapan Ketua Umum atau atas permintaan paling sedikit sepertiga djumlah anggauta Putjuk Pimpinan.
- 25 Ketentuan mengenai quorum adalah separo lebih dari djumlah anggauta Putjuk Pimpinan sedangkan tentang pemungutan Suara adalah separo lebih dari djumlah yang hadir.
- 26 Rapat Dewan Pleno Putjuk Pimpinan diadakan untuk membitjarakan laporan Dewan Harian, pelaksanaan usaha, kegiatan dan program Organisasi setjara keseluruhan pelaksanaan Keputusan Kongres dan Konferensi Besar, dan masalah-masalah lain yang menjangkut kepentingan Gerakan Pemuda Ansor, Kepemudaan dan masyarakat pada umumnya.

Pasal VII

TENTANG KONFERENSI KONFERENSI

A. KONFERENSI ANAK TJABANG

1. Konferensi Anak Tjabang diadakan paling sedikit 1 tahun sekali, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu waktu atas penetapan pimpinan Anak Tjabang atau atas permintaan paling sedikit separo lebih dari jumlah pimpinan Ranting yang sah.
2. Setiap Pimpinan Ranting berhak mengirimkan utusan dan peninjau.
3. Setiap utusan dan peninjau yang menghadiri Konferensi Anak Tjabang

harus membawa surat kepertajaan (mandat) dari pimpinan masing-masing.

4. Atjara dan tata-tertib ditetapkan oleh Pimpinan Anak Tjabang.
5. Setiap Pimpinan Ranting yang hadir dan Pimpinan Anak Tjabang masing masing mempunyai hak satu suara. Dalam Pemilihan Pengurus, Pimpinan Anak Tjabang tidak mempunyai hak suara.
6. Pemungutan suara dalam pemilihan seseorang dilakukan setjara rahasia.
7. Konferensi Anak Tjabang dianggap sah apabila dihadiri oleh separo lebih dari jumlah suara yang sah.
8. Dalam keadaan suara sama, maka diadakan pemungutan suara ulangan sekali. Jika keadaan suara masih sama, dalam hal pemungutan suara tentang masalah maka Ketua Pimpinan Anak Tjabang mempunyai suara yang menentukan, sedangkan dalam hal pemungutan suara tentang orang, diadakan undian.
9. Konferensi Pimpinan Anak Tjabang diadakan untuk membitjarakan laporan pimpinan Anak Tjabang tentang kebidjaksanaan umum, dan memilih Ketua Utama, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Utama dan Sekretaris Pimpinan Anak Tjabang.

B. KONFERENSI TJABANG

10. Konferensi Tjabang diadakan paling sedikit 2 tahun sekali, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu waktu atas penetapan Pimpinan Tjabang atau atas permintaan paling sedikit separo lebih dari Jumlah Pimpinan Anak Tjabang yang sah.
11. Setiap Pimpinan Anak Tjabang dan Pimpinan Ranting berhak mengirimkan utusan dan peninjau.
12. Setiap utusan dan peninjau yang menghadiri Konferensi Tjabang harus membawa surat kepertajaan (mandat) dari Pimpinan masing masing.
13. Atjara tata tertib ditentukan oleh Pimpinan Tjabang.
14. Setiap Pimpinan Anak Tjabang dan Pimpinan Ranting yang hadir dan Pimpinan Tjabang masing masing mempunyai hak satu suara. Dalam pemilihan pengurus, Pimpinan Tjabang tidak mempunyai hak suara.
15. Pemungutan suara pemilihan seseorang dilakukan setjara rahasia.
16. Konferensi Tjabang dianggap sah apabila dihadiri oleh separo lebih dari jumlah Pimpinan Anak Tjabang dan Pimpinan Ranting yang sah.
17. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separo lebih dari jumlah suara yang sah.
18. Dalam keadaan suara sama, maka diadakan pemungutan suara ulangan sekali. Jika keadaan suara masih tetap sama dalam hal pemungutan suara tentang masalah, maka Ketua Pimpinan Tjabang mempunyai suara yang menentukan, sedangkan dalam hal pemungutan suara tentang orang diadakan undian.
19. Konferensi Tjabang diadakan untuk membicarakan laporan Pimpinan Tjabang tentang kebidjaksanaan umum, administrasi dan keuangan Organisasi Pemuda dan masyarakat pada umumnya, dan memilih Ketua Utama, Ketua I, Ketua II Sekretaris Utama dan Sekretaris Pimpinan Tjabang.

C. KONPERENSI WILAJAH

- 20 Konperensi Wilajah harus diadakan paling sedikit 2 tahun sekali, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu waktu atas penetapan Pimpinan Wilajah atau atas permintaan paling sedikit separo dari jumlah Pimpinan Tjabang yang sah.
- 21 Setiap Pimpinan Tjabang berhak mengirimkan utusan dan penindjau.
- 22 Setiap utusan penindjau yang menghadiri Konferensi Wilajah harus membawa surat kepertjajaan (mandat) dari pimpinan Tjabang masing masing.
- 23 Atjara dan tata-tertib ditetapkan oleh Pimpinan Wilajah.
- 24 Setiap Pimpinan Tjabang yang hadir dan Pimpinan Wilajah masing mempunyai satu suara. Dalam pemilihan Pengurus, Pimpinan Wilajah tidak mempunyai hak suara.
- 25 Pemungutan suara dalam pemilihan seseorang dilakukan setjara rahasia.
- 26 Konferensi Wilajah dianggap sah apabila dihadiri oleh separo lebih dari jumlah Pimpinan Tjabang yang sah.
- 27 Setiap keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh separo dari jumlah suara yang sah.
- 28 Dalam keadaan suara sama, maka diadakan pemungutan suara ulangan sekali. Djika keadaan suara tetap sama, dalam hal pemungutan suara tentang masalah maka Ketua Pimpinan Wilajah mempunyai suara yang menentukan, sedangkan dalam hal pemungutan suara tentang orang diadakan undian.
- 29 Konferensi Wilajah diadakan untuk membitjarkan laporan Pimpinan Wilajah tentang kebijaksanaan umum, administrasi dan keuangan organisasi, masalah masalah lain yang menjangkut kepentingan Organisasi, Pemuda dan Masyarakat pada umumnya, dan memilih Ketua Utama, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris Utama dan Sekretaris Pimpinan Wilajah.

D. KONPERENSI BESAR

- 30 Konperensi diadakan paling sedikit 2 tahun sekali, atau dalam keadaan istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Putjuk Pimpinan atau atas permintaan paling sedikit separo dari jumlah Pimpinan Wilajah yang sah.
- 31 Setiap Pimpinan Wilajah berhak mengirimkan paling sebanjak 2 orang utusan.
- 32 Setiap utusan yang menghadiri Konperensi Besar harus membawa surat kepertjajaan (mandat) dari Pimpinan Wilajah masing-masing.
- 33 Setiap Pimpinan Wilajah dan setiap anggota Putjuk Pimpinan yang hadir masing masing mempunyai hak suara.
- 34 Konperensi Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh separo lebih dari jumlah Pimpinan Wilajah yang sah, sedangkan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separo lebih dari jumlah suara yang sah.
- 35 Dalam keadaan suara sama, maka diadakan pemungutan suara ulangan sekali. Djika keadaan suara masih tetap sama, dalam hal pemungutan suara tentang masalah maka Ketua Umum mempunyai suara yang menentukan, sedangkan dalam hal pemungutan suara tentang orang, diadakan undian.
- 36 Konferensi Besar diadakan untuk membitjarkan masalah masalah penting yang timbul diantara masa dua Kongres, menindjau pelaksanaan hal-hal lain yang menjangkut kepentingan Organisasi, Pemuda dan masyarakat pada umumnya.

Pasal VIII TENTANG KONGRES

1. Kongres adalah Madjelis Tertinggi yang menentukan garis besar haluan Organisasi, yang penjelenggaraannya dilakukan dan dipimpin oleh Putjuk Pimpinan.
2. Kongres diadakan paling sedikit 4 tahun sekali, atau dalam keadaan Istimewa dapat diadakan sewaktu waktu atas penetapan Putjuk Pimpinan atau atas permintaan paling sedikit dua pertiga dari jumlah Pimpinan Tjabang yang sah, yang meliputi separo jumlah Wilajah.
3. Setiap Pimpinan Wilajah dan Tjabang berhak mengirimkan utusan dan penindjauan ke Kongres.
4. Setiap utusan dan penindjau yang menghadiri Kongres harus membawa surat kepertajaan (mandat) dari Pimpinan masing-masing.
5. Atjara dan tata-tertib ditetapkan oleh Putjuk Pimpinan.
6. Setiap Pimpinan Wilajah dan Tjabang yang hadir dan Putjuk Pimpinan masing-masing mempunyai hak satu suara. Dalam Pemilihan Pengurus Putjuk Pimpinan tidak mempunyai hak suara.
7. Pemungutan suara tentang pemilihan seseorang dilakukan setjara rahasia.
8. Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh separo lebih dari jumlah Pimpinan pimpinan Wilajah dan Tjabang yang sah.
9. Setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separo lebih dari jumlah suara yang sah.
10. Dalam keadaan suara sama maka diadakan pemungutan suara ulangan sekali. Jika keadaan suara masih tetap sama dalam hal pemungutan suara tentang masalah, maka Ketua Umum mempunyai suara yang menentukan, sedangkan dalam hal pemungutan suara mengenai orang diadakan undian.
11. Kongres diadakan untuk membitjarakan laporan dari Putjuk Pimpinan tentang kebidjaksanaan umum, administrasi, masalah masalah Pemuda dan masyarakat pada umumnya.
12. Kongres memilih Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Ketua IV, Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum dan memberikan hak kepada mereka untuk mengangkat / menundjuk anggota anggota Putjuk Pimpinan lainnya.
13. Kongres dengan persetujuan dua pertiga suara yang sah dapat merubah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
14. Kongres Luar Biasa hanya diadakan khusus untuk membitjarakan pelaksanaan Peraturan Dasar pasal XIV ayat 3.

Pasal IX TENTANG KEUANGAN

1. Uang pangkat, uang tahunan diserahkan (l'anah Sanawijah) dan bantuan Kongres (l'anah Kongres) seluruhnya diserahkan kepada Putjuk Pimpinan.
2. Penjerahan uang pangkat dilakukan pada waktu pendaftaran tjalon anggota. Uang iuran tahunan (l'anah Sanawijah) diserahkan oleh Pimpinan Tjabang sebanyak jumlah anggota dari Pimpinan Tjabang. Uang bantuan Kongres diserahkan sebelum Kongres menurut Jumlah anggota.
3. Perimbangan pembagian uang iuran bulanan adalah sbb.:

a - Untuk Pimpinan Ranting	30 %
b - Untuk Pimpinan Anak Tjabang	20 %
c - Untuk Pimpinan Tjabang	30 %
d - Untuk Pimpinan Wilajah	20 %

Pasal X TAMBAHAN

- Sesuai dengan Peraturan Dasar pasal XIV ayat 3, maka diadakan ketentuan ketentuan sebagai berikut:
1. Jika organisasi ini terpaksa harus dibubarkan, maka hak miliknya diserahkan kepada organisasi organisasi Islam yang sehaluan atau Badan-badan Amal.

2. Usul pembubaran organisasi dapat diterima apabila diajukan setjara tertulis kepada Putjuk Pimpinan oleh dua pertiga lebih dari djumlah Pimpinan Tjabang dan Wilajah jang sah jang meliputi separo lebih djumlah Wilajah.
3. Untuk membitjarakan usul tersebut, selambat-lambatnja tiga bulan sesudah usul diterima, Putjuk Pimpinan harus melangsungkan Kongres Luar Biasa.
4. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadliri oleh sekurang-kurangnja tiga perempat dari djumlah Pimpinan Wilajah dan Tjabang jang sah.
5. Keputusan tentang pembubaran dianggap sah apabila disetudjui oleh sekurang-kurangnja tiga perempat dari djumlah suara jang sah.

Pasal XI

P E R A L I H A N

1. Hal-hal jang belum ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga ini akan diatur didalam Peraturan khusus oleh Putjuk Pimpinan.
2. Peraturan Rumah Tangga ini mulai berlaku sedjak hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada Tanggal : 24 April 1968

Putjuk Pimpinan
Gerakan Pemuda Ansor

Ketua Umum,

Sekretaris Umum

ttd.

ttd.

J A H J A S.H

H.M.ANSHARY SJAMS

Team Penjusun perobahan
PD & PRT Gerakan Pemuda Ansor

1. H.Harun Al-Rasjid Ketua merangkap anggauta : ttd.
2. H.A. Chalid Mawardi Anggauta : ttd.
3. H.M. Danial Tandjung Anggauta : ttd.
4. Anwar Nurris Anggauta : ttd.

Sumber: Kantor Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.

LAMPIRAN 9

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (G P) Ansor Djawa Tengah, Daftar Laporan
Wilayah Gerakan Pemuda (G P) Ansor Djwa Tengah 1969.

DAFTAR LAPORAN WILAJAH GERAKAN PEMUDA ANSOR DJAWA TENGAH						
No. Kode : X						
Alamat : Djl. Ir. Tjipto No.180 Tel..Sm.889 Semarang .-						
Kode :	Nama Tjabang	Djml. An Tjab.	Djml.Rtg.	Djml.Angg.	Dnl.Banser	Ketera- ngan.
:	Kodya Semarang	5	160	7.570	7.570	:
:	Kab. Semarang	16	303	18.329	3.000	:
:	Kodya Salatiga	2	16	1.000	150	:
:	Demak	17	247	18.000	2.200	:
:	Kendal	17	282	19.250	3.000	:
:	Purwodadi/Grobogan	18	369	11.700	2.000	:
:	Kudus	9	130	12.000	3.000	:
:	Djepara	10	191	18.530	3.000	:
:	Blora	10	185	11.000	2.500	:
:	Rembang	14	240	7.800	2.000	:
:	Tjepu	6	72	1.445	500	:
:	Pati	21	321	25.511	3.000	:
:	Kodya Pekalongan	5	85	10.000	5.000	:
:	Kab. Pekalongan	12	196	17856	5.000	:
:	Botang	12	130	15.000	5.000	:
:	Pemalang	13	203	10.893	3.000	:
:	Kodya Tegal	2	15	1.012	1.000	:
:	Kab. Tegal	10	120	10.000	4.000	:
:	Brebes	17	360	50.000	5.000	:
:	Kab. Magelang	15	250	19.000	5.000	:
:	Muntilan	7	81	7.020	1.000	:
:	Parakan	3	40	4.500	2.000	:
:	Wonosobo	13	213	20.000	5.000	:
:	Kebumen	22	395	28.538	6.715	:
:	Temanggung	10	100	15.000	4.000	:
:	Purworejo	10	150	16.000	4.000	:
:	Kodya Surakarta	5	32	3.502	142	:
:	Sragen	20	212	5.000	152	:
:	Bojolali	19	150	5.000	750	:
:	Wonogiri	15	48	1.500	300	:
:	Sukoharjo	12	69	5.000	3.000	:
:	Karanganyar	6	51	4.000	500	:
:	Klaten	21	210	5.000	2.000	:
:	Purwokerto	15	157	15.865	8.000	:
:	Banjumas	9	99	6.873	1.000	:
:	Tjilatjap	15	120	10.000	1.000	:
:	Purbalingga	13	173	20.195	5.000	:
:	Banjarnegara	15	150	10.000	3.000	:
:	Kodya Magelang	5	27	1.404	200	:
Jumlah :		469	6337	476.223	109.087	

Semarang, 2 April 1969

Ketua Utama,

 Sekretaris I,
 (SALITJUN).-

Sumber: Kantor Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.

LAMPIRAN 10

Partai2 di Djateng Seruka Pentinggi Kewaspadaan

Pernyataan2 Dari Partai2 PNI; NU; IPKI; Partai Katolik dan Parkindo Djateng

P.N.I Front Marheinis Djawa Tengah, berhubungan dengan situasi tanah air dewasa ini setelah menisjau dan mengikuti perkembangan kejadian2 itu telah mengeluarkan suatu pernyataan. Isinya antara lain sbb:

1. Segenap keluarga P.N.I Front Marheinis Djawa Tengah tetap taat dan berdiri dibelakang Presiden/pimpinan besar Refolusi/Bapak Marheinis Bung Karno, serta siap menjalankan komandonya.
2. Meningkatkan kewaspadaan nasional dan memperkokoh persatuan segenap aparatur revolusi.
3. menyerukan kepada segenap keluarga P.N.I Marheinis Djawa Tengah dan segenap lapisan masyarakat untuk tetap tenag dan menjalankan tugasnya dalam bidangnya masing2.
4. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Bapak Marheinisme Pimpinan Besar Revolusi Bung Karno tetap sehat walafiat dapat terus memimpin Revolusi bangsa Indonesia.

Demikian pernyataan tentang 1 Oktober 1965 yang dikeluarkan oleh dewan daerah PNI Front Marheinis Djawa Tengah yang ditanda-tandai oleh ketua II dan sekretaris II maing2 Soemarto dan Martaharsaro.

Partai N.U. Djateng

Bersangkutan dengan situasi tanah air dewasa ini. Pengurus partai NU Djawa Tengah dalam suratnya tgl 2 Oktober 1965 telah mengintruksikan kepada warga NU serta seluruh badan keluarga serta badab otonomnya Djawa Tengah yang berbunyi:

1. Tetap taat dan setia kepada dan berdiri dibelakang Presiden/panglima tinggi ABRI/pimpinan besar Refolusi/Pahlawan Islam dan kemerekaan Bung Karno tanpa reserve.
2. Selalu siap siaga dengan bertawakal kepada Allah una mempertinggi kewaspadaan nasional terhadap segala provokasi dan semua musuh2 Revolusi.
3. Mempergiat gerakan batin guna memohon dan berdoa kepada Allah S.W.T semoga negara kita segera bebas dari segala macam bahaya dan kesulitan dan Presiden Soekarno dikaruniai kekuatan lahir dan batin serta panjang umur sehat walafiat dalam memimpin Negara Republik Indonesia

Kepada Mayor Jendral Soeharto yang telah menyelamatkan negara dari bahaya yang mengancam kami sampaikan selamat dan doa semoga Tuhan meberkahi taufik dan hidayahnya. Atas telah terhindarnya Djawa Tengah dari oknum konta revolusi, kami sampaikan ucapan trima kasih kepada ABRI Djawa Tengah kususya dan semua pejuang progresip revolusioner umumnya”Demikian instruksi tsb yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris NU wilayah Jateng masing2 H. Imam Sofwan dan Soedarno.

IPKI Djawa Tengah

Paratai IPKI Djabateng dalam pernyataan jada dikeluarkan pada tgl 2 Oktober 1965 menyatakan:

1. Mengucap syukur kehadiran Ilahi bahwa presiden/panglima tinggi ABRI/pimpinan besar Refolusi Indonesia tatp dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memimpin revolusi indonesia.
2. menyampaikan salut dan rasa terimakasih kepada Mayor Jendral Soeharto Panglima Konstrad yang telah berhasil menyelamatkan presiden dan Negara Revolusi Indonesia dan rongrongan perbuatan kontra revolusioner juga menamakan gerakan 30 september.
3. juga menyampaikan saut dan rasa terima kasih kepada Panglima Kodam VII/Diponegoro kususny ABRI yang telah behsil mengamankan kembalidaerah Jawa Tengah.
4. Partai IPKI juga berasaskan pancasila ajaran Bung Karno/sukarnoisme selalu taat dan setia serta berdiri dibelakang Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan berkewajiban mengamankan/menyelamatkan pribadi kepemimpinan serta mengamalkan dan mengadakan semua ajaran Bung Karno.

Demikian pernyataan tsb. Yang akhirnya kepada seluruh warga dan simpatisan IPKI berseru untuk selalu siap siaga dengan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mempertinggi kewaspadaan nasional dan selalu memelihara persatuan kesatuan pogresip revolusioner berjiwakan Nasakom. Demi penyelaesaian revolusi 17 Aguatus 1945 berdasarkan pancasila serta peningkatan dwikora. Memanjatkan doa kepada Tuhan semoga pimpinan besar revolusi Bung Karno tetap dalam lindungannya dan selalu mendapat taufik dan hidayat tetap memimpin revolusi Indoesia untuk membawa rakyat indonesia lebih keranjingan menggannyang nekolim dengan antekanteknya guna segera mewujudkan masyarakat yang adi dan makmur berdasarkan pancasila.

Partai Katolik Djabateng

Partai Katolik Djabateng sementara menunggu instruksi dari pusat partai Katolik di jakarta menyatakan pada tanggal 2 September bahwa seluruh anggota partai katolik Jateng hanya mengamal saru pempinan pemerintah RI dibawah Bung Karno menolak dan mengutuk komplotan kontra revolusi dibawah letkol Untung cs. Kepada seluruh anggota partai tsb. Kususny dijabateng diseruka agar hanya menaati komando Brigjen Soenjosoempeno selaku Panglima Kodam VII/Diponegoro.

Parkindo Djabateng

Parkindo Djabateng dengan semua ormasnya dalam pernyataanya tanggal 4 Oktober 1. tetap berdiri dibelakang PJM Presiden/Pangliam Tertinggi ABRI/Pimpinan besar Revolusi Bung Karno tanpa reserve.

2. merasa kehilangan serta ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya keenam pewira tinggi dan seorang pewira pertama sebagai akibat tainadakan biadap oknum kontra revolusi.

Menyerukan kepada anggotanya untuk: 1. mempertinggi kewaspadaan nasional. 2. mengulurkan bantuan dengan segenap kemampuan kesadaran serta kebijaksanaan kepada alat2 negara dimana bila diperlukan. 3. mempergiat tergalangnya persatuan dan kesatuan antar warga ditempat kediaman masing2. 4. menyanggarakan kebaktian doa sesuai dengan seruan pemerintah.

Sumber: Suara Merdeka 6 Oktober 1965

LAMPIRAN 11

Ummat Islam Djateng Dukong Penuh Kebijakan Presiden

Dalam selesaikan masalah G.30.S mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan Kontra Revolusi gerakan tsb. Pernyataan umat Islam Jateng yang didukung umat Katolik Jateng.

Umat Islam Djawa Tengah dalam pernyataanya yang didukung Umat Katolik Djateng dan dibacakan pada rapat akbar umat Islam Djawa Tengah yang dilangsungkan dilapangan muka Undip Peleburan komplek jalan Pahlawan Semarang Selasa pagi kemarin mengutuk sekeraskerasnya perbuatan kontra revolusi dan secara serentak tanpa ragu2 bersikap patuh taat kepada Presiden/panglima tinggi ABRI/pimpinan besar Refolusi/Pahlawan Islam dan kemerekaan Bung Karno, serta memanjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga beliau senantiasa mendapat taufik dan hidayat-Nya dan dikarunii sehat wakafiat sejahtera serta panjang usia dalam memimpin revolusi Indonesia.

Pernyataan yang dibacakan yang dibacakan dihadapan Sad. Tunggal oleh Imron Siregar atas nama seluruh umat Islam se-Djateng yang didukung oleh umat Katolik Djateng itu lengkap nya adalah sbb:

Bismilahirrohman nirrohim

Dengan penuh takwa dan tawakal kehadiran Allah SWT umat Islam Jawa Tengah dengan ini menyatakan sbb:

1. dengan tekad bulat kami umat Islam Jwa Tengah mendukung sepenuhnya delegasi indonesia ke konferensi afrika asia ke II di aljazair yang di pimpin langsung oleh Presiden/panglima tinggi ABRI/pimpinan besar Refolusi/Pahlawan Islam dan kemerekaan Bung Karno dan menghantarkan dengan doa dan restu semoga perundingan konferensi afrika asia ke II menghasilkan penggalangan kegotongroyongan kekuatan progresip revolusioner yang kokoh dan kuat untuk menghancurkan nekolim.
2. berhubungan dengan terjadinya peristiwa apa yang dinamakan gerakan 30 september dan dewan revolusi kami umat Islam Djawa Tengah mengutuk ekeras-kerasnya perbuatan kontra revolusi tsb. Dan secara serentak tanpa ragu2 bersikap patuh taat kepada Presiden/panglima tinggi ABRI/pimpinan besar Refolusi/Pahlawan Islam dan kemerekaan Bung Karno, serta memanjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga beliau senantiasa mendapat taufik dan hidayat-Nya dan dikarunii sehat wakafiat sejahtera serta panjang usia dalam memimpin revolusi Indonesia.
3. berhubungan dengan gugurnya pahlawan2 revolusi kami karena kebiadapan dan keganasan perbuatan teror Gerakan 30 September yaitu. JM mentri pangad Djendal Achmad Yani, Letkol Djendral Soeprapto, Letnan Djendral M.T Haryono, Letnan Djendral S.Parman, Mayor, Djendral D.I Panjaitan, Mayor Djendral Soetojo, Kapten Pier Tendean, Ajun Polisi Karel Sasuit Tubun. Maka kami Umal Islam Djawa Tengah dengan perasaan sedih yang sedalam-dalamnya menyampaikan segala duka cita dan mengucapkan inalilahi wainailahi rojiaun dan mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden/panglima tinggi ABRI/pimpinan besar Refolusi/Pahlawan Islam dan kemerdekaan Bung Karno dalam

menjelaskan apa yang dimanakan Gerakan 30 September dengan dewan revolusinya juga didalangi oleh unsur-unsur kontra revolusi juga harus ditumpas habis sampai seakar-akarnya.

4. Semoga Allah selalu melindungi Negara dan Bangsa kita serta pimpinan2nya dijauhkan dari malapetaka kehancuran dan perpecahan serta selalu diberi rahmat kekuatan lahir dan batin untuk menyelesaikan revolusi indonesia, menuju terciptanya masyarakat sosialis indonesia berdasarkan pancasila juga diridoi oleh-Nya
Amin, Amin, Allahhumma Amin.

Semarang 12 Oktober 1965

Atasnama seluruh umat Islam Djawa Tengah

Pernyataan ini didukung oleh umat Katolik Djawa Tengah

Pernyataan ini disampaikan kepada Presiden/panglima tinggi ABRI/pimpinan besar Refolusi/Pahlawan Islam dan kemerdekaan memohon kepada sad tunggal Djawa Tengah untuk menyampaikan pernyataan ini dihadapan Presiden/panglima tinggi ABRI/pimpinan besar Refolusi/Pahlawan Islam dan kemerdekaan Bung Karno. Tembusan kepada JM para wakil perdana menteri JM Menko Hankam Kasad, JM menteri panglima angkatan dan sad tunggal Djawa Tengah.

Sumber: Suara Merdeka 12 Oktober 1965

LAMPIRAN 12**LAMBANG NAHDLATUL ULAMA****LAMBANG GERAKAN PEMUDA (GP) ANSOR**

Sumber: www.nu.or.id. tanggal 14 oktober 2011

LAMPIRAN 13**LAMBANG BANSER (BARISAN ANSOR SERBAGUNA)**

Sumber: www.nu.or.id. tanggal 14 oktober 2011.